



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
( R P J P D )  
KOTA JAMBI 2005 – 2025**

**PEMERINTAH KOTA JAMBI**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social's welfare*). Pada umumnya indikator yang digunakan antara : pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan ketimpangan pendapatan atau distribusi pendapatan. Selain indikator ekonomi tersebut kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari keberhasilan dalam pembangunan sosial misalnya pendidikan dan kesehatan. Secara umum tercermin dari *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan pembangunan.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pembangunan dengan menetapkan pilihan, dengan berbasis kepada kendala dan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan yang baik harus berbasis kepada potensi sumber daya daerah (sumber daya alam dan manusia) yang dimiliki suatu daerah. Pada era otonomi daerah, perencanaan telah beralih dari perencanaan yang terpusat (*top down planning*) menjadi perencanaan yang bersumber dari bawah (*bottom up planning*) yang berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perencanaan dari bawah harus didukung dengan kualifikasi sumber daya manusia sebagai perencana dan mengikutsertakan semua *stakeholders* dalam menentukan visi, misi, arah, program dan kegiatan pembangunan. Dengan demikian diharapkan output yang diperoleh akan lebih efisien dan efektif. Aspek perencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keberhasilan pembangunan. Perencanaan yang baik harus mempunyai tujuan, sasaran dan target yang jelas, dan jangka waktu pencapaian.

Berdasarkan skala waktu perencanaan dapat bersifat jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (umumnya 5 tahun) atau jangka pendek (umumnya 1 tahun). Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan parsial. Pentingnya pengklasifikasi perencanaan adalah untuk memberikan penekanan pada visi, misi, arah pembangunan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah kota Jambi Tahun 2005-2025 diperlukan agar program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien, serta mempunyai sasaran dan tahap pelaksanaan yang jelas. Disamping itu, dalam setiap sasaran pembangunan yang dirumuskan terdapat indikator capaian yang merupakan target setiap tahapan pembangunan. Penyusunan dokumen perencanaan ini juga merupakan upaya guna mengimplementasikan kehendak Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa dalam perencanaan daerah menghendaki adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Guna memenuhi kehendak Undang-undang No 25 Tahun 2004 tersebut dan tuntutan masyarakat, maka diperlukan sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pemerintah kota Jambi yang memuat kondisi umum daerah, visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJP kota Jambi merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dengan RPJP Nasional dan Provinsi Jambi.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Jambi Tahun 2005-2025 adalah perencanaan yang berbasis kepada *resources* yang dimiliki kota Jambi dengan menjangkau informasi dari *stakeholders*. Jenis perencanaan yang dikembangkan adalah *rasional partisipatif*, yang mengandung unsur-unsur yang bersifat akomodatif dan partisipatif. Hal ini dalam upaya untuk mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya pembangunan Kota Jambi, peran serta stakeholders di akomodasi dari berbagai kegiatan diskusi baik yang bersifat terbatas untuk kalangan tertentu maupun diskusi publik. Diskusi yang digunakan dalam konsultasi publik dengan metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*)

Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU No 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia serta sumber daya buatan. Selanjutnya pada ayat 4 dikatakan bahwa pembangunan jangka panjang, adalah perencanaan untuk periode 20 (dua puluh ) tahun. Pada ayat pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Jambi ini adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat khususnya stakeholders tentang arah pembangunan jangka Panjang (2005-2025) yang dituangkan kedalam dokumen resmi perencanaan Adapun tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah :

1. Memberikan informasi kondisi dan potensi Kota Jambi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Kota Jambi.
2. Mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral yang dibuat oleh instansi teknis yang bermanfaat untuk menghindari tumpang tindih perencanaan.
3. Untuk menyusun suatu dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah kota dalam satu buku publikasi.

## **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

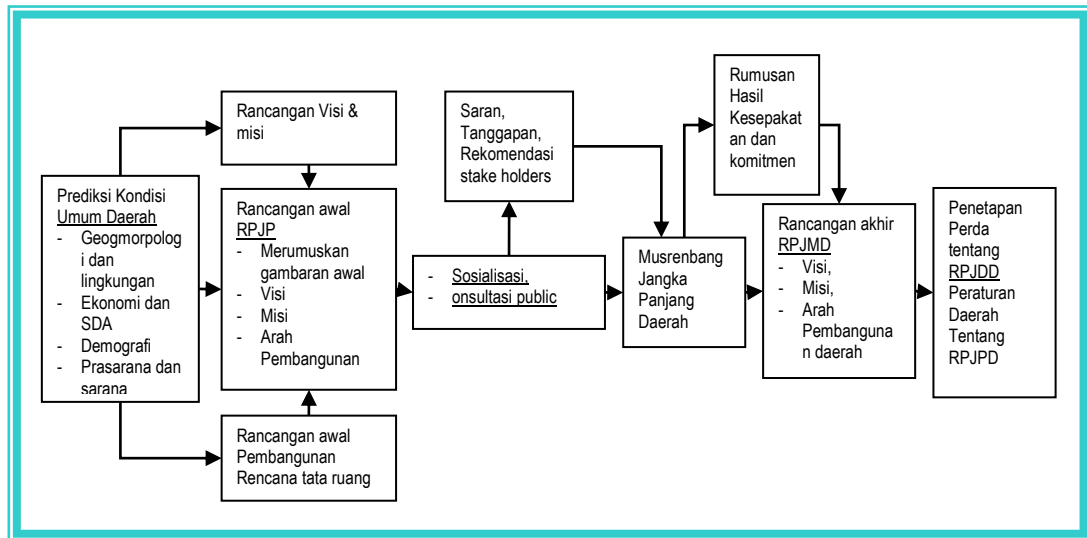
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propivinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor .....Seri );
10. Perturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 06 Seri E Nomor 04)

#### **1.4. Alur Fikir**

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Provinsi dan Nasional. Pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan RPJP

Petunjuk pelaksanaan penyusunan RPJP sebagaimana pada pasal 9 dijelaskan bahwa penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
2. Musyawarah perencanaan pembangunan
3. Penyusunan rencana akhir rencana pembangunan



*Diagram Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah*

Sehubungan dengan petunjuk yang telah ditentukan maka dalam penyusunan RPJP Kota Jambi dilaksanakan dengan tahap-tahap dalam perencanaan yang terdiri dari:

1. Identifikasi masalah
2. Pengumpulan data
3. Menetapkan visi dan misi
4. Mengestimasi kemungkinan pada masa yang akan datang
5. Identifikasi peluang dan hambatan
6. Merencanakan pelaksanaan

Dari pelaksanaan penyusunan RPJPD kota akan diperoleh dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang untuk dua puluh tahun kedepan yang memuat berbagai kondisi dan prediksi potensi, visi, misi dan arah pembangunan. Pelaksanaan penyusunan RPJPD dikerjakan oleh TIM dari berbagai disiplin ilmu yang mencakup bidang perencanaan ekonomi, hukum, ekonomi regional, pertanian, kependidikan, tata ruang, agama, dan budaya. Adapun tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Penyusunan *Term Of Reference*
2. Diskusi internal
3. Pengumpulan data dasar
4. Studi lapangan dan studi banding
5. Pengumpulan data/informasi dari akademisi (seminar sehari)
6. Prosiding seminar
7. Pengumpulan data/informasi dari dinas terkait dan lembaga lainnya.
8. Penyusunan draft awal
9. Musyawarah perencanaan pembangunan
10. Penyusunan draft akhir
11. Pencetakan draft akhir

Adapun tahapan kegiatan perencanaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota Jambi mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005. Secara Teknis pelaksanaannya Tim melakukan urutan Kegiatan berikut: (a), penyusunan Term of Reference (TOR); (b), melakukan diskusi internal sesama tim penyusun; (c), mengumpulkan data dasar potensi untuk mendukung analisis; (d), melakukan studi pustaka dan studi banding ke

daerah yang sudah mempunyai RPJP; (e), melakukan seminar untuk kalangan akademisi; (e), pembuatan proseding seminar; (f), melakukan konsultasi publik terutama pada dinas terkait; (g), penyusunan draf awal; (h), penyusunan draf akhir ; dan (i), penyerahan laporan akhir.

Pengumpulan data/informasi kualitatif dan kuantitatif dari akademisi dilakukan melalui seminar sehari yang melibatkan akademisi terutama yang berkaitan dengan disiplin perencanaan pembangunan. Untuk disiplin ilmu yang tidak tersedia ilmuwan dari Universitas Jambi akan diminta dari instansi lainnya. Kemudian seminar juga akan dilakukan untuk menjangking informasi dari para birokrat terutama kepala dinas pada berbagai instansi, khususnya dalam membuat perencanaan untuk dua puluh tahun kedepan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang kota Jambi tahun ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Kondisi Umum Daerah

BAB III. Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi Tahun 2005–2025

BAB IV. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025.

BAB V. Penutup

## BAB II

### KONDISI UMUM DAERAH

#### 2.1. Geomorfologi

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi terletak antara  $01^{\circ}$ - $30^{\circ}$  sampai  $1^{\circ}$  –  $40^{\circ}$  Lintang Selatan dan antara  $103^{\circ}$  –  $40'$  Bujur Timur sampai  $103^{\circ}$ –  $40'$  Bujur Timur. Sebelah Utara, Barat, Selatan dan Timur wilayah kota Jambi berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi. Wilayah kota Jambi dikelilingi oleh Kabupaten Muaro Jambi.

Kota Jambi mempunyai luas  $205,8 \text{ km}^2$  atau  $0,39$  persen dari luas Provinsi Jambi dengan ketinggian  $8$  kaki  $10$  meter dari permukaan laut. beriklim tropis yang terdiri dari dataran rendah, dengan rata-rata suhu maksimum  $31,93^{\circ}\text{C}$ , terdiri dari  $62$  Kelurahan,  $8$  (delapan) kecamatan, yaitu Kota Baru  $77,78 \text{ km}^2$ ; Kecamatan Jambi Selatan  $34,07 \text{ km}^2$ ; Kecamatan Jelutung  $7,92 \text{ km}^2$ ; Kecamatan Pasar Jambi  $4,02 \text{ km}^2$  ; Kecamatan Telanaipura  $30,39 \text{ km}^2$  ; Kecamatan Danau Teluk  $15,70 \text{ km}^2$ ; Kecamatan Pelayangan  $15,29 \text{ km}^2$ ; Kecamatan Jambi Timur  $20,21 \text{ km}^2$ .

Dari aspek regional seperti kota lainnya di Indonesia, kota Jambi merupakan *central place* bagi daerah sekitarnya seperti Kabupaten Muaro Jambi yang berperan sebagai *hinterland*. Kota Jambi berkembang karena besarnya dorongan permintaan dan penawaran barang dan jasa daerah sekitarnya. Hal ini disebabkan berkembangnya pendudukan dan perkembangan ekonomi yang sekaligus merupakan permintaan potensial (*potensial demand*).

Dalam pandangan teori *central place* bahwa pertumbuhan kota adalah karena dorongan permintaan yang menyebabkan terjadinya suatu pemusatan aktivitas di perkotaan. Pemusatan dimaksud seperti kegiatan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan administrasi. Dilihat dari berbagai aspek tersebut kota Jambi merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Dengan cepatnya perkembangan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya PDRB kota menuntut berbagai penyediaan fasilitas penunjang di semua bidang termasuk perdagangan, transportasi dan komunikasi.

Dengan demikian kota Jambi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat kota khususnya, masyarakat Provinsi Jambi pada umumnya. Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, perkembangan kota Jambi dalam artian geografis tidak banyak berubah, namun perkembangan ekonomi, pemerintahan dan lainnya berkembang dengan cepat, membawa implikasi kepada munculnya berbagai persoalan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan yang semakin kompleks.

#### 2.2. Demografi

Penduduk sebagai salah satu variabel pembangunan baru mendapat perhatian ketika Maltus (1709) dalam bukunya *An Essay on the Principle of Population* yang mengingatkan pada dunia bahwa pertambahan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan untuk mempertahankan hidup. Penduduk cenderung bertambah menurut pola progresi geometrik, sementara persediaan pangan meningkat menurut progresi aritmetik.

Perhatian para ekonom terhadap variabel demografi dalam konteks pembangunan semakin meningkat, walau baru sebatas pada memasukkan pertumbuhan angkatan kerja sebagai salah satu variabel eksogen dalam model pertumbuhan ekonomi. Pertengahan abad 20 para ekonom mulai mengamati berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, mereka mulai sadar bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap berbagai aspek (ekonomi, sosial, budaya, politik dan

lingkungan) sehingga dibuat suatu model interaksi variabel demografi dalam perencanaan pembangunan.

Jumlah penduduk terus meningkat, tahun 2005 dengan kepadatan sekitar 2.192/Km<sup>2</sup> atau setiap Km<sup>2</sup> terdapat 477 rumah tangga dan setiap rumah tangga dihuni oleh sekitar 4–5 orang. Bila kondisi ini tidak tersentuh oleh kebijakan secara terintegrasi dengan berbagai sektor dan tidak dikelola secara lintas bidang, maka kota Jambi akan menghadapi masalah sosial ekonomi yang sangat besar yang berimplikasi pada terhambatnya pencapaian proses pembangunan jangka panjang.

### **2.2.1. Kondisi Historis**

Sebagai ibu kota provinsi yang memiliki sarana dan prasarana ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan 9 kabupaten lainnya dan akses menuju ke kota ini cukup lancar, baik melalui darat maupun udara berdampak pada *mobilitas penduduk* yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk.

Perkembangan kondisi kependudukan kota Jambi selama kurun 1995–2005 yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,79% pertahun. Namun secara historis selama 10 tahun terakhir memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi ini diduga disebabkan oleh migrasi masuk dan keluar. Pertambahan penduduk alamiah tetap menunjukkan kecenderungan dengan persentase yang menurun. Dari aspek jenis kelamin terlihat bahwa proporsi penduduk laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan.

Selama waktu 10 tahun terdapat permasalahan penduduk antara lain : (a). pengangguran/lapangan kerja; (b), penduduk miskin; dan (c), meningkatnya kriminalitas. Persebaran penduduk yang kurang merata dapat mempengaruhi aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya. Dalam hal pola persebaran penduduk selama kurun waktu 1995-2005 tidak mengalami pergeseran yang berarti. Kota Jambi yang berpenduduk 343.072 jiwa pada tahun 1995 secara umum tersebar dilima kecamatan (Kota Baru, Jambi Selatan, Jelutung, Telanaipura dan Jambi Timur).

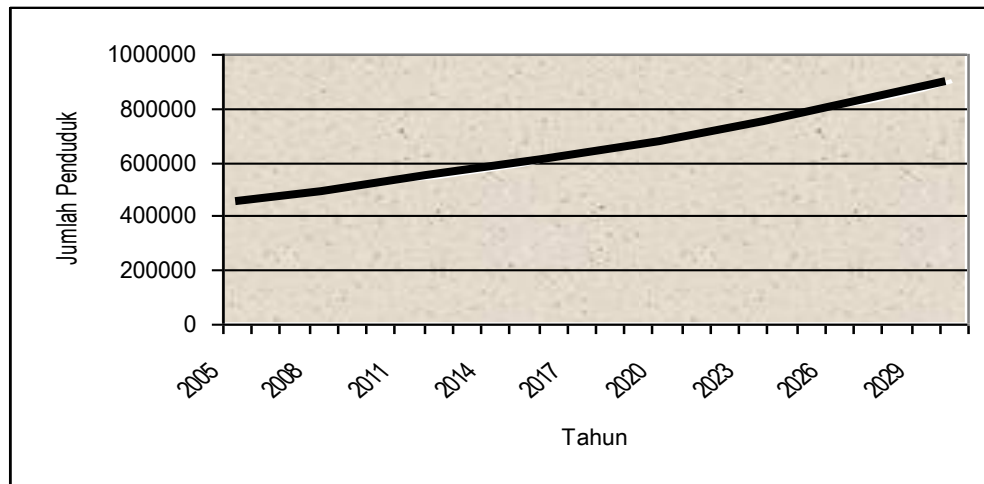
Suatu hal yang menarik untuk dicermati bahwa penduduk Kecamatan Pasar Jambi cenderung berkurang, baik secara absolut maupun persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar Jambi dengan luas wilayah hanya 1,95% dari luas kota Jambi tidak lagi menyenangkan/ kondusif sebagai kawasan tempat tinggal yang juga sebagai kawasan perdagangan. Sedangkan dua kecamatan lainnya (Danau Teluk dan Pelayangan) hanya dihuni masing-masing sekitar 3,09 % dan 3,39 % dari jumlah penduduk tahun 1995. Persentase ini cenderung menurun (2,67 % dan 2,96 %) pada tahun 2005.

Dari aspek kepadatan penduduk selama kurun waktu 1995-2005, terlihat semakin padat. Tahun 1995 setiap Km<sup>2</sup> kota Jambi dihuni oleh 1.670 jiwa dan lebih terkonsentrasi di Kecamatan Jelutung dan Pasar Jambi. Sepuluh tahun kemudian kepadatan penduduk meningkat sekitar 31,26 % atau 2.192/km<sup>2</sup> yang terkonsentrasi di Kecamatan Jelutung dan Jambi Timur.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh peningkatan jumlah unit rumah tangga berdampak pada kepadatan bangunan rumah pada setiap Km<sup>2</sup> lahan di kota Jambi. Selama kurun waktu 1995-2005 jumlah rumah tangga bertambah sebanyak 33.701 unit rumah atau meningkat sekitar 5,20 % per tahun, sementara kepadatan rumah tangga dari 316 unit/Km<sup>2</sup> pada tahun 1995 menjadi 477 unit/Km<sup>2</sup> atau meningkat sekitar 5,09 % per tahun.



## 2.2.2. Analisis Prediksi



Gambar 2.1. Prediksi perkembangan penduduk 2005-2025

Selain prediksi kuantitatif di atas, masih ada beberapa ciri kependudukan masa depan yang harus dicermati dengan benar oleh para perencana pembangunan daerah, yang sekaligus menentukan keberhasilan pembangunan yaitu :

1. Penduduk dimasa depan akan semakin berpendidikan

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang memadai. Sebab bila tidak, pengangguran terdidik akan semakin bertambah dan hal ini merupakan pemborosan terhadap investasi di sektor pendidikan, disamping kemungkinan implikasi sosial lainnya.

2. Penduduk makin sehat dan angka harapan hidup meningkat

Usia harapan hidup yang tinggi dan proporsi penduduk lanjut usia semakin besar menuntut suatu kebijakan yang serasi dengan perubahan tersebut kearah pola penyantunan keluarga ke institusi pemerintah. Suatu tantangan yang dihadapi, bagaimana memanfaatkan penduduk lanjut usia yang masih potensial (kaya pengetahuan dan pengalaman).

3. Proporsi penduduk perkotaan semakin meningkat

Peningkatan status sosial ekonomi selalu diikuti oleh aktivitas urbanisasi, sehingga penduduk perkotaan tumbuh dengan cepat. Hal ini menuntut penambahan fasilitas di perkotaan yang pada akhirnya mempengaruhi keadaan dan perkembangan fisik kota.

4. Jumlah Rumah Tangga (RT) meningkat dengan ukuran makin kecil

Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur RT. Dimasa depan ukuran RT makin kecil, namun jumlahnya makin banyak, sehingga dibutuhkan areal permukiman. Sementara kota Jambi hanya memiliki luas 205,38 Km<sup>2</sup>.

5. Mobilitas penduduk makin tinggi

Secara internal intensitas mobilitas penduduk makin tinggi, hal ini menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas. Juga berimplikasi pada pergeseran norma-norma masyarakat (ikatan keluarga dan kekerabatan) yang dalam jangka panjang berdampak perubahan sosial budaya masyarakat.

## 6. Pergeseran Lapangan Pekerjaan

Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi fisik kota Jambi, dimasa depan akan terjadi pergeseran lapangan pekerjaan dari skunder ke tersier (sektor jasa).

Dalam kaitan dengan prediksi kondisi 20 tahun ke depan, sangat erat kaitannya dengan analisis lingkungan strategis. Dari sisi kekuatan Kota Jambi dapat di rinci sebagai berikut : (a), jumlah penduduk banyak dan relatif lebih berkualitas; (b), mobilitas penduduk yang tinggi ; (c), etnis penduduk yang heterogen; (d), angka fertilitas semakin menurun; (e), angka kematian bayi semakin menurun; (f), angka harapan hidup semakin tinggi. Disamping itu dalam aspek demografi kota Jambi juga mempunyai kelemahan diantaranya : (a), persebaran penduduk yang relatif kurang merata; (b), kemampuan daya dukung lahan dan lingkungan, (c), struktur umur penduduk muda; (d), kesejahteraan penduduk yang relatif masih rendah; dan. (e), relatif tingginya kemiskinan penduduk perkotaan.

Ditinjau dari faktor eksternal kota Jambi mempunyai beberapa peluang, yaitu : (a), potensi sumber daya manusia; (b), potensi pasar terhadap berbagai produk; dan (c), bisnis properti cukup prospektif. Adapun yang menjadi tantangan kedepan diantaranya : (a), masalah ketenaga kerjaan; (b), pemanfaatan penduduk lanjut usia yang potensial; (c), mobilitas penduduk yang makin tinggi; (d), penyediaan berbagai fasilitas sosial dan (e), masalah kebersihan lingkungan.

### 2.3. Kondisi dan Prediksi Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana terjadinya peningkatan pendapatan per kapita selama kurun waktu yang panjang, yang diikuti dengan menurunnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut dan meningkatnya distribusi pendapatan. Namun untuk mengetahui perkembangan pembangunan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi diikuti pula dengan keberhasilan dalam pembangunan sosial.

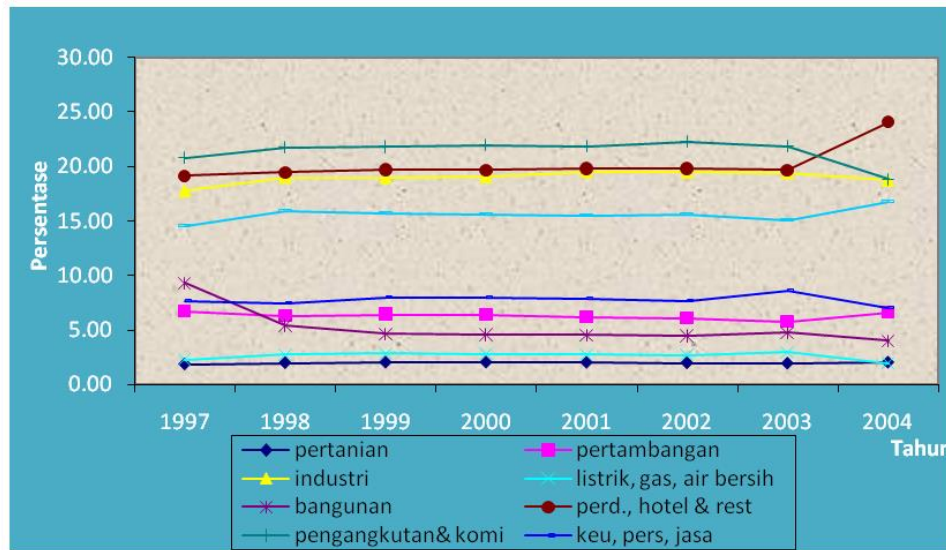
Indikator ekonomi yang sering digunakan adalah laju pertumbuhan ekonomi, GNP per kapita, laju inflasi, kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan kesempatan kerja. Adapun Indikator sosial diukur dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) dan *Physical Quality Life Index* (PQLI).

#### 2.3.1. Kondisi Historis

Indikator PDRB per kapita, selama periode tahun 1995-2004 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1995 sebesar 2,15 juta rupiah menjadi 6,98 juta rupiah pada tahun 2004. Sejalan dengan itu pertumbuhan ekonomi kota Jambi sangat berfluktuasi terutama pada periode 1997-2004. Hal ini akibat krisis ekonomi Indonesia yang juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah kota Jambi. Pertumbuhan ekonomi kota Jambi mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 3,07 %. Pada tahun 1997 sebesar minus 4,3 persen meningkat dari 1,26 % tahun 2000 dan 4,44 % tahun 2004.

Melihat lebih jauh kontribusi sektoral terhadap PDRB kota Jambi tahun 1997-2004 sebagaimana pada tampilan *Gambar 2.2*. Dari *Gambar* tersebut, terlihat perkembangan dari sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2004 menempati tempat teratas dengan 24,07 % melampaui sektor industri yang hanya 18,72 % dan pengangkutan sebesar 18,83 %. Sektor yang paling kecil kontribusinya adalah sektor listrik, gas dan air minum sebesar 1,95 % dan sektor kedua terkecil adalah sektor pertanian yaitu sebesar 2,0 %. Gambaran ini juga menunjukkan konsentrasi aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor yang dominan.

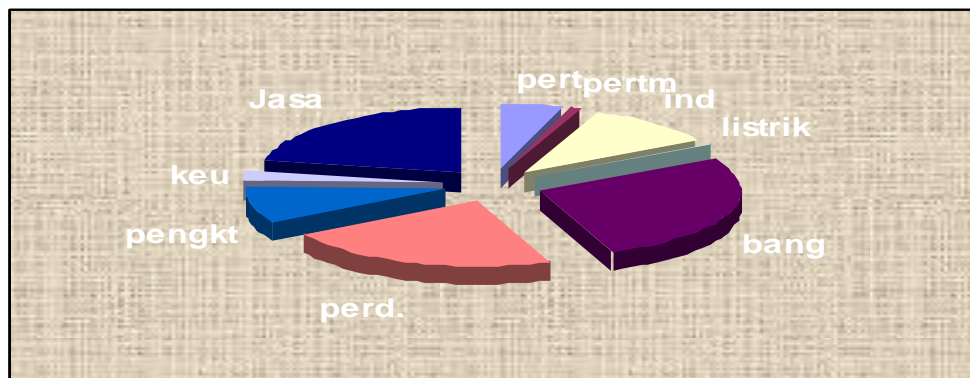
Uraian di atas menunjukkan struktur perekonomian kota Jambi. Rata-rata sumbangan tiga sektor utama sektor perekonomian tahun 1997-2004 yaitu, sektor tersier menyumbang sebesar 65 %, sekunder 26,33 % sedangkan sektor primer sebesar 8,17 %.



Gambar 2.2. Persentase sumbangan sektoral terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2000-2004

Aktivitas ekonomi khususnya sektor perdagangan beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat pesat. Hal ini disebabkan karena membaiknya kondisi perekonomian nasional dan daerah sehingga meningkatnya permintaan masyarakat, disamping itu juga karena adanya dukungan penyediaan berbagai sarana perdagangan seperti pusat-pusat pertokoan, mall dan perkembangan teknologi informasi yang memberikan kemudahan khususnya komunikasi.

Dari aspek ketenagakerjaan kondisi ekonomi dapat juga tergambar bahwa pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor bangunan menyerap tenaga kerja sebanyak 27 %. Hal ini karena sektor bangunan memang merupakan sektor yang padat tenaga kerja. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menyerap tenaga kerja sebanyak 23 %. Sedangkan penduduk yang bekerja pada sektor jasa lainnya sebanyak 22 %. Kondisi ini tidak berbeda signifikan dengan kondisi tahun sebelumnya misalnya tahun 1997.



Gambar 2.3. Persentase Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Kerja di Kota Jambi Tahun 2004

Dengan menggunakan analisis *Location quotient* (LQ), perekonomian kota Jambi digolongkan menjadi dua golongan yaitu : *industry basic* dan *industry non basic* atau industri lokal. Berdasarkan pemikiran tersebut perhitungan teknik LQ tahun 1995-2004 menunjukkan tiga pola umum yaitu yang mempunyai LQ konsisten pada angka kecil dari satu dan ada yang besar dari 2. Pola lainnya adalah sektor yang mempunyai fluktuasi tinggi.

Sektor dengan nilai LQ yang kurang dari 1 digolongkan sektor non basis, yaitu sektor pertanian dengan nilai LQ sebesar 0,07 setiap tahunnya. Sektor pertambangan & penggalian dengan angka LQ dari tahun 1995-2004 masing-masing dan 0,75; 0,53; 0,56; 0,57 dan 0,60. Sektor yang mempunyai nilai LQ yang lebih dari 2, yaitu listrik & air bersih dengan angka LQ antara 2,45–2,86. Sektor kedua adalah pengangkutan & komunikasi dengan angka LQ sebesar 2,06-2,14. Sektor keuangan, sewa & jasa perusahaan nilai LQnya berfluktuatif antara 1,81 - 3,05. Hal ini menunjukkan dinamika perkembangan sektor tersebut.

Perkembangan ekonomi secara regional terlihat bahwa di Kota Jambi berkembang pusat-pusat pertumbuhan yang ditandai dengan adanya konsentrasi kegiatan pada tempat-tempat tertentu. Aktivitas utama kegiatan tersebut terutama pada aktivitas perdagangan. Kecamatan Pasar Jambi sebagai pusat aktivitas ekonomi diikuti dengan perkembangan pusat aktivitas perdagangan di kecamatan lainnya. Konsentrasi kegiatan ini mengacu pada apa yang disebut sebagai *multiple Nuclei*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kota berkembang disekitar beberapa pusat tertentu, disekelilingi suatu pusat. Kota dibedakan atas beberapa tempat aktivitas seperti distrik perdagangan atau *central bussines distric* (CBD), industri, dan lokasi pemukiman.

Di kota Jambi konsentrasi kegiatan perdagangan di Kecamatan Pasar dan sekitarnya. Industri ringan tersebar yang merupakan *home industry* di berbagai kecamatan. Sedangkan pemukiman dapat dilihat dalam dua pola pengembangan. Konsentrasi pemukiman penduduk yang merupakan penduduk asli suatu wilayah atau kelurahan. Pemukiman lainnya adalah adanya pembangunan perumahan-perumahan baru yang banyak dikembangkan di daerah yang semula merupakan pinggiran kota. Hal ini mendorong perluasan Kota Jambi sehingga penyebaran penduduk juga makin merata.

Penyebaran penduduk ini tentunya memerlukan penyediaan fasilitas yang memadai. Berbagai fasilitas ada yang dapat disediakan oleh pasar dan ada yang tidak disediakan pasar yang tentunya memerlukan bantuan pemerintah untuk menyediakannya. Fasilitas yang tidak disediakan oleh swasta dan merupakan tanggung jawab pemerintah seperti pelayanan air minum, listrik dan sarana parasana umum seperti penyediaan jalan, terminal, pelabuhan dan bandara. Sedangkan sarana angkutan umum didominasi oleh pihak swasta baik angkutan darat, perairan dan udara.

Prasarana jalan yang dibangun pemerintah daerah kota berperan penting dalam menunjang aktivitas perekonomian. Kelancaran aksesibilitas dalam kota memerlukan pengaturan yang memadai sehingga dapat mengurangi kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas dalam kota. Hal ini berkaitan dengan rancangan pola kota yang diinginkan.

Masalah lingkungan hidup di Kota Jambi penting mendapat perhatian secara serius mengingat kota Jambi yang makin berkembang. Berbagai kegiatan ekonomi tentunya berdampak terhadap lingkungan hidup. Fokus perhatian adalah pada masalah pencemaran udara, tanah dan air. Untuk itu sistem pengelolaan limbah baik limbah industri maupun limbah rumah tangga harus diatur sedemikianrupa agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kota.

Permasalahan yang dihadapi kota Jambi tidak jauh beda dengan masalah yang dihadapi kota-kota lain di Indonesia seperti tata ruang, penyediaan sarana fisik, dan fasilitas sosial dan masalah perkembangan penduduk yang membutuhkan penyediaan lapangan pekerjaan dan kebutuhan lahan pemukiman. Dalam takaran yang lebih luas maka kota Jambi dihadapkan pada masalah bagaimana memberikan pelayanan terhadap berbagai kepentingan wilayah sekitarnya yaitu masyarakat dan pemerintahan Kabupaten lainnya, karena Kota Jambi juga sebagai Ibu Kota Provinsi. Dengan demikian

Kota Jambi dituntut mampu berfungsi sebagai pusat perdagangan dan perniagaan, pemerintahan, kebudayaan, dan kesehatan.

Adanya perubahan paradigma pembangunan ekonomi dari yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sebagai tolak ukur, menjadi indikator sosial seperti *HDI* sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Perhitungan ini akan menghasilkan indeks yang disebut sebagai indeks pembangunan manusia. Untuk Provinsi Jambi indeks pembangunan manusia pada tahun 2000 adalah sebesar 71,8. Kota Jambi mempunyai indeks pembangunan manusia tertinggi di Provinsi Jambi yaitu sebesar 75,99 sedangkan terendah yaitu Kabupaten Bungo (68,8), sedangkan Kabupaten Sarolangun sebesar 69,6.

Secara umum kabupaten dan kota di Provinsi Jambi Human development index masih tergolong pada *medium HDI* yang berarti perhatian terhadap sumberdaya manusia masih digolongkan sedang. Selain permasalahan pertumbuhan ekonomi, beberapa permasalahan lainnya yang menjadi hambatan dalam pembangunan kota Jambi di masa lalu pada dasarnya terkait dengan beberapa hal berikut :

#### **(1). Keterbatasan Keuangan Daerah**

Salah satu sumber keuangan kota Jambi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain PAD pemerintah kota juga menerima sumber keuangan dari pemerintah pusat yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun proses pembangunan mengharuskan PAD meningkat lebih tajam sejalan dengan kebutuhan pembangunan Kota, sementara sumber dana dari pemerintah pusat akan menurun.

#### **(2). Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat bila diikuti dengan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan atau pendapatan yang makin merata. Namun dalam kenyataan diperkirakan pertumbuhan ekonomi banyak disebabkan oleh meningkatnya pendapatan kelompok kaya lebih cepat dari pendapatan kelompok menengah dan miskin. Masih relatif banyak penduduk yang dikategori miskin, hal ini terindikasi dari data statistik sekitar 11,12 persen penduduk Kota Jambi tahun 2004 masih tergolong miskin.

#### **(3). Pengangguran**

Sejalan dengan proses pembangunan, masih relatif besar penduduk kota yang tidak bekerja atau menganggur. Pengangguran juga banyak disebabkan penduduk yang sedang mencari pekerjaan setelah menamatkan kuliah di Perguruan Tinggi. Selain itu juga terbatasnya peluang kerja. Pengangguran semakin banyak akibat banyak penduduk dipulangkan dari tenaga kerja oleh pemerintah Malaysia.

#### **(4). Tata Ruang**

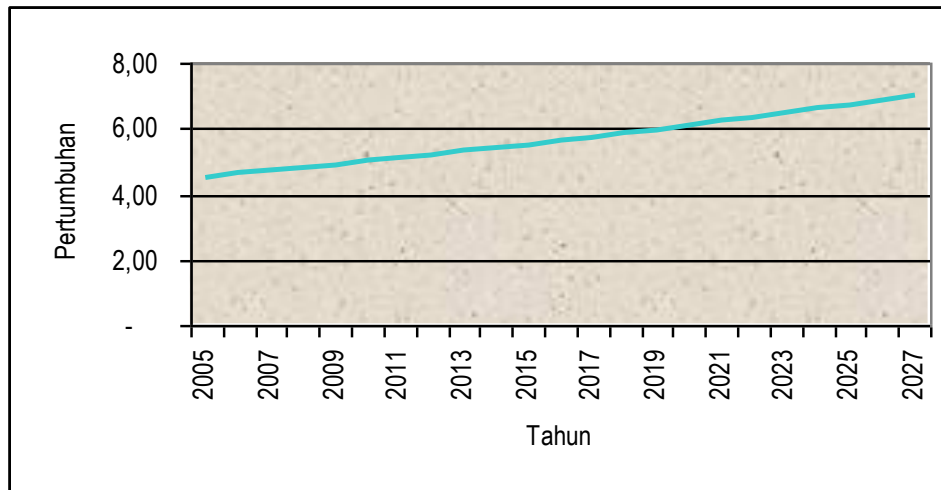
Pemerintah Kota harus mengefektifkan perencanaan Tata Kota, karena terlihat dari belum tertatanya pembangunan gedung-gedung dan perumahan dan perkantoran. Pembangunan rumah-toko dan pembangunan lainnya sering tidak mematuhi perkembangan permintaan masyarakat dan tidak minta izin.

#### **(5). Sumber Daya Manusia dan Pendidikan**

Masih lemahnya sumber daya manusia, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi kurang efektif dan efisien. Selain masih kecilnya jumlah SDM yang berkualitas, juga faktor tidak meratanya kualitas SDM sesuai dengan bidang ilmu. Dalam bidang pendidikan, belum berkembangnya pendidikan yang bermutu dan pendidikan tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### 2.3.2. Analisis Prediksi Ekonomi

Berdasarkan data tahun 1995-2005 dan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 2 % pertahun dapat diperkirakan PDRB Kota Jambi tahun 2025 menjadi 25 juta per tahun dan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7 %.



Gambar 2.4. Prediksi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 2005-2025

Agar tercapainya pertumbuhan ekonomi 7% tersebut harus di dukung dengan berbagai upaya perbaikan kondisi ekonomi dan penciptaan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perekonomian yang disertai dengan peningkatan aktivitas ekonomi seperti peningkatan investasi, ekspor dan pemanfaatan berbagai sumberdaya daerah secara optimal. Untuk itu diperlukan sejumlah kebijakan yang didasarkan pada potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka mempercepat proses pembangunan, maka harus dikembangkan dan digali seoptimal mungkin potensi sumber daya, memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan budaya lokal serta berwawasan lingkungan, berdaya tahan dan berdaya saing.

Dari kondisi sekarang bila dilihat dari aspek Capital Output Ratio (COR) maka untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7% diperlukan investasi yang relatif besar. Adapun prasyarat yang diperlukan untuk mendorong investasi adalah kondisi iklim berusaha yang kondusif yang dicerminkan oleh ketersediaan infrastruktur, sumberdaya manusia yang berkualitas, kondisi keamanan dan perangkat hukum. Disamping itu pengembangan investasi di daerah memerlukan perencanaan baik dari para investor yang mempunyai kepentingan langsung, tetapi juga dari pihak pemerintah sebagai mediator dan fasilitator untuk dapat mempersiapkan perencanaan yang baik dalam rangka mengubah potensi ekonomi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber- sumber ekonomi lainnya menjadi kekuatan ekonomi nyata.

### 2.3.3. Kondisi dan Prediksi Sektoral

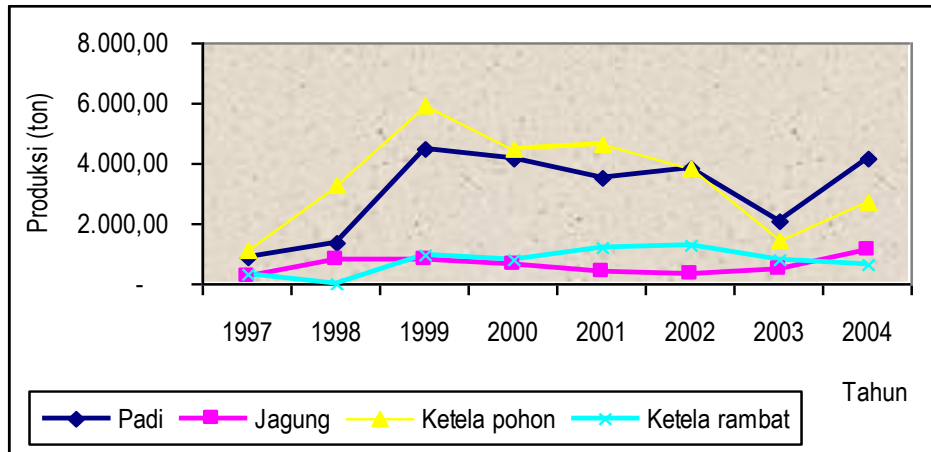
#### (1). Pertanian Tanaman Pangan

##### A. Kondisi Historis

Padi dan Jagung merupakan komoditas yang dominan diusahakan masyarakat kota Jambi. Pada tahun 1995, luas lahan tanaman padi seluas 681 hektar dengan tingkat produksi 850 ton. Untuk tahun 2004, luas panen mencapai 1.171 ha menghasilkan produksi sebanyak 4.182,1 ton. Dalam hal ini terlihat adanya peningkatan produktivitas 186%, yaitu dari 1,25 ton/ha menjadi 3,57 ton /ha. Untuk tanaman Jagung pada tahun 1995 luas panen 176 ha menghasilkan 272,6 ton, sedangkan pada tahun 2004 luas panen mencapai 295 dengan tingkat produksi sebesar 1.141,4 ton. Jadi ada peningkatan produktivitas sebesar 150%, yaitu dari 1,55 ton/ha menjadi 3,87 ton/ha. Produksi

pertanian lainnya Ketela pohon, Ketela rambat dan tanaman hortikultura juga terdapat di kota Jambi.

Produksi pertanian lainnya Ketela pohon, Ketela rambat dan tanaman hortikultura juga terdapat di kota Jambi. Perkembangan untuk komoditi tersebut seperti pada gambar berikut



Gambar 2.5. Produksi Pertanian di Kota Jambi tahun 1997-2004

Dalam implementasinya, beberapa permasalahan yang dihadapi selama periode 1995-2004 antara lain : (a), terjadi percepatan proses konversi lahan yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian kepada penggunaan lain; (b), semakin mengecilnya lahan sawah yang dimiliki kepala keluarga, secara sosial menjadikan para petani sulit keluar dari sektor tersebut. Untuk masuk ke sektor industri atau sektor formal lainnya mereka dihadapkan pada beberapa keterbatasan; (c) Pemanfaatan pinggir sungai Batanghari untuk tanaman jagung dan sayur-sayuran oleh masyarakat disinyalir akan dapat menyumbang pada tercemarnya air sungai Batanghari terutama bila dilakukan dengan sistem pemupukan yang tidak ramah lingkungan; (d), tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian pada kawasan potensial dan kelompok masyarakat yang telah memiliki kesesuaian budaya tani terutama pada kawasan pinggir kota; (e), Intensifikasi tanaman padi dan jenis lainnya yang tidak menimbulkan dampak negatif bahan kimia terhadap lingkungan; dan (f), potensi demand akan produk pertanian belum mampu ditutupi dengan *supply* dari petani yang ada di kota Jambi sehingga pasokan komoditas pertanian bersumber dari daerah sekitar kota terutama dari Kabupaten Muaro Jambi.

### B. Analisis Prediksi

Perkembangan penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pesat di kota Jambi, membutuhkan ketersediaan bahan pangan yang cukup bukan saja kuantitas tetapi kualitas. Ini menunjukkan bahwa peluang pasar peroduk pertanian tanaman pangan di Kota Jambi sangat besar. Kondisi sekarang menunjukkan masih terjadi kelebihan permintaan dibandingkan dengan penawaran, yang terlihat masih relatif besar produk makanan impor di kota Jambi. Hal ini memeberi indikasi masih besarnya potensi pasar.

Untuk 20 tahun kedepan, permintaan akan produk makanan semakin tinggi sementara daya dukung lahan dari kota Jambi yang digunakan untuk memproduksi bahan makanan makin terbatas. Kondisi ini tentunya masih akan terus berlangsung mengingat keterbatasan sumberdaya pangan yang dimiliki Kota Jambi. Selain itu faktor tingginya tekanan untuk alih fungsi lahan dari lahan produktif usaha pertanian kepada keperluan non pertanian.

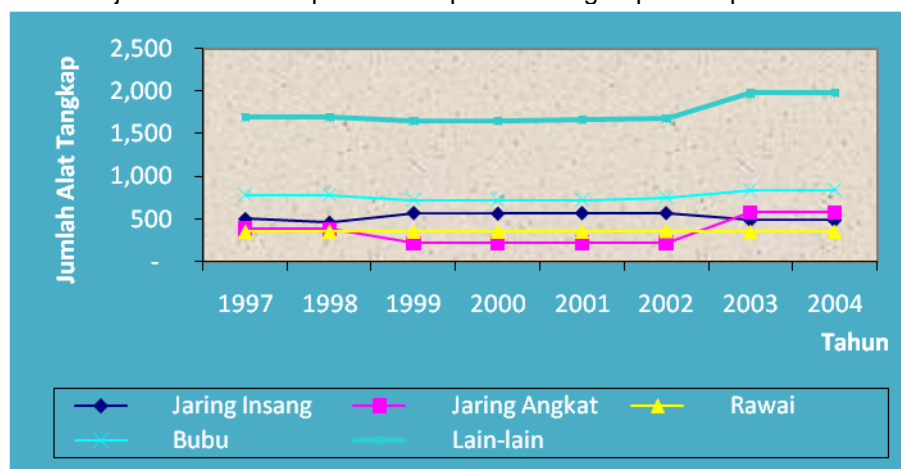
Hal yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada sekarang, dengan cara mengupayakan peningkatan produktivitas sektor pertanian dengan meningkatkan teknologi dan ketrampilan tenaga kerja, tetapi hukum hasil yang

semakin menurun tidak dapat dielakkan. Dilain sisi permintaan akan pproduk bahan makanan akan terus meningkat. Kemudian harus dialihkan konsumsi dari produk-produk impor kepada produk dalam negeri yang dihasilkan produsen di wilayah Jambi.

**(2), Perikanan**

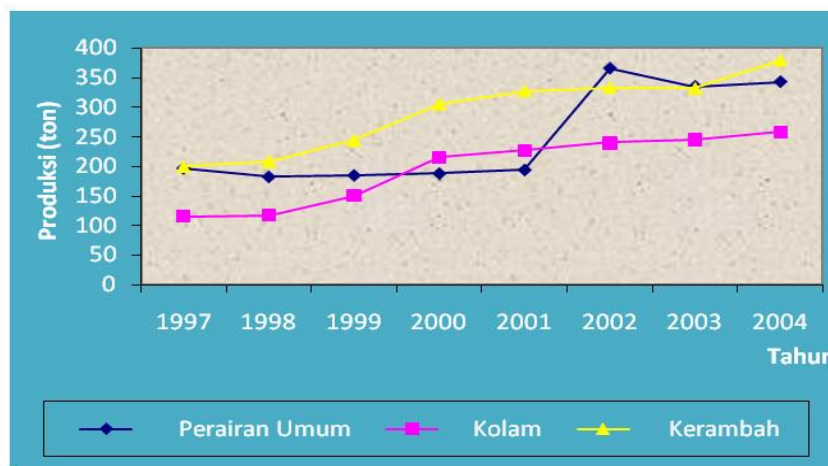
**A. Kondisi Historis**

Dari sisi produksi perikanan Kota Jambi mempunyai potensi yang terbatas. Perairan umum hanya terdapat sepanjang sungai Batanghari dan beberapa danau seperti Danau Teluk dan Danau Sipin. Sementara perikanan budidaya sentra produksi dari budidaya kerambah banyak terdapat pada Kecamatan Danau Teluk dan sebagian kecil di Kecamatan Telanaipura. Untuk perikanan kolam menyebar secara sporadis di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Jambi Selatan, Kecamatan Kenali dan kecamatan lainnya. Sajian berikut memperlihatkan perkembangan potensi perikanan Kota Jambi. Sajian berikut memperlihatkan perkembangan potensi perikanan Kota Jambi.



Gambar 2.6. Potensi Perikanan Kota Jambi

Selama periode 1995-2004, secara umum perkembangan sektor perikanan terus meningkat. Dilihat dari produksi perikanan perairan umum menunjukkan peningkatan dari 197,4 ton tahun 1995 menjadi 343,5 ton tahun 2004 dengan laju pertumbuhan sebesar 74%. Produksi Ikan kerambah menunjukkan peningkatan dari 200 ton tahun 1995 menjadi 379,2 ton tahun 2004. sedangkan untuk budidaya kolam meningkat dari 115,4 ton menjadi 258 ton tahun 2004. Jadi tingkat pertumbuhan produksi ikan kerambah dan kolam masing-masing 40% dan 124% .





Gambar 2.7. Produksi Perikanan Atas Dasar Sumber Produksi

Luas areal kolam relatif tetap, yakni 153 ha, sedangkan luas areal budidaya ikan di keramba semakin berkurang. Walau demikian, produksi ikan di kolam meningkat rata-rata sebesar 24,4 ton per tahun. Areal produksi keramba berkurang menjadi 4,223 unit pada tahun 2004 dibandingkan 3,212 ha pada tahun 2000. Walaupun luas areal keramba berkurang, akan tetapi produksi ikan mengalami peningkatan rata-rata 28, 2 ton per tahun dalam kurun 1995-2004.

Sebagaimana halnya dengan produksi pertanian lainnya pada sub sektor perikanan juga terdapat kelebihan permintaan, yang juga tercermin dari masih relatif besarnya ikan luar provinsi terutama daeri daerah di luar provinsi Jambi. Pasar Angso Duo sebagai pasar terbesar di Kota Jambi berfungsi sebagai supplier utama produk perikanan baik untuk perikaan air tawar maupun perikanan laut di kota Jambi. Kemudian suplier ikan lain juga terdapat pada pasar lainnya seperti pasar keluarga di Simpang Tiga Sipin.

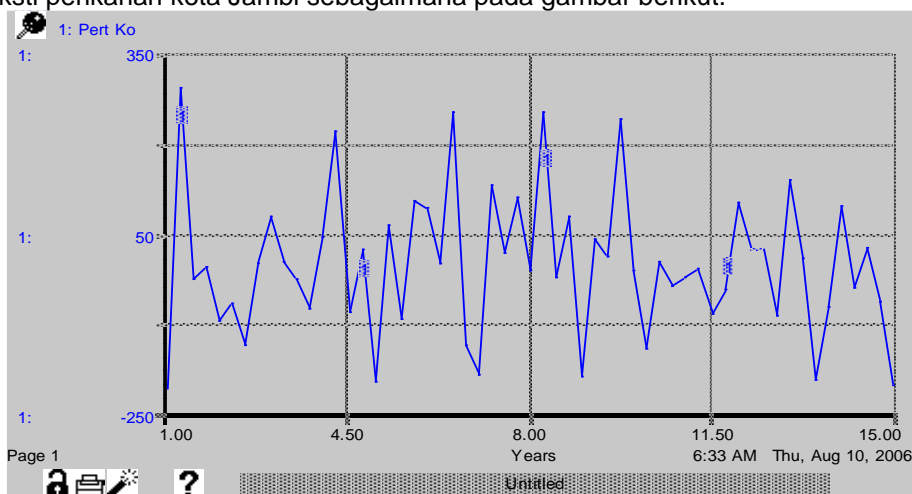
Ikan laut yang dijual berasal dari Sibolga, Batam, Bengkulu, Padang, Kampung Laut dan Kuala Tungkal. Sedangkan ikan air tawar sebagian besar berasal dari daerah sekitar Kota Jambi terutama dari Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemasok utama. Ikan laut yang masuk ke Kota Jambi 75% untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal Kota Jambi, sisanya dijual kembali ke berbagai daerah sekitar yang didistribusikan pedagang pengencer melalui pasar kalangan yang ada di Kabupaten yang berdekatan dengan Kota Jambi

Sub sektor perikanan menghadapi berbagai permasalahan diantaranya : (a) tata kelola air yang tidak seimbang; (b), keindahan pemandangan air danau yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk tujuan rekreasi alami akan berkurang atau bahkan hilang; (c) mempertahankan spesies jenis ikan khas Kota Jambi; dan (d) meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan perairan dalam kota Jambi.

Danau Sipin, Danau Teluk dan di tempat usaha budidaya ikan lainnya sistem pemberian pakan ikan tidak seimbang, sehingga menjadikan air sungai tidak mampu mengasimilasi secara alami. Keadaan ini dapat menyebabkan perairan tempat budi daya ikan tercemar menjadi berbau, berubah warna, bahkan jenis organisme tertentu tidak bisak berkembang dengan baik-padahal ini penting dalam tatanan siklus jaringan dan mata rantai makanan hayati.

## B. Analisis Prediksi

Dengan asumsi tingkat pertumbuhan produksi perikanan sebesar 2,0 % per tahun dan melihat fluktuasi pertumbuhan itu sendiri maka diprediksi pola pertumbuhan produkti perikanan kota Jambi sebagaimana pada gambar berikut.



Gambar 2..8. Pola pertumbuhan produksi perikanan

Dari *gambar 2.5* menunjukkan prediksi produksi perikanan kota Jambi. Sampai dengan akhir analisis pertumbuhan sektor perikanan nampak berfluktuasi, walaupun demikian ada kecenderungan dengan tingkat pertumbuhan yang tetap. Hal ini diduga karena sumberdaya perikanan yang sulit untuk dikembangkan karena adanya batasan sumberdaya lahan.

Lahan yang tersedia lebih menguntungkan untuk alternatif usaha lainnya daripada pengembangan sektor perikanan. Selain itu perkembangan penduduk mengakibatkan banyak lahan yang digunakan untuk perumahan. *Opportunity cost* ini merupakan pertimbangan dalam pemanfaatan lahan. Kebutuhan akan hasil perikanan pada masa yang akan datang masih akan dipasok dari luar daerah provinsi Jambi

### **(3). Perdagangan dan Industri**

#### **A. Kondisi Historis**

Aspek perencanaan yang menarik dilihat adalah perencanaan dalam bidang pengembangan industri dan perdagangan. Hal ini didasari antara lain kota Jambi telah berfungsi sebagai pusat perdagangan dan juga relatif besarnya potensi dalam bidang industri. Sesuai dengan substansi RPJP, kajian difokuskan kepada arah pembangunan dalam kedua bidang tersebut dan strategi mewujudkannya.

Industri besar di kota Jambi telah berkembang pesat selama periode 1995-2004, yang pada umumnya terletak di pinggiran Sungai Batang Hari. Perkembangan industri tersebut dapat dilihat dari tingkat produksi dan kesempatan kerja. Untuk pembangunan jangka panjang diperkirakan pengembangan industri besar/ sedang seperti karet dan kayu olahan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar seperti kesehatan dan banjir. Industri ini terutama industri yang berada di pinggiran Sungai Batanghari.

Dalam hubungan dengan industri kayu olahan telah memberi kontribusi terbesar, namun perkembangannya makin terkendala dengan bahan baku dan dalam pembangunan jangka panjang persoalan bahan baku akan menjadi kendala yang sangat besar. Hal yang sama juga terlihat pesatnya perkembangan industri kecil. Dalam pembangunan jangka panjang kedepan akan berkembang industri-industri kecil yang tidak mengindahkan perencanaan tata ruang.

Dalam pengamatan selama periode 1995-2004, beberapa permasalahan yang menonjol adalah :

1. Semakin berkurangnya bahan baku, karena banyak illegal logging dan meningkatnya pemanfaatan kayu mentah, sementara peremajaan kayu tidak terencana secara terintegrasi dan sistimatis.
2. Melemahnya daya saing produk-produk industri baik di pasar domestik maupun internasional, yang diakibatkan oleh lambatnya perkembangan teknologi.

Dalam periode 1995-2004, terlihat perkembangan pesat perdagangan kota Jambi meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari dari berkembangnya ekspor-impor dan perdagangan antar kota Jambi dengan daerah lainnya serta kota Provinsi di luar Jambi. Pertumbuhan yang pesat tersebut erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi kota Jambi yang berimbas kepada meningkatnya permintaan akan produk-produk baik untuk konsumsi maupun investasi. Namun yang agak mengkuatirkan peningkatan produk konsumsi relatif lebih tinggi dari pada produk investasi.

Dalam kaitan dengan produk perdagangan, belum banyak terjadi difrensiasi dan ekspansi pasar. Masih terfokus produk-produk lama dan juga pasar ekspor masih didominasi negara importir antara lain Amerika Serikat. Demikian juga diduga masih relatif lemah daya daya saing di pasar. Dengan semakin banyaknya produk-produk impor baik yang datang dari luar negeri maupun luar daerah Jambi akan semakin mengancam pemasaran produk Jambi.

Permasalahan yang menonjol dalam hubungan dengan perdagangan di kota Jambi adalah : (a), pusat perdagangan pada pasar Jambi sudah tidak memperhatikan

estetika; dan (b), meningkatnya kemacetan. Kedua persoalan tersebut sangat erat kaitannya bergabungnya antara perumahan dengan toko dan sudah sempitnya ruas jalan serta tidak tertatanya areal parkir

## **B. Analisis Prediksi**

Pada sektor industri dan perdagangan Kota Jambi mempunyai beberapa kekuatan yang bertumpu kepada geografis dan potensi permintaan. Secara spesifik dijelaskan sebagai berikut : (a), mempunyai potensi yang relatif besar dalam permintaan produk-produk industri dan perdagangan; (b), posisi strategis kota Jambi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, industri dan perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi; (c), tersedianya kelembagaan yang mendukung kegiatan industri dan perdagangan.

Perkembangan pusat-pusat perdagangan dan rumah-rumah toko berkembang pesat. Hal ini akan terus berlanjut pada pembangunan Jangka panjang 20 tahun kedepan. Namun perkembangan pusat perdagangan akan berdampak negatif kepada lingkungan hidup, dan mematikan pengembangan pusat perdagangan tradisional. Kemudian makin memfungsikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan sektor riil dan jasa. Semakin semrawutnya kota Jambi sebagai akibat makin berkembangnya pusat perdagangan seperti pasar, bila tidak diantisipasi.

Beberapa tantangan yang dihadapi kota Jambi sehubungan dengan pengembangan produk-produk industri dan perdagangan adalah :

1. Pusat pemerintahan, ekonomi dan sosial. Berdasarkan kedudukan dan peranannya dalam konteks wilayah yang lebih luas, maka fungsi Kota Jambi telah berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan, pusat pelayanan Ssosial, pusat budaya, simpul jasa Transportasi Wilayah dan Antar Wilayah dan Pusat Permukiman terhadap perkembangan wilayah di Provinsi Jambi. Bersamaan dengan perkembangan demikian, terdapat kecenderungan secara global terdapat keterkaitan antar wilayah bukan saja dalam satu negara, tetapi juga antar kota dan kabupaten pada negara lain.
2. Kota Jambi memiliki posisi yang strategis terhadap keberadaan provinsi dan kabupaten tetangga (*hinterland*), yaitu : Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Dalam posisinya sebagai pusat pemerintahan, Kota Jambi harus menyediakan berbagai inprastruktur yang representatif, dan memfasilitasi kebutuhan swasta maupun pemerintah untuk terlibat langsung dalam aktivitas industri dan perdagangan. Swasta harus turut serta memberikan pelayanan, termasuk didalamnya sektor perhubungan dan telekomunikasi, perhotelan, dan pendidikan. Kemajuan-kemajuan ini akan menciptakan permintaan baik untuk barang maupun jasa.
3. Perkembangan Ekonomi. Perkembangan PDRB kota Jambi, membuka bidang-bidang bisnis yang secara fisik membutuhkan ruang dan tempat. Pendirian bangunan bertingkat yang *multi purpose*, selain digunakan sebagai tempat tinggal, juga digunakan untuk tempat berbisnis.
4. Penataan lokasi pasar. Lokasi tempat perbelanjaan pada pasar tradisional dan jalur oplet berupa angkutan kota adalah dua hal yang menjadi pelengkap dan menciptakan kemacetan. Rasio penduduk yang tidak terlalu padat tidak selayaknya menciptakan kemacetan di Kota Jambi. Artinya penataan terhadap lokasi pasar Angso Duo, dan Terminal oplet adalah dua hal yang secara simultan akan dilakukan untuk memberikan kenyamanan dalam berbelanja.

Aspek lainnya adalah memprediksi kesempatan pengembangan industri. Setidaknya ada peluang yang sangat besar yaitu masih besarnya potensi pengembangan industri di kota Jambi sebagai sumber pendapatan daerah. Potensi tersebut baik pada industri besar, menengah dan kecil. Disamping itu potensi yang besar juga terdapat pada sektor perdagangan dan jasa. Potensi permintaan tercermin dari berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko-toko untuk perdagangan.

#### **(4). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

##### **A. Kondisi Historis**

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi kota Jambi. Dalam menganalisis kondisi suatu usaha dapat digunakan *Social Accounting Matrix* atau SAM. Analisis yang umum dilakukan dalam kerangka SAM adalah analisis multiplier (angka pengganda). Pada intinya, analisis multiplier ini mencoba melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen tertentu apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap neraca eksogen. Ada enam jenis multiplier yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini, yaitu *production multiplier (total output multiplier)*, *labor income multiplier (LIM)*, *capital income multiplier (CIM)*, *induced household income multiplier (HIIM)*, *government income multiplier (GIM)*, dan *linkage other sector income multiplier (OSIM)*. Namun, sebelum keenam multiplier tersebut diulas, terlebih dahulu akan disampaikan secara rinci faktor-faktor pembentuknya, khususnya untuk sektor industri dan koperasi sebagaimana yang dijabarkan berikut ini.

Perhitungan dampak pembangunan koperasi dan sektor Industri terhadap nilai tambah di Kota Jambi terlihat jelas peranan sektor industri kecil terhadap penciptaan nilai tambah di Kota Jambi, secara umum tampak lebih tinggi dibandingkan industri sedang/besar. Seluruh industri kecil kelihatan sangat unggul menciptakan nilai tambah Kota Jambi karena semuanya memiliki angka multiplier yang lebih besar dari satu. Industri kecil yang paling tinggi memberi efek multiplier terhadap nilai tambah Kota Jambi adalah industri makanan, minuman dan tembakau (IMTK) yang mempunyai multiplier 2.7896.

Besarnya dampak multiplier tersebut memberi petunjuk bahwa dalam kondisi *ceteris paribus* jika output dari IMTK naik sebesar 1 milyar rupiah maka diperkirakan nilai tambah dari kota Jambi akan meningkat sebanyak 2,7896 milyar rupiah, Kontribusi nilai tambah yang terbesar berasal dari faktor produksi modal sebanyak 1,4770 milyar rupiah sedangkan sisanya dari tenaga kerja sebesar 1,3127 milyar rupiah. Dengan demikian peranan modal dalam menciptakan nilai tambah di sektor IPKK jauh lebih menonjol dibandingkan tenaga kerja. Fenomena seperti ini bukan hanya terlihat di industri kecil penggergajian, kayu olahan, kayu lapis dan kerajinan (IPKK) saja, namun diseluruh industri kondisinya tampak demikian.

Ada lima industri kecil yang dianggap paling banyak memberi keuntungan terhadap penerimaan tenaga kerja di Provinsi Jambi, karena multiplier tenaganya lebih besar dari satu. Kelima industri yang dimaksud adalah IMTK (1.3127), ITBK (1.0631), IPKK (1.1377), IKPK (1.0936), dan ISBK (1.0767). Melalui serangkaian angka multiplier tersebut dapat kita artikan bahwa dengan adanya penambahan output 1 milyar rupiah di industri kecil, IMTK misalnya, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan tenaga kerja di Kota Jambi sebanyak 1.3127 milyar rupiah. Seandainya upah minimum regional di sektor industri kecil rata-rata Rp. 250.000 per bulan maka kenaikan 1 milyar di IMTK tersebut diperkirakan mampu menciptakan tenaga kerja kurang lebih sebanyak 5.000 orang. Angka ini memang kelihatan kasar karena hanya membandingkan antara total pendapatan tenaga kerja dengan rata-rata pendapatan per tenaga kerja, namun sebagai proxy untuk menggambarkan peranan sektor IMTK, dan sektor-sektor industri kecil lainnya dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi masih terbilang relevan.

Peranan sektor-sektor industri kecil yang berbasis pertanian dalam menciptakan nilai tambah di Kota Jambi, sepertinya lebih didominasi oleh industri kecil yang berbasis tanaman pangan dan hutan, yakni IMTK dan IPKK. Bertolak belakang dengan industri sedang/besar, pada kelompok ini industri berbasis pertanian yang paling menonjol menciptakan nilai tambah adalah IPKSB (industri sedang/besar penggergajian, kayu olahan, kayu lapis dan kerajinan) dengan multipliernya sebesar 2.3724 yang mempunyai arti jika terjadi kenaikan output IPKSB sebesar 1 milyar rupiah maka nilai tambah Kota Jambi akan meningkat 2.3724 milyar rupiah.

Dalam kelompok neraca institusi, peranan dari koperasi terhadap perekonomian regional, terutama untuk meningkatkan nilai tambah tergolong sangat rendah, karena

mempunyai nilai multiplier jauh di bawah industri kecil dan industri sedang/besar. Meskipun demikian kemampuannya untuk menaikkan nilai tambah Kota Jambi bisa 2 kali lipat dari besarnya perubahan pada dirinya sendiri. Hal ini ditandai dengan nilai multipliernya yang melebihi angka 1 yaitu 1,5722, dengan kata lain untuk setiap kenaikan output sebanyak 1 milyar rupiah di sektor koperasi diperkirakan mampu memberi dampak kenaikan nilai tambah Kota Jambi sebanyak 1.5722 milyar rupiah. Kontribusinya yang paling besar berasal dari penambahan modal sebanyak 0.8306 milyar rupiah, dan sisanya dari penerimaan tenaga kerja sebanyak 0.7416 milyar rupiah.

Menyimak berbagai angka multiplier nilai tambah di atas, dapatlah disampaikan beberapa temuan penting yang terkait dengan peranan dari industri kecil dan koperasi dalam perekonomian Kota Jambi yakni:

1. Secara keseluruhan peranan dari industri kecil terhadap penciptaan nilai tambah regional tergolong sangat tinggi bila dibandingkan dengan industri sedang/besar. Dimana peranannya tersebut lebih dominan terlihat dari kenaikan penerimaan modal.
2. Sektor industri kecil yang paling tinggi menciptakan nilai tambah regional adalah IMTK, IPKK, ISBK, IKPK, dan ITBK.
3. Untuk sektor-sektor industri yang berbasis pertanian, peranan dari IMTK dan IPKK jauh lebih menonjol dibandingkan sektor-sektor industri kecil lainnya didalam menciptakan nilai tambah regional.
4. Peranan koperasi dalam menciptakan nilai tambah regional dapat dikatakan cukup baik, ini terbukti karena kontribusinya terhadap kenaikan nilai tambah bisa mencapai lebih dari 100% dari setiap awal injeksi dana segar.

Ada indikasi hasil kenaikan output di sektor industri itu lebih banyak dipancarkan ke rumahtangga yang memiliki pendapatan tinggi. Analisis dampak pembangunan koperasi dan industri terhadap penerimaan rumahtangga di kota jambi memperlihatkan bahwa rumahtangga yang paling besar mengalami pertambahan pendapatan ketika terjadi kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah di sektor industri adalah rumah tangga yang berpendapatan tinggi, baik itu di desa maupun di kota. Sebagai contoh, setiap terjadi kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah di sektor industri kecil diperkirakan rumahtangga yang berpendapatan tinggi akan menerima tambahan pendapatan sebesar 1.0906 milyar rupiah.

Bukan hanya itu saja, kontribusi dari peningkatan output industri, baik yang berskala kecil maupun besar, ternyata lebih banyak diserap oleh rumahtangga yang berada di perkotaan ketimbang di perdesaan. Rumahtangga yang tinggal di perdesaan hanya bisa merasakan kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 0,9377 milyar rupiah sewaktu output industri naik 1 milyar rupiah, sementara pendapatan rumahtangga di perkotaan naik hingga mencapai 1,2017 milyar rupiah.

Semua hal yang diulas di atas sudah merupakan fenomena yang umum terlihat pada suatu perekonomian, dimana pembangunan sektor industri itu akan lebih banyak menguntungkan para pemilik modal yang biasanya berpendapatan tinggi. Selain itu karena lokasi industri umumnya terletak di perkotaan, sudah tentu rumahtangga yang tinggal di perkotaan yang paling tinggi menikmati hasil kenaikan output industri dibandingkan rumahtangga di perdesaan.

Ironisnya, beberapa industri-industri kecil yang berbasis pertanian yang seharusnya dapat menopang pendapatan rumah tangga yang tergolong rendah ternyata kurang banyak berperan terhadap mereka. Sebagai contoh untuk IMTK. Multiplier *induced household income* sektor tersebut hanya sebesar 0,1999 untuk rumahtangga berpendapatan rendah di perdesaan, dan 0,2661 yang tinggal di perkotaan. Kedua multiplier ini mengindikasikan bila terjadi kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah pada sektor IPKK, maka pendapatan rumahtangga di perkotaan yang tergolong rendah akan meningkat sebesar 0,1999 milyar rupiah atau 1.999,9 juta rupiah. Sedangkan rumahtangga yang di perdesaan untuk golongan pendapatan yang sama hanya meningkat 0,2661 milyar rupiah atau 266,1 juta rupiah.

Terlepas dari berbagai kondisi faktual di atas, secara keseluruhan peranan industri kecil terhadap kenaikan pendapatan rumahtangga terlihat lebih tinggi dibandingkan industri besar. Multiplier dari industri kecil terhadap pendapatan rumahtangga rata-rata sebesar 2,2753 yang menandakan jika terjadi kenaikan output industri kecil sebesar 1 milyar rupiah maka pendapatan rumahtangga di Kota Jambi rata-rata akan meningkat 2,2753 milyar rupiah, yang sudah tentu lebih banyak diserap oleh rumahtangga yang berpendapatan tinggi dan tinggal di perkotaan. Dengan karakteristik industri kecil semacam ini, sulit sekali diharapkan peranan industri kecil untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Jambi. Untuk itu memang perlu diadakan pembenahan yang fundamental pada sektor industri kecil di Kota Jambi saat ini agar lebih menyentuh ke golongan masyarakat kecil.

Tidak beda jauh dengan industri kecil, peranan koperasi dalam meningkatkan pendapatan rumahtangga ternyata juga lebih banyak diserap oleh rumahtangga yang berpendapatan tinggi dan tinggal di perkotaan. Multipliernya mencapai 0,4948 yang mengandung makna bila output koperasi naik sebesar 1 milyar rupiah maka pendapatan rumahtangga yang tergolong tinggi akan meningkat sebanyak 0.4948 milyar rupiah. Fenomena semacam ini memberi petunjuk bahwa eksistensi koperasi di Kota Jambi lebih terkonsentrasi pada koperasi-koperasi kota yang umumnya memiliki segmen pada bidang perdagangan maupun simpan pinjam. Adapun koperasi-koperasi unit desa diperkirakan kurang banyak berperan terhadap pendapatan rumahtangga yang tergolong rendah, terutama yang tinggal di perdesaan, oleh karena besaran multiplier *induced household income* dari koperasi ternyata lebih mencerminkan keuntungan bagi penduduk yang berpendapatan tinggi yang banyak tinggal di perkotaan.

Adapun dampak pembangunan koperasi dan industri terhadap penerimaan institusi di Kota Jambi dilihat dari angka pengganda SAM juga dapat ditelusuri seberapa besar peranan industri terhadap penerimaan institusi-institusi lainnya yang meliputi koperasi, swasta dan pemerintah. Andil sektor industri terhadap penerimaan institusi lainnya lebih banyak mengarah kepada penerimaan pemerintah. Rata-rata multiplier *government income* dari sektor industri bisa mencapai 0.2822 yang dapat diartikan bila terjadi kenaikan output di sektor industri sebesar 1 milyar rupiah maka penerimaan pemerintah akan bertambah sebesar 0.2822 milyar rupiah.

Jika ditelusuri lebih jauh, kontribusi sektor industri terhadap penerimaan pemerintah ternyata lebih banyak berasal dari industri kecil. Secara rata-rata jika dihitung multiplier diperoleh angka sebesar 0.2963 untuk industri kecil dan 0.2681 untuk industri sedang/besar. Angka multiplier 0.2963 memberi petunjuk jika terjadi kenaikan output industri kecil sebesar 1 milyar rupiah maka diperkirakan penerimaan pemerintah akan naik sebanyak 0.2963 milyar rupiah. Industri kecil yang paling banyak yang memberi andil terhadap penerimaan pemerintah berturut-turut adalah IMTK (0.3823), IPKK (0.3368), IKPK (0.3199), dan ITBK (0.3055)

Memperhatikan kondisi obyektif di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi industri kecil sebagai objek pajak bagi pemerintah daerah lebih menonjol bila dibandingkan industri sedang/besar. Untuk itu setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menaikkan aktifitas industri kecil cenderung akan lebih menguntungkan penerimaan daerah Kota Jambi, dari pada mendorong industri besar.

Adapun keterkaitan antara sektor industri dan koperasi terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Bila kita perhatikan besaran multiplier *other linkage sector income* dari masing-masing sektor, ada kecenderungan semua sektor industri di Kota Jambi lebih banyak berperan terhadap kenaikan penerimaan sektor perdagangan (PRDG) dan sektor angkutan (AJPA), masing-masing dengan multiplier sebesar 0.4659 dan 0.2240. Sementara untuk sektor pertanian, peranannya paling banyak terlihat untuk kenaikan penerimaan pertanian dan bahan makanan lainnya (PBML), dan sektor perkebunan (PERK). Adapun koperasi cenderung hanya menguntungkan penerimaan sektor perdagangan saja. Penerimaan sektor PRDG diperkirakan akan meningkat rata-rata sebesar 0,4799 milyar rupiah ketika terjadi kenaikan output di sektor industri kecil

sebesar 1 milyar rupiah, sedangkan penerimaan di sektor AJPA akan naik sebanyak 0,2120 milyar rupiah.

Bukan hanya pada kedua sektor jasa di atas saja, untuk sektor-sektor yang lain, terutama sektor pertanian, ada kecenderungan juga *backward linkage effect* dari sektor industri kecil selalu lebih tinggi dibandingkan sektor industri sedang/besar. Dengan kondisi seperti ini dapat digeneralisasikan bahwa keterkaitan antara sektor industri kecil dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Kota Jambi terlihat lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan sektor industri sedang/besar. Berdasarkan temuan ini, maka setiap upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong industri kecil diharapkan lebih efektif untuk menaikkan output dari sektor-sektor lainnya, sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipacu lebih tinggi lagi. Adapun sektor industri kecil yang diperkirakan mampu dijadikan sebagai *leading sector* bagi perekonomian wilayah Kota Jambi adalah IMTK (industri kecil makanan, minuman dan tembakau), IPKK (industri kecil penggergajian, kayu olahan, kayu lapis dan kerajinan), dan ISBK (industri kecil semen dan bahan galian bukan logam). Ketiganya mempunyai multiplier paling besar diantara semua industri kecil, masing-masing sebesar 1.4217 untuk IMTK, 1.5619 untuk IPKK, dan 1.5963 untuk ISBK.

Seperti dugaan sebelumnya, kontribusi dari koperasi terhadap penerimaan sektor-sektor ekonomi lainnya memang terbukti lebih tinggi dirasakan oleh sektor perdagangan saja. Angka multiplier koperasi untuk sektor lain terlihat paling tinggi pada sektor perdagangan yakni sebesar 0.4572, yang dapat diartikan bila output koperasi dinaikan sebesar 1 milyar rupiah maka penerimaan sektor perdagangan akan meningkat sebanyak 0.4572 milyar rupiah. Sementara untuk sektor pertanian, peranan koperasi tersebut lebih menonjol terhadap sektor PBML karena multipliernya paling besar dalam kelompok sektor ini. Multiplier pendapatan dari sektor koperasi terhadap sektor PBML adalah sebesar 0.0708, yang menandakan jika output koperasi naik sebanyak 1 milyar rupiah maka penerimaan di sektor pertanian akan meningkat sebanyak 0.4572 milyar rupiah.

Dengan demikian pembangunan koperasi akan memberi dampak positif paling besar terhadap kenaikan produksi di sektor PBML. Namun demikian hal ini perlu dilakukan dengan cermat dan seksama mengingat koperasi itu ternyata jauh lebih menguntungkan pendapatan rumahtangga yang ada di perkotaan. Jangan sampai upaya membangun koperasi yang lebih besar malah menimbulkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar antara rumahtangga, karena terjadinya *transfer payment* yang sangat tinggi dari desa ke kota, dan dari pendapatan rendah ke pendapatan tinggi.

Angka multiplier dari sektor industri dan koperasi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur seberapa besar peranan dari suatu sektor dalam perekonomian wilayah Jambi. Jika diperhatikan dari besaran *gross output multiplier* tampaknya sektor IMTK mempunyai kontribusi paling besar dalam perekonomian wilayah Jambi, karena mempunyai multiplier paling tinggi yakni 11.5120 yang dapat kita artikan jika output IMTK naik sebanyak 1 milyar rupiah maka diperkirakan output perekonomian akan meningkat sebesar 11.5120 milyar rupiah, dimana peningkatan tersebut lebih banyak diakibatkan karena ada peningkatan dari penerimaan sektor-sektor lain sebanyak 4.1896 milyar rupiah (OSIM = 4.1896). Setelah sektor IMTK, industri kecil lainnya yang juga menonjol perannya dalam perekonomian wilayah adalah IPKK, ITBK, ISBK dan IKPK.

Adapun peranan koperasi terhadap perekonomian wilayah bila dilihat dari *gross output multiplier* dapat digolongkan tinggi, karena mampu mendorong output perekonomian Kota Jambi sebesar 7.0497 milyar rupiah ketika outputnya naik sebanyak 1 milyar rupiah.

## B. Analisis Prediksi

Dalam melakukan prediksi kondisi ke depan sampai tahun 2025 sangat perlu dianalisis tentang dampak pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah terhadap perekonomian kota Jambi. Adapun variabel makro yang ditempatkan sebagai variabel akibat dalam analisis simulasi ini adalah tenaga kerja, rumahtangga pendapatan rendah,

penerimaan koperasi, penerimaan pemerintah, output pertanian bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perekonomian wilayah secara umum.

Secara keseluruhan, dapat diperkirakan industri kecil tampak memberi hasil pembangunan yang lebih baik dibandingkan industri sedang/besar. Dalam memperbaiki pendapatan rumahtangga misalkan, upaya pemerintah daerah Kota Jambi untuk meningkatkan investasi industri kecil secara proporsional diperkirakan dapat menaikkan penerimaan rumahtangga yang berpendapatan rendah secara signifikan. Sedangkan industri besar hanya bisa mengangkat penerimaan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sangat kecil dampaknya terhadap ekonomi golongan rumahtangga yang sama. Ini merupakan petunjuk bahwa pembangunan industri kecil diperkirakan mampu memperbaiki distribusi pendapatan antarrumahtangga. Sementara koperasi tidak terlalu menonjol perkembangannya karena terlalu berpihak kepada kesejahteraan anggota, tetapi kecil keberpihakan kepada membesar keuntungan.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan tenaga kerja dan pendapatan pemerintah juga terlihat lebih efektif jika dijalankan dengan membangun industri kecil. Suatu studi menunjukkan hasil kenaikan investasi industri kecil sebanyak 1 milyar rupiah mampu meningkatkan penerimaan tenaga kerja dan pemerintah masing-masing sebanyak 0.28 % dan 0.24 % dari nilai dasar. Sementara kenaikan investasi industri besar untuk jumlah yang sama hanya dapat menambah penerimaan tenaga kerja dan pemerintah masing-masing 0.26 % dan 0.24 %.

Dalam hal mewujudkan pengembangan agribisnis di kota Jambi, maka pilihan yang tepat adalah dengan membangun industri kecil. Karena dampak yang diberikannya relatif lebih tinggi dibandingkan industri besar. Rata-rata kenaikan output pertanian (pertanian bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) kurang lebih 0.26% dari jumlah sebelumnya (nilai dasar) ketika investasi industri kecil disimulasikan naik sebesar 1 milyar rupiah. Sedangkan dampak kenaikan investasi industri besar dalam jumlah yang sama hanya menaikkan output pertanian rata-rata sebanyak 0.23 %.

Secara agregat pembangunan industri kecil sepertinya dapat diandalkan sebagai roda penggerak perekonomian wilayah Kota Jambi. Berbeda dengan industri sedang/besar, dampak yang diberikan lebih banyak mengangkat pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan demikian segala kebijakan fiskal daerah seyogyanya ditujukan kepada upaya untuk mendorong dan merangsang kenaikan investasi di industri kecil. Sehingga tujuan dari pembangunan daerah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi bisa direalisasikan dengan lebih efektif.

#### **2.3.4. Kemiskinan**

Dari literatur, istilah kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif dimana masing-masing kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Kemiskinan relatif hanya melihat individu yang dibandingkan dengan individu lain dalam kelompok tersebut yang mana sangat tergantung pada kondisi kelompoknya. Dikatakan miskin secara absolut apabila penghasilan sehari-hari mereka dibawah kebutuhan fisik minimum. Untuk melihat kemiskinan absolut biasanya digunakan indicator pembangunan yang telah memiliki berbagai variabel dalam menilai obyek yang diteliti.

Dilihat dari penyebab kemiskinan, setidaknya ada dua aliran besar faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu *pertama* aliran modernisasi yang menganggap persoalan kemiskinan disebabkan factor internal masyarakat. Menurut aliran ini kemiskinan terjadi sebagai akibat faktor budaya, keterbatasan modal dan teknologi, keterbatasan manajemen, serta kondisi sumber daya alam. *Kedua* aliran struktural yang menganggap factor eksternal sebagai penyebab kemiskinan. Faktor eksternal tersebut yang menghambat proses mobilitas vertikal mereka. Faktor eksternal tersebut berjenjang pada tingkat mikro desa maupun makro structural.. Dalam hal kemiskinan structural juga dapat



terjadi sebagai korban pembangunan dan karena golongan tertentu tidak memiliki akses terhadap kegiatan ekonomi produktif akibat pola institusional yang diberlakukan.

#### A. Kondisi Historis

Jumlah penduduk miskin di Kota Jambi pada tahun 1995 berjumlah 13.046 KK meningkat menjadi 14.562 KK di tahun 2001 dan terus meningkat menjadi 15.382 KK dan 15.386 KK pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 terjadi penurunan sebesar 8 % sehingga penduduk miskin menjadi 14.120 KK. Keberhasilan ini tentunya merupakan capaian akibat makin kondusifnya perekonomian sehingga gairah berusaha juga meningkat yang menciptakan kesempatan kerja.

Data jumlah kelompok pra sejahtera dan sejahtera 1 tahun 2004 berjumlah 26.665 Orang. Adapun distribusinya untuk setiap kecamatan yaitu pada Kecamatan Telanaipura berjumlah 5.690 orang atau 21%, Kecamatan Jambi selatan dan Kota Baru sebanyak 20 %, Kecamatan Jelutung dan Jambi Timur masing-masing 14 % dan 11 %. Sedangkan Kecamatan Pasar Jambi, danau Teluk, Pelayangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 masing-masing 4 % dan 5%. Alasan yang dominan sebagai mereka yang tergolong pada dua kelompok tersebut adalah alasan ekonomi.

Dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Kota Jambi tentunya perlu dilihat dari akar permasalahan penyebab kemiskinan itu sendiri, mana yang lebih dominan kemiskinan struktural atau kemiskinan kultural. Perlu diketahui kantong-kantong kemiskinan perkotaan di Kota Jambi, dengan demikian upaya penanggulangan kemiskinan menjadi lebih terarah.

#### B. Analisis Prediksi

Pada pembangunan Jangka Panjang kota Jambi, kemiskinan masih tetap menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Pertambahan jumlah penduduk, perpindahan penduduk dari desa ke kota dan perpindahan penduduk antar kota terus meningkat. Sementara peningkatan pendapatan kota Jambi tidak paralel dengan pertumbuhan penduduk.

Kalau di asumsikan pertumbuhan penduduk miskin sama dengan pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun, maka pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk miskin sekitar 4% dari jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk sebagai dampak arus imigrasi atau perpindahan antar kota serta dampak dari faktor eksternal menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Penduduk miskin tersebut sangat erat kaitannya dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan dan motivasi kerja.

### 2.3.5. Ketimpangan Pendapatan

#### A. Kondisi Historis

Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menurunkan ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok masyarakat miskin atau meningkatkan distribusi pendapatan. Kota Jambi selama periode 1995-2004 dihadapkan dengan persoalan tersebut diatas.

Dalam kenyataan selama pengamatan terlihat indikasi masih relatif besarnya ketimpangan pendapatan. Hal ini tercermin dari : (a), relatif besarnya peningkatan nilai tambah sektor-sektor industri besar dan menengah dalam PDRB kota Jambi; (b), berkembang pesatnya pusat-pusat pertokoan dan rumah ruko; dan (c), berkembangnya perumahan-perumahan elit. Semua ini tercermin dalam satu indeks yang disebut indeks Gini yang tidak banyak berubah selama periode tersebut.

#### B. Analisis Prediksi

Diperkirakan pada 20 tahun kedepan, ketimpangan pendapatan akan semakin besar, sebagai akibat ketimpangan dalam pemilikan asset dan ketimpangan dalam

penggajian. Aset yang berupa tanah dan aset lainnya banyak dimiliki oleh kelompok kaya yang berdampak kepada returnnya relatif besar yang pada akhirnya memperlebar ketimpangan pendapatan.

Selain ketimpangan aset, juga pola penggajian yang sangat esar variannya, pada kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi dan mempunyai jabatan mempunyai banyak fasilitas yang merupakan sumber pendapatan. Diperkirakan persoalan korupsi masih mewarnai penyebab membesarnya ketimpangan pendapatan baik antar daerah maupun antar kelompok masyarakat. Hal yang sama juga tercermin dari perbedaan budaya dalam bekerja, ada yang mempunyai motivasi tinggi dan ada juga yang sekedar menerima.

### **2.3.6. Keuangan Daerah**

#### **A. Kondisi Historis**

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan, tata cara perencanaan tersebut bertujuan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka periode waktu tertentu yang telah ditetapkan yaitu tahunan, menengah maupun jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang, yang biasanya disebut dengan RPJP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RPJP memuat antara lain visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada pada tingkatan wilayah yang lebih tinggi.

Salah satu prinsip yang harus melandasi dalam penyusunan RPJP adalah prinsip kemandirian. Melalui sistim perencanaan yang dikembangkan maka prinsip tersebut akan bermuara pada penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dalam konteks inilah keberartian dalam mengoptimalisasian keuangan daerah menjadi sangat urgen.

Dalam pola pikir yang sama, penyusunan RPJP Kota Jambi juga harus memperhatikan ketentuan- ketentuan seperti tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terutama sekali berkenaan dengan keuangan daerah dalam kaitannya dengan kemampuan pemerintahan Kota Jambi menjalani urusan pemerintahan. Dalam penyusunan RPJP keuangan daerah, dituntut kemampuan dalam melakukan analisis dan menangkap perubahan fenomena 20 tahun kedepan, dengan tetap berpijak pada ketentuang yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Misi utama pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan dasar (*basic services*) dan mengembangkan sector unggulan (*core competences*) dengan cara yang demokratis. Ini berarti, hal yang menjadi penekanan utama dari suatu pemerintahan daerah adalah berorientasi pada pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Output akhir dari pelaksanaan dari visi, dan misi pemerintah daerah daerah kota Jambi adalah: *pertama*, berupa menyediakan kecukupan *public goods* yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat, seperti jalan, pasar, sekolah dan lainnya. *Kedua*, berupa membuat *public regulations* dalam hal pengaturan masyarakat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Akte Klahiran dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut berarti pemerintah daerah harus mempunyai kewenangan dimana kewenangan tersebut yang memungkinkan mereka dapat menghasilkan *public goods* dan *public regulations* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan dasar dan pengembangan sektor unggulan.

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 17 dan Pasal 18, istilah baku yang dipakai bukan "*kewenangan*" tapi "*urusan pemerintah*". Ada tiga kriteria yang berkenaan dengan urusan pemerintah yaitu externalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Khusus yang berkenaan

dengan efisiensi, ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian. *Pertama*, pemerintah daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah *high cost economy*. *Kedua*, efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (*economic of scale*) pelayanan publik dan *ketiga* skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (*catchment area*) yang optimal. Penekanan utama dari urusan pemerintah ini adalah orientasi kebijakan yang jelas berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Untuk menjalani urusan pemerintahan tersebut maka pemerintah harus memiliki kemampuan dalam hal keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Filosofi yang melandasi undang-undang tersebut adalah kebijakan desentralisasi keuangan secara ekonomi menekankan pada upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Disamping itu juga dilandasi *spirit good governance* yang mengedepankan *transparasi, akuntabilitas* dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Landasan filosofi tersebut harus terwujud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara struktur, APBD terdiri dari : Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Berdasarkan Pasal 157 dan 158 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Komponen di atas dapat diterjemahkan secara lebih spesifik bahwa pendapatan asli daerah mencakup : Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah harus ditetapkan melalui undang-undang. Ini berarti, daerah dilarang melakukan pungutan atau sebutan lain di luar yang ditetapkan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menghindari : (a) kebijakan pajak dan retribusi daerah yang tumpang tindih dengan pajak pusat; (b), timbulnya *high cost economy* yang menghambat pengembangan ekonomi masyarakat; (c) ketidakpastian dalam iklim usaha masyarakat; (d), adapun dana perimbangan terdiri dari : dana bagi hasil (pajak dan sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Untuk dana bagi hasil dari sumber daya alam, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan menteri teknis terkait. Dasar perhitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh menteri teknis setelah memperoleh pertimbangan menteri dalam negeri.

Untuk dana alokasi umum, formulasi perhitungannya ditetapkan sesuai dengan undang-undang sedangkan ketentuan lain mengenai dana alokasi khusus diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Dimana, pedoman penggunaan, supervisi, monitoring dan evaluasi dana perimbangan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pendapatan daerah lainnya adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber pendapatan ini mencakup Hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Disamping itu juga termasuk dana darurat diberikan pada daerah yang digolongkan mengalami keadaan tertentu (ditetapkan oleh peraturan Presiden) dan krisis keuangan.

Disamping upaya yang mesti dilakukan dalam peningkatan pendapatan daerah, perhatian dan komitmen yang tinggi dalam menekan belanja daerah dengan berlandaskan prinsip efisiensi harus menjadi keseriusan. Prioritas belanja daerah harus diarahkan secara optimal pada upaya peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta jaminan sosial (Pasal 167 ayat 1 dan 2). Tentu saja, pengeluaran untuk pos belanja Kepala Daerah, Wakil kepala daerah dan belanja pimpinan dan anggota DPRD tetap menjadi perhatian tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Pasal 168 ayat 1 dan 2.

Terkait dengan pembiayaan, daerah dapat melakukan pinjaman dan menerbitkan obligasi daerah (Pasal 169 ayat 1 dan 2). Daerah juga melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman luar negeri dari Menkeu setelah memperoleh pertimbangan

menteri dalam negeri. Ketentuan mengenai pinjaman dan obligasi daerah diatur dengan PP. Daerah juga dapat membentuk dana cadangan yang pengaturannya ditetapkan berpedoman pada PP Pasal 172 ayat 1 dan 2.

Disamping itu, daerah juga dapat melakukan penyertaan modal (investasi) pada badan usaha pemerintah atau swasta dan sebaliknya (dikurangi atau dijual) yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Surplus dan defisit anggaran ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Bila surplus dapat digunakan untuk cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal, dan transfer ke rekening dana cadangan. Sedangkan bila defisit sumber pembiayaan yang dapat digunakan berasal dari sisa lebih tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan dari pinjaman daerah. Menteri dalam negeri melakukan pengendalian defisit anggaran, dan daerah wajib melaporkan posisi defisit/surplus anggaran setiap semester kepada menteri dalam negeri dan Menteri Keuangan.

Daerah dapat memberikan insentif atau kemudahan kepada masyarakat/swasta/investor dalam meningkatkan perekonomian daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah dapat membentuk BUMD yang ditetapkan dengan Perda dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk kondisi tahun anggaran 2004 nilai pengeluaran rutin adalah sebesar Rp 207,378 milyar, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah sebesar Rp 61,719 milyar. Ini berarti perbandingan antara pengeluaran rutin dan pembangunan adalah sebesar 77,1 % dan 22,9 %. Sementara tahun 1995 masih sekitar Rp. 176,563 Milyar dan Rp. 40,123 Milyar Rupiah. Hal yang perlu menjadi perhatian berkenaan dengan pengeluaran rutin adalah tuntutan akan keseriusan pemerintah Kota Jambi untuk menerapkan prinsip skala ekonomis dan efisiensi terhadap beberapa pos pengeluaran rutin. Dalam batas tertentu, peningkatan pengeluaran rutin justru akan bersifat inflasioner dan mereduksi daya tumbuh ekonomi.

Besaran pos-pos pengeluaran pembangunan harus diarahkan pada penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta sektor unggulan daerah. Hal ini tentu saja akan sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Kota Jambi. Oleh sebab itu merupakan suatu hal yang sulit untuk dipahami bila sektor industri yang memberi kontribusi sebesar 18,72% terhadap perekonomian hanya menerima alokasi dana sebesar 0,14% dari anggaran pembangunan.

Upaya pengoptimalisasian penerimaan asli daerah perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kota Jambi. Hal bertujuan menciptakan kemandirian Kota Jambi terhadap pusat. Saat ini masih 78,05% penerimaan Kota Jambi bersumber dari dana perimbangan atau sebesar 66,26% bersumber dari dana alokasi khusus.

Data tahun 2004 memperlihatkan 5 jenis pajak daerah yang di pungut di Kota Jambi. Pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 67,08 % dari penerimaan pajak daerah. Besarnya penerimaan dari pajak penerangan jalan sangat terkait dengan sistem pemungutannya yang melekat pada rekening PLN. Upaya memperbesar penerimaan pajak, terutama melalui intensifikasi terhadap pajak hotel dan restoran serta hiburan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Di Kota Jambi terdapat 34 retribusi yang dipungut pemerintah. Secara umum dapat dinyatakan bahwa besaran penerimaan dari retribusi sangat terkait dengan sistem pemungutannya serta *reward* langsung yang diterima masyarakat. Namun demikian, secara filosofi setiap masyarakat akan bersedia membayar retribusi jika sebanding dengan layanan yang mereka nikmati. Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian dan analisis secara mendalam guna mengetahui potensi masing-masing jenis retribusi.

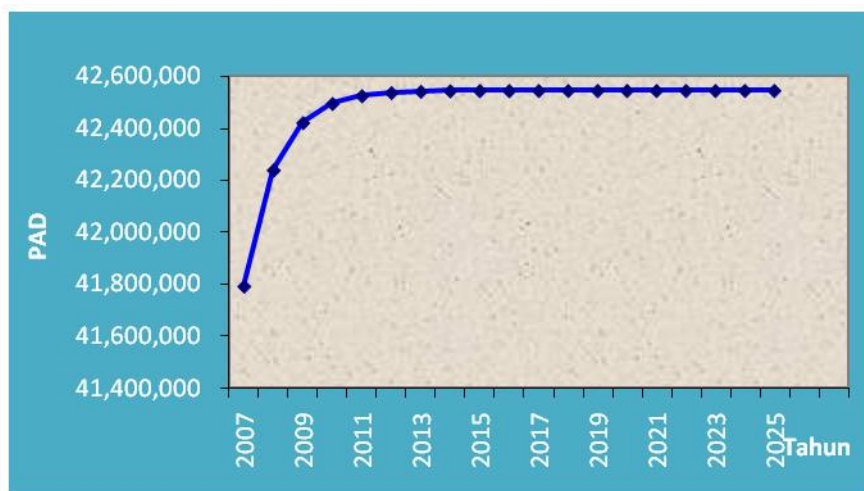
## **B. Analisis Prediksi**

Dalam melihat prediksi tentang keuangan kota Jambi pada 20 tahun kedepan masih tetap menjadi kendala dalam pembangunan, karena peningkatan kebutuhan investasi lebih cepat dari peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah.

Selain pengeluaran pembangunan, pengeluaran rutin juga akan membengkak sebagai akibat kecilnya basis pengeluaran rutin tersebut. Untuk kondisi tahun anggaran 2025, nilai pengeluaran rutin adalah diperkirakan sebesar Rp.254,321 milyar, sedangkan pengeluaran pembangunan diperkirakan sebesar Rp.86,233 milyar.

Permasalahan keuangan daerah pada masa yang akan datang tentunya menjadi sangat krusial, hal ini mengingat pentingnya upaya untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan dalam menutupi pembiayaan pembangunan. Sumber keuangan daerah pada dasarnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari antara lain : pajak daerah, dan pembagian hasil dari BUMD. Otonomi daerah semakin mengarah kepada semakin meningkatnya porsi penerimaan dari pajak daerah, sementara sumber lainnya dari pusat akan semakin kecil.

Dari analisis kondisi menunjukkan bahwa otonomi daerah besar dampaknya bagi perubahan pos-pos anggaran yang ada. Output akhir dari kewenangan yang dimiliki pemerintah adalah berupa kemampuannya dalam menyediakan *public goods* dan *public regulations*. Instrumen yang dapat digunakan adalah melalui pos anggaran pengeluaran pembangunan. Secara ideal semestinya pos pengeluaran pembangunan harus lebih besar dari pada pengeluaran rutin.



Gambar 2.9. Prediksi Trend Penerimaan

## 2.4. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*). Untuk kelompok pertama terdapat dalam berbagai jenis bahan mineral, minyak bumi dan gas. Keberadaan potensi ini di masa yang akan datang semakin penting. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang bersifat stok, dimana eksploitasi saat ini berarti mengurangi stok yang ada untuk masa yang akan datang. Sedangkan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui seperti sumber daya kehutanan, lahan, perikanan, dan biota lainnya. Dalam hal sumberdaya alam dan lingkungan kota Jambi tidak kaya akan sumberdaya alam. Penekanan analisis lebih pada permasalahan lingkungan.

Sebagai ibukota Provinsi Jambi, kota Jambi telah mengalami berbagai kemajuan pembangunan ekonomi menjadikan kawasan ini berkembang baik dengan dorongan/penguatan akibat arahan formal maupun perkembangan alamiah. Sumberdaya lahan bagi Kota Jambi sangat berarti untuk mendukung kelangsungan pembangunan kota Jambi, yakni pembangunan yang tidak diharapkan bagi satu dua generasi melainkan semua generasi mendatang, baik atas dasar potensi sosial ekonomi, fisik, kimia dan biologi. Dengan kata lain, lahan disamping sebagai salah satu input faktor

produksi industri barang maupun jasa maupun untuk keperluan pembangunan berbagai infrastruktur.

Sebagai salah satu sumberdaya alam, lahan/tanah mempunyai sifat kelangkaan (*scarcity*). Disamping itu, lahan ini juga mempunyai nilai *opportunity cost*. Nilai lahan untuk sesuatu kegunaan dan kesempatan yang hilang untuk berbagai penggunaan yang lain itulah yang dimaksud dengan *opportunity cost*.

Lahan perkotaan ini, disamping dipengaruhi kekuatan tarik menarik antara pemilik dan pihak yang meminta sebagaimana terdapat dalam mekanisme hukum permintaan dan penawaran, campur tangan pemerintah diperlukan untuk lebih mengefisienkan mekanisme pasar tersebut-walau diakui apabila campur tangan ini terlalu dalam terkadang menjadikan alokasi lahan menjadi tidak efisien. Namun demikian, bentuk campur tangan ini bertujuan agar penggunaan lahan/tanah lebih bermanfaat dan tepat guna, yang dapat mengakomodasikan azas keadilan masyarakat.

Walaupun kota Jambi dengan posisinya telah menempatkan diri sebagai pusat industri/perdagangan dan jasa-jasa terutama bagi kawasan *hinterland* yang mana mengandung muatan bahwa lahan lebih banyak dibutuhkan secara proporsional ditambah untuk itu dan juga permukiman/perumahan kota, akan tetapi lahan ini dalam ukuran tertentu harus dapat dimanfaatkan guna kebutuhan berbagai pembangunan fasilitas sosial (*public services*) yang masuk ke dalam *social overhead capital*. Infrastruktur ini penting dan besar perannya untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi kota yang lebih terarah dan cepat secara simultan yang akhirnya diharapkan secara bersamaan diusahakan dapat menimbulkan manfaat bersamaan antara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Terjadinya kegagalan pasar lahan kota, dalam kenyataannya bisa antara lain dikarenakan adanya kekakuan struktur/birokrasi (*structure rigidities*) pada satu sisi, dengan tidak seimbangannya respon masyarakat akan isyarat-isyarat harga yang terjadi. Untuk itu pihak pemerintah harus mengambil peran inisiatif dan pemimpin dalam berbagai alokasi investasi strategis atas tanah terutama yang telah dan bakal dimanfaatkan sebagai salah satu masukan faktor produksi.

Seandainya alokasi lahan kota untuk berbagai penggunaan dibiarkan terjadi pada mekanisme pasar, pihak non pemerintah (swasta dan masyarakat lainnya) akan mengoptimalkan nilai guna pada tingkat yang lebih menguntungkan mereka dan mungkin lebih menuju pada *profit oriented*. Kondisi ini akan menjadi menceng bila dihadapkan pada upaya lebih menekankan manfaat sosial (*social benefit*) seperti dikehendaki pihak pemerintah dalam menegakkan regulasi, alokasi dan bahkan juga distribusi dan stabilisasi.

#### **2.4.1. Kondisi historis**

Kondisi historis selama periode 1995-2004, dimaksudkan menggambarkan keadaan (status) sumberdaya alam Kota Jambi dan beberapa sektor yang mempengaruhi kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup tersebut.

##### **SDA - Industri**

Di kota Jambi terdapat berbagai industri yang dapat tumbuh dan berkembang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Jambi khususnya, dan perekonomian Provinsi Jambi pada umumnya. Industri sawmill yang ada di Kota Jambi tercatat sebanyak 17 buah, dan crumb rubber 5 buah. Disamping itu, di Kota Jambi terdapat berbagai kegiatan usaha lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan seperti tertera pada tabel berikut.

Sebagai gambaran, dilihat dari data tahun 2000-2004, nilai produksi secara keseluruhan mengalami peningkatan 97,37 % yakni dari 391 milyar tahun 2000 menjadi 772 milyar tahun 2004. Penyerapan tenaga kerja untuk tahun yang sama rata-rata meningkat sebesar 7,31 % yakni dari 11923 tahun 2000 menjadi 12794 tahun 2004. Sedangkan jumlah perusahaan tahun 2004 tercatat sebanyak 1617 unit dibandingkan dengan 1538 unit pada tahun 2000.

Industri kimia, agro dan hasil hutan di kota Jambi untuk tahun 2004 sebanyak 959 unit, sedangkan tahun 2000 sebanyak 895 unit. Untuk industri logam, mesin, elektro dan aneka mengalami peningkatan 2,33 % dari tahun 2000-2004 yaitu menjadi 658 unit. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, dari 12794 orang tenaga kerja yang terserap tahun 2004, sebanyak 9308 orang terserap pada industri kimia, agro dan hasil hutan, sedangkan 3486 hanya terserap pada industri logam, mesin, elektronik dan aneka.

Perkembangan sektor industri ini diakui telah memberikan sumbangan positif terhadap gerak pertumbuhan ekonomi kota Jambi, baik dalam bentuk sumbangannya terhadap penerimaan daerah (pajak dan retribusi) maupun manfaat sosial lainnya seperti penyerapan tenaga kerja setempat. Dengan semakin banyaknya industri tumbuh di kota Jambi, secara proporsional peningkatan demikian berpengaruh terhadap permintaan lahan kota. Kecenderungan peningkatan permintaan lahan untuk industri ini akan memberikan sumbangan pada pembentukan harga jual lahan akibat nilai tambah strategis (*locational rent*) yang semakin tinggi pula.

Pertumbuhan dan pemusatan industri di kawasan kota Jambi yang mencerminkan kecenderungan pasar (*market oriented*) sebagai gerbang pemasaran, membawa konsekuensi semakin banyaknya tenaga kerja yang datang ke kota Jambi baik dalam tatanan *skill* ataupun *unskill labour*. Di sisi perusahaan industri, fenomena demikian akan menguntungkan, karena terjadi penawaran tenaga kerja yang relatif banyak dan diharapkan biaya tenaga kerja relatif akan menjadi murah serta efisien. Efisien di sini dimungkinkan, baik karena tersedianya Balai latihan Tenaga Kerja yang disediakan oleh pihak pemerintah maupun, mobilitas tenaga kerja yang tinggi karena telah didukung oleh keterampilan khusus yang mereka miliki di perusahaan-perusahaan industri yang banyak terdapat dalam kota Jambi.

Permasalahan yang dihadapi bidang industri meliputi : (1) Pembuangan limbah industri pengolahan kayu seperti industri sawmill ke pinggir sungai Batanghari menjadikan air sungai tercemar seperti berbau, tidak jernih. Secara biologi jenis vegetasi tertentu tidak dapat tumbuh baik karena tanah ditutupi limbah yang menumpuk. Juga akan menjadikan hilangnya pemandangan keindahan sungai. (2). Penggunaan mercuri secara berlebihan dan pembuangan limbah industri *crumb rubber* ke badan sungai tanpa didukung instalasi pengolahan limbah yang memadai, dapat menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran air sungai secara kimia yang dapat mengganggu ekosistem alami di sungai seperti ikan dan sebagainya. (3). Kawasan pergudangan getah di daerah Payo Selincah akan menimbulkan polusi udara seperti bau terhadap masyarakat sekitarnya. Pembuangan limbah cair getah yang tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan seperti pencemaran air sumur penduduk dan sebagainya. (4) .Pemusatan industri yang tidak tertata dan terkendali dalam hubungannya dengan keseimbangan dengan kesempatan kerja akan menimbulkan dampak negatif sosial seperti tindak kriminal. (5). Asap/gas buangan industri akan dapat mencemari udara perkotaan baik berupa bau dan debu yang menimbulkan ketidaknyamanan bernapas, maupun dampak negatif lain seperti masuknya karbon dari sisa-sisa pembakaran industri, serta perubahan iklim menjadi panas. (6). Pembangunan industri yang berbasis pada ketersediaan sumberdaya alam lokal yang memiliki daya saing pasar. (7). Industri yang tidak saja bermanfaat secara ekonomi, namun sekaligus mendatangkan manfaat sosial seperti membuka kesempatan kerja bagi warga lokal dan meminimalkan dampak negatif lingkungan.

#### **SDA- Permukiman/perumahan**

Angka prediksi kebutuhan perumahan menurut RTRW Kota Jambi (2005), Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 416.955 jiwa (83, 391 KK), total kebutuhan perumahan Kota Jambi untuk tahun 2005 sebanyak 3341,79 unit. Kota Jambi merupakan konsentrasi permukiman terbesar dalam provinsi Jambi. Keadaan ini terjadi baik karena pertumbuhan alamiah atau dikarenakan adanya migrasi penduduk ke kota Jambi yang memiliki hierarki tertinggi dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana. Pola permukiman yang terbentuk adalah rumah-rumah perorangan dan kompleks-kompleks perumahan

yang dibangun oleh pemerintah dan pihak swasta. Untuk kenyamanan pengguna jalan, telah dibangun sebanyak 22 ruas jalan lingkungan yang tersebar di setiap kecamatan.

Hampir semua rumah dan kompleks permukiman di kota Jambi telah ditunjang oleh prasarana dan sarana transportasi. Kecuali untuk kawasan pinggir kota, distribusi air bersih PDAM yang bersumber dari sungai Batanghari telah dapat dirasakan oleh masyarakat. Jangkaun pelayanan air bersih PDAM ini baru sekitar 60%. Tahun 2002 PDAM telah menambah 2082 SP pelanggan baru. Pemerintah kota juga telah menerima bantuan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi Air Bersih di Kelurahan Payo Selincah berupa: 1 unit mobil tangk air, 3 unit air berkapasitas 4000 liter tiap unit, gerobak 4 unit, jerigen 10 liter dan 20 liter masing-masing sebanyak 24 buah.

Pemerintah kota Jambi pada tahun sama juga telah menerima bantuan penanganan drainase kota berupa pembersihan parit dan anak sungai sebanyak 124 buah, ditambah bantuan fisik penataan kawasan Angso Duo dalam bentuk 1 unit terminal ketek. Perkembangan penduduk kota yang terjadi karena kelahiran alamiah ataupun karena migrasi ikut mendorong kecenderungan peningkatan permintaan akan rumah. Permintaan semacam ini akan berpengaruh pada kenaikan harga lahan/tanah kota Jambi.

Paling tidak dalam periode 4 tahun belakangan ini, di kota Jambi telah tumbuh ruko yang jumlah dan penyebarannya meningkat terutama di bagian jalan-jalan protokol. Kehadiran ruko dan juga pusat-pusat pembelanjaan modern di Kota Jambi sebagai salah ukuran fisik kemajuan pembangunan kota Jambi. Pembangunan perumahan/permukiman, ruko dan pusat-pusat pembelanjaan serta mini market diakomodir sesuai dengan arahan yang terdapat dalam RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota). Kehadiran pusat-pusat pembelanjaan di kota Jambi dari sudut ekonomi dan sosial telah memberikan kontribusi positif pada penerimaan pemerintah kota dan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitarnya. Penanggulangan sampah kota diserahkan kepada perusahaan swasta. Paling tidak dalam sehari sampah kota yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) antara 200 M3 sampai 500 M3. Pengelolaan sampah di TPA dilakukan dengan sistem *control land fill* (penimbunan terkendali).

Permasalahan bidang pemukiman terdiri dari : (a), Pembangunan perumahan/permukiman yang tidak tertata dengan baik dan atau tanpa mempedomani rencana tata ruang kota yang telah ada dapat berbias pada munculnya kawasan-kawasan kumuh dengan lingkungan permukiman yang tidak sehat; (b), Harga tanah akan ikut meningkat akibat munculnya rumah-rumah dan kompleks-kompleks perumahan yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Begitu pula dengan dampak negatif karena terbangunnya ruko dan pusat-pusat pembelanjaan modern dan juga mini market di Kota Jambi. Harga tanah yang naik pada gilirannya mendorong pihak-pihak tertentu yang bertindak sebagai spekulasi tanah. Di lain sisi pada gilirannya akan menimbulkan golongan miskin baru karena beberapa kalangan warga masyarakat baik karena keadaan ekonomi ataupun karena pertimbangan lain terdorong menjual tanah; (c), Pembangunan perumahan dan kompleks perumahan secara akumulatif akan mengurangi daerah resapan air ke dalam tanah karena lapisan atas tanah tertutup oleh bangunan. Aliran permukaan yang tersendat atau tertutup juga akibat adanya pembangunan sarana prasaran lain dapat memunculkan banjir perkotaan; (d), Pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam RBWK/RDTRK Kota Jambi; (e), Pembangunan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan sistem drainase yang baik-memenuhi syarat-syarat kesehatan lingkungan permukiman; dan (f) Merelokasi dan merehabilitasi kawasan-kawasan kumuh perkotaan.

#### **SDA – Kehutanan**

Produk hutan non HPH di Kota Jambi berupa industri perkayuan yang terdiri dari pengolahan hasil hutan sebanyak 38 buah (data tahun 2004). Berdasarkan data tahun 2003, produksi kayu bulat sebanyak 295.461,67 m3. Sedangkan kayu gergajian dan kayu olahan masing-masing sebanyak 142.091,37 m3 dan 176.919,81 m3.



Secara total, luas hutan kota Jambi saat ini tercatat 90,26 ha. Bagian terluas dari hutan kota dimaksud berupa hutan rengas yang berada di Danau Buluran Kenali, diikuti oleh hutan kota di Kenali Asan bawah seluas 11 ha, hutan pinus di km 11 dan Taman Rimba (eks arena MTQ) masing-masing dengan luasan 10 ha. Luas Taman Angrek di Telanaipura (2,25 ha) hampir sama dengan Taman Arena Remaja (2,24 ha).

Di kota Jambi masih terdapat lahan kosong seluas 589,6 ha dengan 53,5 ha lahan kritis. Lahan kritis tersebut hanya terdapat di kecamatan Kota Baru. Kategori kesuburan tanah kosong yang menyebar hampir di semua kecamatan dalam Kota Jambi (kecuali kecamatan Pasar Jambi) berada pada derajat sedang.

Hutan kota ini sebenarnya berfungsi sebagai paru-paru kota Jambi, yang diharapkan bukan sekedar pertimbangan estetika (*nilai environmental rent*) melainkan dapat berfungsi mengurangi laju pencemaran lingkungan perkotaan yang ditimbulkan dari berbagai macam sumber pencemaran. Adapun permasalahan bidang Kehutanan :

- 1 Luas hutan kota saat ini relatif masih kurang. Luas hutan kota yang relatif kurang ini menjadikan hutan belum berfungsi maksimal untuk menyerap sink yang bertebaran diudara sehingga fungsi hutan yang sedianya bermanfaat untuk mengatur iklim makro dan sebagainya tidak dapat dicapai sebagaimana diharapkan.
- 2 Deforestation Hutan. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan berdampak kepada pemanfaatan hutan untuk tujuan lain, dan telah ikut menyumbang pada perubahan iklim yang sulit diprediksi. juga dapat mendorong timbulnya banjir kota karena aliran permukaan air (run off) terjadi ke kawasan rendah, sedangkan drainase kota belum tertata baik atau ada yang tersumbat sampah domestik.
- 3 Mempertahankan dan memperluas area hutan kota serta penataan /pengelolaan kawasan terbuka hijau kota.
- 4 Merehabilitasi lahan kritis perkotaan dan memanfaatkan lahan-lahan kosong sesuai dengan peruntukannya.
- 5 Memanfaatkan hutan kota sebagai objek wisata lingkungan alami yang didukung dengan interpretasi lingkungan alami, bukan wisata massal.

#### **SDA - Pertambangan dan Energi**

Pendistribusian listrik di Kota Jambi meliputi jaringan tegangan menengah 907,17 kwh dan jaringan tegangan rendah 1926,60 kwh. Distribusi jaringan listrik ini didukung oleh PLTD dan PLTG yang secara total mencapai 106.283 kwh. Sedangkan Kwh terbangkit sebesar 314.554.848 VA sebenarnya berada di atas kwh terjual (250.504.533 VA), namun pada kenyataannya pihak konsumen PLN sering merasa kecewa akibat seringnya listrik mati. Jumlah Sumber Energi Listrik di Kota Jambi tidak mengalami perubahan yaitu 1 PLTG dan 2 PLTD.

Bidang sumberdaya energi permasalahan yang dihadapi meliputi : (a) Penataan stasiun pengisian bahan bakar minyak guna menghindari dampak negatif terhadap keamanan, kelancaran berlalu lintas. (b) Penempatan stasiun pengisian bahan bakar minyak yang dapat mendorong simpul-simpul pertumbuhan kota. (c) Penempatan pompa bensin di kawasan pusat kota akan dapat menimbulkan bahaya lingkungan seperti kebakaran, kemacetan/kecelakaan lalu lintas dan sebagainya; (d) Distribusi jaringan listrik PLN yang sering mengalami pemadaman akan menimbulkan kerawanan sosial dan kerugian ekonomi. (f) Secara fisik, pinggiran sungai Batanghari yang dimanfaatkan untuk usaha Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menjadikan tebing sungai terbis dan tanah akan gersang dan secara biologi tidak dapat ditumbuhi jenis tanaman lain karena hilangnya lapisan subur tanah (*top soil*). Penggunaan merkuri yang melampaui daya asimilasi air sungai akan menjadikan air sungai tercemar yang dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif.

#### **2.4.2. Analisis Prediksi**

Berdasarkan gambaran di atas Kota Jambi mempunyai beberapa kekuatan diantaranya : (a) Lokasi kota Jambi yang strategis sebagai ibukota provinsi Jambi. (b)

Posisi geografis dengan nilai *Ricardian Rent* yang tinggi dan kawasan yang berhierarki tinggi dari sudut jumlah dan jenis prasarana, dapat menunjang efisiensi gerbang pemasaran komoditi Kabupaten lain dalam provinsi Jambi; (c) Pusat industri perdagangan dan jasa-jasa dari kawasan *hinterland*, pusat permukiman/perumahan; (d) Ketersediaan berbagai sarana prasarana perhubungan dan sarana prasarana lainnya; (e) Kota Jambi telah memiliki Rencana Induk Kota sampai RDTRK untuk acual pemanfaatan lahan kota; (f) Ketersediaan dukungan sumberdaya manusia yang relatif lebih baik untuk mengisi dan mengelola pembangunan untuk sektor swasta dan sektor formal di birokrasi pemerintahan.

Adapun yang menjadi kelemahan adalah : (a), Sumberdaya lahan kota yang tetap dan terbatas jumlahnya, di lain sisi permintaan akan lahan/tanah kota semakin tinggi; (b), Kecenderungan terjadi alih fungsi pemanfaatan lahan kota yang tidak sesuai dengan peruntukan atau penggunaan tehnisnya; (c), Kota Jambi tidak memiliki pelabuhan ekspor langsung ke daerah lain/negara tujuan ekspor; (d) Kecenderungan munculnya spekulasi penggunaan lahan perkotaan; (e) Menjadi kawasan tumpuan migrasi dalam provinsi Jambi khususnya, sehingga dimungkinkan munculnya kawasan-kawasan kumuh yang tidak tertata dan dikelola dengan baik.

Dari analisis faktor eksternal menunjukkan bahwa kota Jambi mempunyai beberapa kesempatan yaitu : (a), Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berbasis lokal untuk industri, perdagangan, permukiman/perumahan; (b), Adanya permintaan sumberdaya alam Kota Jambi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan/ atau penggunaan; (c), Peluang menjadi kawasan terdepan dibandingkan Kabupaten lainnya dalam Provinsi Jambi guna mencapai pertumbuhan ekonomi pada skala tertentu; (d), Relatif masih sedikitnya luasan hutan kota dan kawasan terbuka hijau lainnya sehingga mendukung perubahan iklim yang tidak bagus, menimbulkan kecenderungan semakin tingginya pencemaran dan gangguan lingkungan secara kimia, fisik dan biologi. Disamping kesempatan tentu ada tantangan yang meliputi Penerapan kebijakan perlindungan kualitas lingkungan alami yang dikaitkan dengan hasil-hasil perdagangan dan industri kota, Arus globalisasi. Serta Masih tersedia lahan kosong untuk dikembangkan sesuai dengan arahan penggunaan yang tepat.

## **2.5. Agama**

Agama merupakan kepercayaan terhadap Allah Yang Maha Esa. Masyarakat Jambi terdiri dari beberapa kelompok menurut agama yang dianutnya. Pada umumnya beragama Islam lebih kurang 85 persen, selebihnya beragama Kristen, Katolik, Protestan dan Hindu.

### **2.5.1. Kondisi Historis**

Dalam periode 1995-2005, kehidupan antar umat beragama berjalan secara rukun dan damai, tidak ada konflik yang berarti yang mengganggu proses pembangunan. Perkembangan agama dapat terlihat dari sarana dan prasarana ibadah, yang selama periode tersebut terdapat peningkatan baik dalam rehabilitasi maupun pembangunan mesjid dan mushala.

Rumah ibadah seperti mesjid dan gereja tersedia cukup untuk tempat ibadah umat Islam dan Kresten/Kotalik/Protestan. Selama periode 1995-2005 terjadi perkembangan baik dalam kualitas maupun pembangunan tempat ibadah baru. Pada tahun 1995, jumlah mesjid 198 buah meningkat menjadi 245 buah pada tahun 2005. Sedangkan Gereja meningkat dari 43 buah menjadi 45 buah. Demikian juga dengan pembangunan sarana pasarana lainnya yang digunakan dalam menjalankan ibadah kepada sang pencipta.

### **2.5.2. Analisis Prediksi**

Kondisi antar umat seagama dan beragama diprediksi berjalan dengan kondusif sejalan dengan perkembangan pendidikan penduduk terutama pemahaman tentang agama, khususnya pentingnya hidup bergotong royong dan kondisi aman untuk

menggerakkan pembangunan. Namun sejalan dengan perkembangan penduduk dan ekonomi yang menyebabkan munculnya kompetisi dalam beberapa aktivitas pembangunan baik ekonomi maupun politik berdampak kepada ketidakstabilan hubungan antar umat terutama antar umat yang berbeda agama. Hal ini disebabkan antara lain agama dimanfaatkan sekelompok masyarakat untuk kepentingan politik dan ekonomi sekelompok masyarakat tertentu.

Secara kuantitatif pembangunan rumah ibadah untuk 20 puluh tahun kedepan tidak berkembang secepat pertumbuhan penduduk, tetapi biasanya perkembangan ekonomi yang berdampak kepada pembangunan perumahan-perumahan dan pembangunan gedung-gedung sekolah/universitas dan gedung perkantoran akan diikuti dengan pembangunan tempah ibadah. Kemudian ada kecenderungan masyarakat akan semakin tinggal pada kelompok masyarakat yang seagama.

## **2.6. Budaya**

Secara konseptual budaya mempunyai banyak makna, ada yang melihat budaya sebagai : (a), Produk masyarakat, menuju terwujudnya ketertiban, kerukunan, kedamaian, kesetiakawanan sosial, dan kesejahteraan; (b), Wujud tanggapan manusia terhadap tantangan kehidupan sebagai hasil adaptasi dengan lingkungannya; (c), budaya berisikan unsur universal dan lokal; (d), proses belajar (pewarisan) nilai, ide, gagasan, norma, tindakan dan hasil karya manusia kepada generasi berikutnya; (e), budaya sebagai mekanisme tata kelakuan manusia; dan (f), budaya sebagai bentuk yakni sistem nilai budaya (adat-istiadat), sistem sosial, dan hasil fisik karya manusia; (g), budaya berisikan kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun (dari anak turun ke bapak, dst), diikuti banyak pendukung, dan ada sanksi bagi pelanggarannya; (h), kebudayaan bukan agama dan agama juga bukan kebudayaan, tetapi kebiasaan manusia dalam menjalankan tugas keagamaan menimbulkan kebudayaan; (i), masyarakat pendukung kebudayaan yakni minoritas dan mayoritas kreatif; dan (k), kebudayaan berubah karena minoritas/mayoritas kreatif kehilangan daya kreativitasnya.

### **2.6.1. Kondisi Historis**

Pengamatan selama tahun 1995-2004, budaya masyarakat kota Jambi belum banyak berperan dalam mendorong perekonomian daerah. Hal ini erat kaitannya dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa yang telah menghilangkan jati diri sistem budaya pemerintahan yang ada di Koa Jambi. Pola keseragaman, tidak mengatur desa dari aspek budayanya (adat) dan tidak mengakui prinsip otonomi daerah. Masyarakat adat (pemangku adat) kehilangan legitimasi

Berbagai permasalahan budaya yang dihadapi diantaranya : (a), masih sulit merubah budaya yang bersifat statis kepada dinamis yang mendorong pembangunan ekonomi; (b), beragamnya nilai budaya sebagai akibat dari heterogenya penduduk sering menyebabkan benturan budaya. Kondisi Historis kebudayaan dapat digambarkan dari Aspek Institusi, Historis, etnis, pemanfaatan simbol budaya, globalisasi, permukiman penduduk, mobilitas penduduk, pelayanan pemerintahan, wisata, kegiatan kebudayaan, ekonomi, pendidikan, informasi, dll. Untuk membangun Kebudayaan maka diperlukan Perlindungan nilai budaya., Pengembangan nilai budaya dan Pemanfaatan nilai budaya

### **2.6.2. Analisis Prediksi**

Pada pembangunan jangka panjang kota Jambi, kondisi budaya akan berkembang secara dinamis sejalan dengan perkembangan pendidikan dan ekonomi serta semakin terbukanya kota Jambi dengan daerah lain melalui perkembangan teknologi seperti televisi, dan internet. Namun perubahan ini relatif lambat karena merubah budaya masyarakat bukan persoalan yang gampang/mudah. Simbol-simbol budaya akan semakin berkembang seperti museum dan candi serta simbol-simbol lainnya.

Sebagai gambaran, untuk melakukan prediksi tentang budaya Kota Jambi dilakukan dengan analisis lingkungan strategis dengan melihat beberapa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan

Fakhrudin Saudagar, posisi budaya tersebut menggambarkan bahwa posisi kelemahan lebih besar dari pada kekuatan, dan peluang lebih besar dibandingkan ancaman. Isu strategis sehubungan dengan kebudayaan yang perlu dicermati, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Budaya, Data Base Budaya Melayu, Membangun identitas / karakteristik / jati diri masyarakat dalam bidang budaya Melayu, Pemberdayaan masyarakat minoritas kreatif dan mayoritas kreatif.

Untuk 20 tahun kedepan, bagaimana merubah budaya yang menghambat perkembangan pembangunan ekonomi kepada pendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas lainnya. Budaya malas bekerja menjadi suka bekerja, budaya "sendiri" berubah kepada budaya kerjasama dan mencaci ke arah menyanjung. Nilai-nilai positif yang harus dikembangkan dan nilai-nilai budaya negatif harus dikurangi bahkan dihilangkan.

## **2.7. Pendidikan**

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah/wilayah karena pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi pendidikan merupakan sarana peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Perkembangan ekonomi dan penduduk harus diikuti dengan perkembangan pendidikan. Demikian sebaliknya perkembangan pendidikan akan berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan lainnya. Dalam kaitan dengan pendidikan dibutuhkan berbagai sarana prasarana pendidikan.

Perkembangan pendidikan di kota Jambi menunjukkan adanya respon positif dari masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyediaan lembaga pendidikan, yang tentunya merupakan peluang investasi yang prospektif. Perluasan dan pemerataan akses pada pendidikan Kota Jambi sudah merupakan suatu keharusan, ini didukung oleh Kota Jambi memiliki banyak kelebihan bila dibandingkan dengan daerah Tingkat II lainnya, seperti : sebagai ibu Kota Provinsi Jambi dan pusat administrasi pemerintahan Provinsi Jambi; terdapat berbagai Perguruan Tinggi sebagai pencetak guru/pendidik; sebagai kiblat pendidikan, untuk itu perlu adanya program pendidikan yang dirancang secara komprehensif.

### **2.7.1. Kondisi Historis**

Untuk melihat kondisi pendidikan dimasa lalu khususnya selama periode 1995-2005, pendidikan di kota Jambi berkembang kearah yang lebih baik, yang terlihat dari indikator : meningkatnya angka melek huruf (literacy rate), meningkatnya anak yang berpendidikan sampai kelas 5 SD (children reaching grade), dan angka partisipasi pendidikan (enrolment ratio). Juga membaiknya indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Indikator mikro lainnya tercermin juga dari : meningkatnya pembangunan gedung-gedung sekolah mulai dari play group, sekolah Taman Kanak-Kanak sampai kepada Perguruan Tinggi, meskipun perkembangan jenis pendidikan tidak berkembang secepat pembangunan gedungnya. Perguruan Tinggi lebih banyak terfokus kepada pendidikan sosial seperti ekonomi dan kesehatan dan hukum, tetapi sedikit sekali pembangunan untuk Fakultas Eksakta seperti fakultas teknik. Baru diakhir tahun 2005 Universitas Jambi membuka Fakultas Kedokteran. Demikian juga untuk pembangunan sekolah keterampilan pada level pendidikan SD, SLTP dan SLTA.

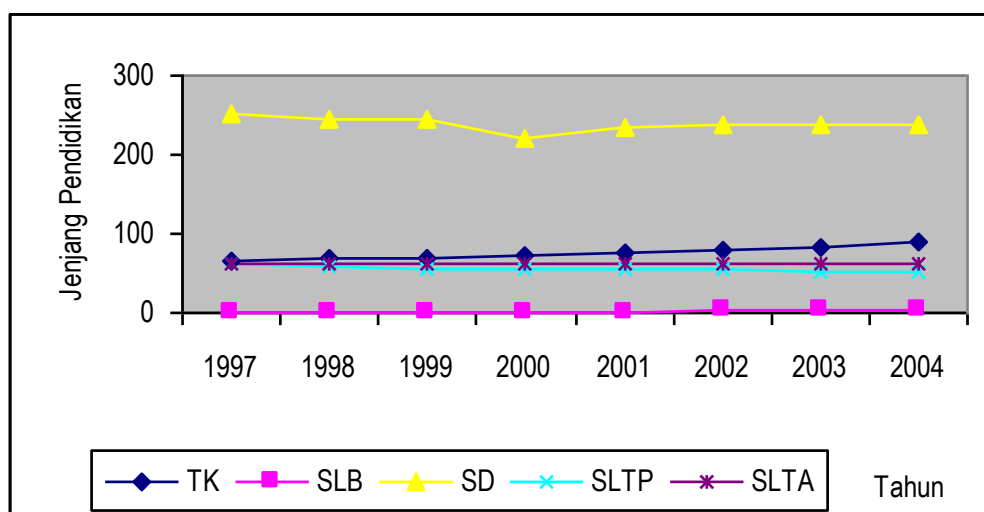
Sebagai gambaran, Pendidikan Taman Kanak-kanak pada tahun 2005 tercatat sebanyak 99 buah dimana 97 diantaranya merupakan TK Swasta dan 2 buah TK negeri. Pada Tingkat SMTP jumlah sekolah sebanyak 53 terdiri dari 24 SMTP Negeri dan 29 swasta. Sedangkan untuk tingkat SLTA terdapat 47 swasta dan 15 Negeri. Untuk tingkat perguruan tinggi terdapat 6 lembaga pendidikan swasta sedangkan negeri sebanyak 2 perguruan tinggi yaitu Universitas Jambi dan IAIN sebagian aktivitasnya termasuk pada daerah administrasi Kabupaten Muaro Jambi. Pendidikan keagamaan tercatat Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 97 unit yang terdiri dari 1 buah negeri dan 96 swasta. Madrasah Tsanawiyah (MTs) berjumlah 26 buah dimana 6 merupakan MTs

negeri sedangkan 20 swasta. Untuk tingkat Madrasah Aliyah(MA) berjumlah 16 buah yang terdiri dari 2 negeri dan 14 swasta.

Perkembangan penduduk kota 4% per tahun tentunya diikuti dengan permintaan akan fasilitas pendidikan yang juga meningkat. Tahun 2004 Jumlah siswa TK 7.319 orang, SD 58.617 orang, SMP 22.275 orang siswa, SMU 14.399 orang, dan jumlah SMK 10.640 orang. Sedangkan jumlah Mahasiswa untuk perguruan tinggi adalah sebagai berikut : mahasiswa Universitas Batanghari 2.053 orang, ASM dengan 202 orang, mahasiswa STMIK 1.180 orang dan Yayasan Muhammadiyah mempunyai mahasiswa sebanyak 116 orang.

### **Perkembangan gedung**

Kota Jambi merupakan salah satu Daerah Tingkat II dari 10 (sepuluh) Daerah Tingkat II yang ada dalam Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki luas wilayah 205.538 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 62 kelurahan/desa. Perkembangan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 2.10. Perkembangan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jumlah SD dan SMP terjadi penurunan masing-masing dari 252 sekolah SD tahun 1997 menjadi 237 di tahun 2004 karena adanya beberapa sekolah yang digabung, Sementara SMP berjumlah 61 sekolah tahun 1997 menjadi 52 sekolah pada tahun 2004. Untuk jenjang pendidikan TK setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun pada jenjang SLTA jumlahnya tetap sebanyak 62 sekolah.

Pendidikan keagamaan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Jumlah MI tahun 1997 sebanyak 90 sekolah yang terdiri dari 89 MI Negeri dan 1 MI Swasta, pada tahun 2004 jumlahnya menjadi 97 MIN dan 1 MIS. Untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTS) lebih didominasi sekolah swasta dimana pada tahun 1995 jumlah Madrasah Tsanawiyah Swasta sebanyak 1 dan negeri 4 sekolah. Pada tahun 2004 terjadi sebaliknya dimana Madrasah Sanawiyah negeri sebanyak 6 sedangkan swasta 21 sekolah. Pada jenjang Madrasah Aliyyah (MA) juga didominasi swasta dengan 14 dan negeri sebanyak 2 sekolah, jumlah ini tetap dari tahun 1997 sampai dengan 2005.

### **Perkembangan guru**

Guru dapat dikelompokkan yaitu guru swasta dan negeri yang mengajar pada berbagai jenis jenjang pendidikan. Pada tahun 2005, jumlah guru SD, MI, SMP, MT, SMA, SMK dan MA masing-masing 733 orang, 132 orang, 2223 orang, 472 orang, 1.136 orang, 860 orang dan 319 orang. Sementara tahun 1995 masih 689 orang, 100 orang, 2.011 orang, 392 orang, 987 orang, 612 orang dan 298 orang. Kondisi guru ini menjadi potensi yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan. Diperkirakan dengan

berkembangnya PDRB Jambi akan terbuka peluang untuk berkembangnya sektor pendidikan sehingga berdampak pada perkembangan guru.

### **Perkembangan Siswa**

Indikator pendidikan dapat juga dilihat dari rasio antara guru dan siswa. Dalam hal ini perkembangannya dari tahun 1995 sampai dengan 2004 perkembangannya tidak terdapat perubahan yang berarti, terutama pada tingkat TK dan SD dimana pada tahun 1995 untuk TK, SD, SMP dan SMU masing-masing 15, 23, 12 dan 11. Sementara untuk tahun 2004 adalah sebesar 17, 24, 10 dan 14. Bahkan untuk SMP terjadi suatu penurunan.

Selain rasio guru/siswa perkembangan pendidikan juga terukur dari rasio siswa/kelas. Pada periode yang sama di atas terlihat pada tahun 1995 untuk TK, SD, SMP, SMU dan SMK masing-masing 27, 28, 20, 41 dan 13. Untuk tahun 2004 menjadi 39, 29, 40, 41 dan 35. Disini terlihat bahwa untuk SD tidak terdapat perubahan yang signifikan.

Fakta ini dapat menjadi pendukung untuk merencanakan atau memprogramkan pendidikan dengan terarah dan terpadu baik program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Sehingga dapat mencapai kondisi pendidikan yang lebih maksimal di Kota Jambi. Suatu sekolah mulai dari Paud, SD sampai SMA dan SMK memerlukan manajemen yang tepat untuk keperluan meningkatkan mutu pendidikan, ini seiring dengan maksud dari manajemen peningkatan mutu sekolah Bafadal (2003: 82) bahwa proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, secara otonomi direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dengan melibatkan semua *stakeholder* sekolah. Salah satu kesiapan yang ingin dicapai adalah: penguasaan keterampilan yang lebih sederhana yang dapat membolehkan seseorang untuk mencapai keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi.

Pengertian konsep tersebut memberikan otonomi kepada sekolah untuk secara aktif serta mandiri mengembangkan dan melakukan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Levacic (1995) menyebutkan kunci dari MPMBS adalah: (1) Pengambilan keputusan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan pada *Stakeholder* sekolah, (2) Aspek peningkatan pendidikan mencakup: keuangan, kepegawaian, sarana, prasarana, penerimaan siswa baru, dan kurikulum. (3) Diperlukan sejumlah regulasi (peraturan) yang mengatur fungsi kontrol terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah.

Pembangunan pendidikan Kota Jambi ke depan secara strategis hendaknya di buat dalam bagan alur pikir penyusunan RPJM,. Menurut prediksi kedepan bakwa pendidikan Kota Jambi bila di kelola dengan sungguh-sungguh oleh semua elemen masyarakat Kota Jambi dapat menjadi Kiblat Pendidikan bagi dunia pendidikan Provinsi Jambi. Banyak indikator yang mendukungnya seperti pertambahan anak usia sekolah Kota Jambi memungkinkan pendidikan berkembang, calon siswa pendaftar dari daerah tingkat dua dalam Provinsi Jambi selalu menunjukkan peningkatan, Kota Jambi dekat dengan Perguruan Tinggi sebagai sumber SDM seperti Universitas Jambi, Universitas Batanghari, dan IAIN, demikian pula dengan Sekolah Tinggi dan Akademinya. Dengan demikian Prediksi kedepan tepat dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kota Jambi Layak dibangun dan berkembang lebih maju.

Bidang pendidikan di Kota Jambi, menunjukan beberapa hal seperti sekolah TK negeri dan swasta untuk jumlah sekolah berbanding 1 : 51, jumlah guru berbanding 1 : 3,3, sedangkan jumlah siswa berbanding 1 : 24,6. kondisi seperti ini menunjukan bahwa sekolah TK swasta sangat membantu dunia pendidikan Kota Jambi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Kota Jambi. sudah selayaknya pemerintah Kota Jambi memberikan perhatian dan membina sekolah TK swasta untuk lebih maju lagi. Perbandingan yang menunjukan lebih baik untuk sekolah TK swasta pertanda masyarakat luas sangat mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan

kehidupan masyarakat Kota Jambi. Dengan demikian pemerintah tidak saja membangun sekolah TK negeri namun juga harus membangun sekolah TK swasta.

Kalau untuk tingkat sekolah TK menggambarkan perbandingan terbaik adalah untuk sekolah swasta, maka gambaran ini menjadi berbalik pada sekolah tingkat SD, yaitu perbandingan SD seperti jumlah sekolah antara sekolah negeri dengan swasta berbanding 8,2 : 1, untuk jumlah guru berbanding 3,1 : 1, sedangkan kondisi untuk jumlah siswa berbanding 5,2 : 1. Kondisi seperti ini menunjukkan keberhasilan program pemerintah dalam melaksanakan program SD INPRES. Bagi pihak pemerintah (atau SD) upaya mempertahankan perbandingan terbaik ini adalah memperbaiki gedung sekolah yang telah rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Bila upaya ini tidak dilakukan maka semakin banyak gedung SD yang rusak yang berarti tidak dapat dipakai atau tidak dapat ditempati, yang pada gilirannya menjadi berpengaruh pada berkurangnya jumlah daya tampung siswa. Akibat buruknya adalah anak usia sekolah SD menjadi tidak dapat tertampung secara maksimal.

Kondisi sekolah tingkat SLTP dan SLTA diantara sekolah negeri dan swasta berbanding bervariasi, artinya antara jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah siswa untuk masing-masing sekolah negeri dan swasta adalah bervariasi. Sekolah SMP Kota Jambi jumlah sekolah negeri dengan swasta berbanding 0,8 : 1, jumlah guru 1,6 : 1, dan jumlah siswa berbanding 2,7 : 1. Kondisi tersebut menunjukkan untuk gedung sekolah tingkat SMP lebih banyak dimiliki oleh sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri. Bila dilihat untuk jumlah guru dan jumlah siswa lebih banyak dimiliki oleh sekolah negeri, artinya bahwa sekolah swasta tingkat SMP kekurangan siswa. Pihak pemerintah harus memperhatikan kekurangan siswa bagi sekolah SMP swasta, dengan maksud agar SMP swasta tidak tutup. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membatasi jumlah penerimaan siswa baru di SMP negeri agar SMP swasta juga dapat memperoleh siswa baru setiap awal tahun ajaran. Bila upaya ini tidak dilakukan oleh pihak pemerintah (Diknas Kota Jambi) dapat menimbulkan kerugian bagi SMP swasta yaitu tidak kebagian secara cukup menerima siswa baru ini berakibat dapat ditutupnya sekolah SMP swasta tersebut.

Kondisi SMA negeri dan swasta menunjukkan lebih bagus kondisi SMA negeri dengan perbandingan jumlah guru 1,1 : 1, perbandingan jumlah siswa 1,2 : 1. Sedangkan perbandingan jumlah gedung sekolah menunjukkan lebih bagus SMA swasta yang berbanding seperti: 2,2 : 1. Sesungguhnya SMA swasta secara fisik siap membantu pemerintah untuk mencerdaskan anggota masyarakat melalui pendidikan, untuk itu pemerintah harus ikut membantu SMA swasta mencarikan jumlah siswa.

Keikutsertaan masyarakat dalam membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa terlihat pula melalui jalur pendidikan luar sekolah, seperti jalur pendidikan informal seperti: Lembaga kursus, Lembaga sanggar, Play Group, dan TPA. Kegiatan ini mencerminkan keinginan dan kesungguhan semua lapisan masyarakat ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah selayaknya pemerintah dan kita bersama-sama memikul beban ini dalam mencapai kemampuan masyarakat dalam daya saing global.

Kemampuan anggota masyarakat dalam daya saing global harus dapat tercermin dari hasil belajar, semakin bagus hasil belajar semakin punya kemampuan yang lebih tinggi bagi lulusannya. Berdasarkan data yang diperoleh untuk tahun terakhir bahwa dari lulusan SD, SMP, dan SLTA (SMA, SMK) menunjukkan semakin tinggi tingkat strata pendidikan di Kota Jambi semakin rendah pencapaian hasil belajar secara persentase. Rata-rata kelulusan dalam persentase tersebut adalah sebagai berikut: Rata-rata kelulusan SD = 100 %, SMP = 99,81, SMA = 79,44 %, dan SMK = 63,71.

Memperhatikan hasil belajar yang cenderung menurun dari strata sekolah terendah ke strata lebih tinggi, maka Diknas Kota Jambi harus memberikan perhatian yang lebih serius lagi dalam kaitan rencana DEPDIKNAS Jakarta memberlakukan hasil UAN untuk masing-masing mata uji dinaikan dari 3,6 menjadi 4,2. konsekuensi bagi siswa peserta UAN yang tidak dapat mencapai nilai ini adalah harus mengulang selama satu tahun lagi. Berdasarkan data tahun 2005 hasil belajar rata-rata kelulusan untuk SMA

adalah 79,44 %, berarti didapati sebesar 20,56 % siswa tidak lulus. Data ini menuntut pihak Diknas Kota Jambi dan pihak sekolah melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkecil dan bahkan menghilangkan angka ketidaklulusan siswa.

Adapun beberapa permasalahan pendidikan di Kota Jambi yang mengemuka sebagai berikut:

1. Untuk kondisi sekolah TK Diknas Kota Jambi kurang perhatian untuk membangun gedung sekolah, data terakhir tahun 2005 menunjukkan sekota Jambi hanya terdapat 2 buah sekolah TK negeri, sedangkan sekolah TK swasta terdapat 102 sekolah. Perhatian pada gedung sekolah TK dapat dituangkan dalam Program Diknas Kota Jambi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
2. Data terakhir dari tahun 2004 dan 2005 menunjukkan adanya penurunan jumlah guru untuk SMA negeri (541-532 = 9 orang), penurunan jumlah guru SMA swasta (497-479= 18 orang). Penurunan jumlah guru juga terjadi pada SMK negeri (317-284= 33 orang) dan terjadinya penurunan jumlah guru pada SMK swasta (543-452= 91 orang).
3. Kondisi fisik dari masing-masing gedung sekolah masih terdapat ruang kelas yang masih rusak baik yang rusak ringan (SD = 322, SMP = 11, SMA = 18, dan SMK = 4), dan rusak berat (SMA = 7, SMK = 1).
4. Dinas Kota Jambi belum menyelenggarakan penanganan kelompok usaha pemuda produktif;
5. Masih terlalu tinggi rasio siswa dengan guru khusus untuk tingkat SMP (41 : 1), dan rasio siswa dengan kelas (63 : 1).
6. Masih terlalu tinggi angka tidak lulus bagi SMK (36,29 %) dan SMA (20,56 %).
7. SMP belum memiliki laboratorium IPA, Biologi, dan IPS. Sedangkan SMA belum memiliki laboratorium IPA.

Kebijakan salah satu yang wajib disusun oleh suatu lembaga sebagai pedoman maupun pegangan setiap hendak melakukan kegiatan, kebijakan tersebut dapat dipedomani oleh pihak pembuatnya seperti aparat pemerintah, masyarakat atau stakeholders dalam mencapai sasaran misi dan visinya. Seperti Diknas Kota Jambi menyusun kebijakan harus mengacu pada kebijakan nasional pada UU nomor: 2 tahun 1989 tentang: Sistem pendidikan nasional yakni: Pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi serta efektifitas pendidikan. Meskipun mengacu pada kebijakan daerah yaitu UU nomor: 22 tahun 1999 tentang: Pemerintah daerah yang dijabarkan dalam PP nomor: 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom.

Ada beberapa kebijakan yang disusun oleh Diknas Kota Jambi yang berpedoman pula pada PP nomor: 19 tahun 2005, tentang: Standarisasi Nasional Pendidikan. Kebijakan tersebut berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, baik formal maupun non formal bagi warga Kota Jambi melalui penyelenggaraan pendidikan 9 tahun secara sistematis dan komprehensif;
2. Meningkatkan jumlah dan mutu tenaga pendidikan dari aspek profesional dan akademik untuk semua jenjang pendidikan;
3. Re-engineering bidang-bidang keahlian pendidikan menengah kejuruan;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan sebagai penyiapan tenaga terampil yang memiliki budaya dan berbudi pekerti yang luhur;
5. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi termasuk sistem penerimaan siswa baru (PSB) dan pendataan;
6. Mensosialisasikan perubahan komposisi perbandingan SMA dengan SMK dari 60 banding 40, menjadi 40 banding 60 kepada warga Kota Jambi;



7. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing baik formal maupun informal di bidang seni budaya daerah sehingga terwujudnya manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur guna mempertahankan dan melestarikan seni dan budaya bangsa.

Kebijakan pada pendidikan setingkat SD telah dilakukan wajib belajar 9 tahun, untuk mendukung ini dilakukan verifikasi SD di 9 (sembilan) kabupaten dalam Provinsi Jambi. verifikasi ini khusus bagi SD terpencil dan terisolir dari daerah terdekatnya. Untuk peningkatan mutu pendidikan setingkat SLTP dan SLTA sudah dilakukan Sekolah Nasional Berstandar Internasional (SNBI). Peningkatan profesionalisasi guru dilakukan dengan pendidikan formal di beberapa perguruan tinggi Jambi dan pendidikan informal di LPMP dan di luar Jambi.

Mempelajari semua data dan informasi yang disajikan dari awal maka dapat disimpulkan bahwa kondisi pendidikan di Kota Jambi pada semua elemen yang ada seperti siswa, guru, sarana, prasarana, gedung, dan tenaga kependidikan berada dalam kondisi pertumbuhan yang siap menuju mutu pendidikan seperti yang diharapkan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat pada semua lapisan di Kota Jambi.

Semua elemen pendidikan di Kota Jambi yang disebutkan tadi adalah sangat berpotensi untuk lebih dikembangkan lagi, elemen tersebut adalah: siswa masih perlu dikembangkan wawasannya untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan (IPTEK dan IMTAQ) sesuai dengan tuntutan kurikulum yang disyaratkan oleh departemen, guru masih perlu diberikan kesempatan untuk menambah kompetensi profesionalnya melalui peningkatan pendidikan informal yaitu pelatihan-pelatihan maupun pendidikan formal dengan meningkatkan strata pendidikan ke S1 maupun ke S2.

Sarana belajar maupun peralatan belajar seperti buku, alat peraga, media belajar masih perlu ditambah kuantitasnya dan lebih diberdayakan penggunaan sarana yang sudah ada. Ini bukan tidak mungkin menjadikan kondisi pendidikan di Kota Jambi menjadi lebih berkembang lagi., Prasarana pendidikan seperti gedung kelas, ruang pustaka, ruang laboratorium, ruang komputer, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang tata usaha yang sudah ada agar lebih diberdayakan lagi pemakaiannya atau pemanfaatannya, sehingga kemampuan prasarana ini dalam menunjang keberhasilan pendidikan menjadi lebih berdaya guna. Dan demikian pula dengan tenaga kependidikan seperti Kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga kebersihan, tenaga laboratotium, psikolog, tenaga komputer masih perlu digali potensikan sehingga dapat mencapai kualifikasi kompetensi dan sertifikasi yang diatur oleh Badan standar pendidikan nasional (BSPN).

### **2.7.2. Analisis Prediksi**

Berdasarkan kajian masa lalu selama periode 1995-2005 dapat diprediksi kondisi pendidikan di kota Jambi. Perkembangan penduduk yang diikuti perkembangan ekonomi semakin menuntut kuantitas dan kualitas pendidikan yang ada di kota Jambi sebagai pusat pendidikan. Persaingan yang semakin ketat dalam mencari pekerjaan, selain masyarakat menuntut kualitas pendidikan, juga differensiasi pendidikan yang tidak hanya terfokus kepada bidang tertentu saja, tetapi semakin banyak permintaan masyarakat kepada jenis pendidikan yang dibutuhkan sektor riil.

Dalam pembangunan jangka panjang sampai tahun 2025, diprediksi akan berkembang dengan pesat sekolah swasta mulai dari TK sampai ke Perguruan Tinggi. Dan untuk pendidikan negeri akan berkembang dengan pesat gedung-gedung sekolah selajan dengan perkembangan penduduk. Namun Universitas Negeri akan banyak terfokus kepada perkembangan Fakultas dan Jurusan serta melengkapi sarana dan prasarana.

Dimasa mendatang bila semua elemen pendidikan di Kota Jambi tersebut di atas dirancang dengan sungguh-sungguh dan terarah, maka dapat diprediksikan kedepan bahwa pembangunan pendidikan di Kota Jambi mampu mencapai persaingan berdaya saing global. Dalam kaitan ini beberapa persoalan yang harus diatasi adalah : pemerataan , kualitas, sarana dan prasarana serta manajemen pendidikan yang

profesional. Analisis lingkungan strategis baik internal maupun lingkungan eksternal akan membantu menganalisis prediksi kondisi pendidikan 20 tahun kedepan.

Hasil analisis lingkungan strategis dapat ditentukan posisi pendidikan kota Jambi saat ini yaitu pada posisi "*Pertumbuhan*", yang kemudian hasil analisis ini dapat dipedomani untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang Kota Jambi bidang pendidikan. Hal ini memberi gambaran bahwa sektor pendidikan sampai tahun 2025 masih mendapat posisi strategis untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## **2.8. Kesehatan**

Salah satu aspek pembangunan adalah membangun kesehatan masyarakat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Tingkat kesehatan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, yang keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Meningkatkan derajat kesehatan adalah tujuan umum dari upaya pengobatan. Arah pembangunan kota menuju masyarakat yang sehat dapat dilakukan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS). Upaya pengobatan ini dilakukan pada 3 Puskesmas Perawatan, 17 Puskesmas Induk, 37 Puskesmas Pembantu dan 20 buah Puskesmas Keliling.

### **2.8.1. Kondisi Historis.**

Selama tahun pengamatan 1995-2005, terlihat perbaikan kondisi kesehatan masyarakat kota Jambi, dimana yang tercermin dari perbaikan indikator kesehatan yaitu : Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita (AKABO, Angka Kematian Ibu (AKI), Umur Harapan Hidup (UHH), dan Angka Kematian Kasar (AKK) serta terjadi penurunan dalam jenis penyakit. Dari indikator di atas, kondisi kesehatan tahun 2005 lebih baik dari kondisi kesehatan tahun 1995. Gambaran kondisi kesehatan juga tergambar dari jumlah rumah sakit. Di kota Jambi tersedia rumah sakit : (a), Rumah sakit umum Jambi; (b), Rumah sakit KESREM 42 Gapu; (c), Rumah Sakit POLRI; (d), Rumah Sakit Budhi Graha; (e), Medica Asia; (f), mayang Medica; (g), Santa Theresia; dan (g), Jiwa Jambi.

Beragamnya pola penyakit yang ada di Kota Jambi, menuntut pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kemampuan pelayanan kesehatan melalui pengadaan obat, pengadaan dana operasional puskesmas, pengadaan alat-alat medis dan non medis untuk puskesmas. Untuk maksud tersebut, pemerintah telah melakukan perbaikan dalam peningkatan anggaran kesehatan melalui APBD.

Sementara itu, pemantauan terhadap pola penyakit menghasilkan informasi bahwa, dari sepuluh jenis penyakit terbesar yang diderita oleh masyarakat di Kota Jambi, infeksi akut saluran pernafasan bagian atas merupakan penyakit terbesar jumlah penderitanya (27,63 %). Pada tahun 1995 beberapa penyakit terbesar adalah : Inpeksi saluran penyakit bagian atas, Tukak lambung, Penyakit gusi dan jaringan periodontal, Penyakit kulit jaringan bawah kulit, Penyakit pulpa dan jaringan perifikal, Rematik, Diare, dan Scabies, Malaria Klinis dan Penyakit telinga mastoid.

Sementara pada tahun 2004, sepuluh penyakit terbesar adalah sebagai berikut : Inpeksi akut lain pernapasan atas, Penyakit lain pada sal pernapasan atas, Penyakit pada system otot dan jaringan pengikat, Penyakit kulit infeksi, Penyakit kulit alergi, Ginggivitis dan penyakit periodental, Penyakit darah tinggi, Penyakit pulpa dan jaringan periapikal, Diare / kolera, dan Asma.

Untuk menekan penyakit tersebut, diperlukan kemandirian masyarakat dalam perawatan kesehatan, terutama terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu memenuhi kebutuhannya dengan bantuan tenaga medis. Upaya telah dilakukan terhadap 24.441 keluarga beresiko lainnya dan 1.033 ibu hamil, melahirkan dan nifas yang beresiko tinggi.

Pembinaan kesehatan tidak hanya dilakukan pada kesehatan fisik semata, tapi juga terhadap kesehatan jiwa. Program kesehatan jiwa di Kota Jambi dilaksanakan pada 20 Puskesmas dengan kegiatan rawat jalan penderita, melalui pengobatan biasa di poliklinik, dan konsultasi khusus dengan dokter ahli jiwa dari rumah sakit jiwa Jambi.

Selain itu, pemberantasan penyakit menular yang mengganggu masyarakat Kota Jambi juga terus dilakukan. Penyakit menular yang masih menjadi masalah di Kota Jambi saat ini diantaranya adalah penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), diare, malaria, demam berdarah, rabies, TBC paru, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta HIV/AIDS. Penyakit demam berdarah masih endemis disebagian besar kelurahan di Kota Jambi, namun angka kesakitan dan angka kematian akibat demam berdarah cenderung menurun dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini terjadi karena cepatnya penanganan yang dilakukan setiap kali terjadi kasus demam berdarah.

Masa depan bangsa sangat tergantung pada generasi mudanya. Kondisi kesehatan mereka akan merupakan penentu kualitas masyarakat saat itu. Balita sebagai cikal bakal generasi penerus harus mempunyai kualitas prima. Maksud tersebut dapat terlaksana jika kondisi gizinya cukup baik. Perlu dilakukan upaya seperti: mengetahui secara dini keadaan gizi balita, dan bila terjadi ancaman terhadap keadaan gizi masyarakat (Balita) segera dilakukan tindakan penanggulangan secara cepat dan tepat, serta mencari tahu dan menentukan tindakan yang diperlukan. Status gizi Balita dapat diketahui dengan cara mengukur sampel balita di semua Kelurahan (80 %) dan penimbangan bulanan Balita di Posyandu.

Dampak krisis ekonomi yang terjadi telah menimbulkan persoalan baru terhadap bidang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera. Indikator ini dapat dilihat melalui peningkatan keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Pada tahun 1997 jumlah keluarga pra sejahtera 4.284 kepala keluarga, pada tahun 2001 meningkat menjadi 5.121 kepala keluarga ( bertambah 19,54%); Kelompok Keluarga Sejahtera I dari 18.745 KK pada tahun 1997 menjadi 19.827 KK pada tahun 2001, meningkat 5,77 %.

Untuk menanggulangi masalah kesejahteraan ini, upaya yang dilaksanakan antara lain adalah program TAKESRA dan KUKESRA sebagai upaya pemberdayaan potensi ekonomi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Pada tahun 2001 masyarakat Kota Jambi yang mengikuti KUKESRA dan TAKESRA telah berkembang yaitu sebanyak 238 kelompok kegiatan dengan jumlah anggota kelompok 6.444 orang. Jumlah dana pinjaman sebesar Rp. 1,591 milyar, atau 46,90% dari Rp 3,375 milyar PPM yang tersedia. Sedangkan angsuran pengembalian pinjaman mencapai Rp 1,361 milyar atau 85,06% dari realisasi dana pinjaman.

Dampak krisis ekonomi telah meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat kota Jambi. Untuk mengurangi dampak tersebut, program Jaring Pengaman Sosial (JPS – Social Safety Net) masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Program JPS meliputi beberapa bidang yaitu: Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras, JPS Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Program Penanggulangan Dampak Pengurangan Subsidi Energi (PPDPSE). Program OPK beras secara kumulatif telah menyalurkan sebanyak 1.612.035 Kg beras kepada 174.875 KK yang menjadi sasaran di Kota Jambi. Sementara itu JPS Bidang Kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan Pelayanan kebidanan dasar dengan dana Rp.98,393 juta; Pelayanan Kesehatan dasar Rp.177,306 juta, Perbaikan Gizi Rp 269,83 juta, Revitalisasi Posyandu Rp.203,500 juta, Pencegahan Penyakit menular Rp. 72,082 juta.

Dalam hubungan dengan pelayanan kesehatan sudah dilaksanakan pada periode 1995-2005 yang terlihat dari :

1. Jumlah Ibu Hamil (Bumil) dari Gakin yang tercatat sampai dengan akhir bulan Desember 2004 sebanyak 541 orang atau (4,07) dari jumlah Gakin yang ada. Ibu Hamil tersebut yang mendapatkan pelayanan antenatal care oleh petugas kesehatan sebanyak 486 orang 989,83%.

2. Jumlah ibu yang bersalin (Bulin) dari Gakin yang tercatat sebanyak 267 orang, 223 diantaranya atau 83,52% mendapatkan pertolongan persalinan dari petugas kesehatan.
3. Jumlah Ibu Nifas (Bufas) dari Gakin sebanyak 323 orang, jumlah Bufas beserta bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 323 atau 100%.
4. Jumlah Bumil/Bulin/Bufas dari Gakin yang dirujuk ke Puskesmas atau Rumah Sakit oleh Bidan sebanyak 112 orang (20,07%) sedangkan yang di rujuk ke Rumah Sakit oleh Puskesmas sebanyak 41 orang (7,57%).

Dalam hubungan dengan pelayanan perbaikan gizi masyarakat telah dilakukan pemerintah dengan cara :

1. Jumlah Bumil dan Bufas dan Gakin yang tercatat menderita Kurang Energi Kronis (KEK) sebanyak 202 orang, 191 orang atau 94,55% diantaranya mendapatkan paket Pemberian Makanan Tambahan (PMT) selama 90 hari dengan unit cost Rp.1.250,- per paket/hari. Komposisi zat gizi terdiri dari Energi 600 – 700 Kkal, Protein 15-20 Gram.
2. Jumlah bayi (umur 6-11 bulan) yang ada 490 anak, yang mendapatkan paket PMT Pemulihan sebanyak 238 anak (48,57%), selama 180 hari dengan unit cost Rp.1.000,- per paket/hari. Komposisi zat gizi energi 360-430 Kkal, Protein 10-15 Gram.
3. Jumlah anak (umur 12-23 bulan) yang ada 907 anak, yang mendapatkan paket PMT Pemulihan sebanyak 620 anak (68,35%), selama 90 hari dengan unit cost Rp.1.000,- per paket/hari, komposisi zat gizi energi 360-430 Kkal.
4. Jumlah anak (umur 24-59 bulan) dari Gakin tercatat sebanyak 2.683 anak, yang mendapatkan paket PMT Pemulihan sebanyak 1.572 (58,59%), selama 52 hari, dengan unit cost Rp.1.000,- per paket/hari, komposisi zat gizi energi 360-430 Kkal, Protein 9-11 Gram.

### **2.8.2. Analisis Prediksi**

Untuk memprediksi tingkat kesehatan sampai tahun 2025 memerlukan seperangkat data masa lalu yang lengkap. Tetapi paling tidak dapat digambarkan bahwa makin membaiknya tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat maka semakin baik tingkat kesehatan. Namun hal ini akan berjalan dengan beberapa asumsi antara lain : (a), sebagian dari pendapatan digunakan untuk pengeluaran kesehatan; dan (b), kesehatan yang sehat harus didukung oleh motivasi kerja yang tinggi.

Perkembangan penduduk dan ekonomi juga harus diwaspadai karena dapat membawa dampak negatif kepada tingkat kesehatan. Eksploitasi sumber daya alam akan berdampak kepada pencemaran lingkungan hidup dan pada gilirannya meningkatkan penyakit kepada masyarakat kota Jambi. Demikian juga semakin ketatnya persaingan dalam aktivitas ekonomi menyebabkan tingkat stress semakin tinggi yang juga merupakan penyebab meningkatnya penyakit. Untuk itu diperkirakan kesehatan masyarakat masih menjadi prioritas yang harus diatasi pemerintah. Semakin tinggi perkembangan ekonomi akan semakin banyak jenis penyakit yang datang. Jadi pelayanan kesehatan menjadi sentral dalam pembangunan kesehatan di Kota Jambi.

Sampai tahun 2025, beberapa persoalan pembangunan bidang kesehatan adalah :

1. Masih adanya perbedaan persepsi dalam penetapan kriteria Gakin penerima manfaat Kartu Sehat, terutama terhadap pasien yang berobat di Rumah Sakit Raden Mattahir. Hal ini pasien yang menjalani operasi karena tidak mampu menanggung biaya, oleh pihak rumah sakit terhadap keluarga pasien dianjurkan mengurus Kartu Sehat ke Puskesmas-puskesmas dan Kelurahan. Sebenarnya secara obyektif yang bersangkutan tidak termasuk kedalam kriteria Gakin penerima Kartu Sehat JPS-BK.

- 2 Adanya keraguan dan Ketakutan dari pihak kepala Puskesmas dan Bidang dalam hal pemanfaatan dana JPS-BK yang telah diterimanya. Hal ini terlihat ada beberapa Puskesmas dan Bidan yang masih kecil pemanfaatan dana JPS-BK.

## 2.9. Tata Ruang

Perencanaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memformulasikan rangkaian kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan untuk mencapai masa depan yang dicita-citakan, dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. Persoalan yang sering dihadapi dalam proses penyusunan rencana adalah tidak semua orang dapat memahami kondisi masa akan datang yang telah diformulasikan secara terukur, sehingga dalam operasionalisasinya tim penyusunan rencana akan terus didebat, dikritik “perlu tidaknya” suatu perencanaan.

Selain itu, para penyusun rencana sering dihadapkan dengan akurat atau tidaknya suatu perencanaan, karena dari pengalaman selama ini hasil perencanaan lebih bersifat pada “penjelasan-penjelasan pembangunan” dan bukan secara langsung menjelaskan tata aturan pelaksanaan pembangunan dan keterlibatan *stakeholders* untuk mencapai tujuan perencanaan. Sehingga pada akhirnya fungsi Buku Rencana hanya sebagai pengaman administratif, memperbanyak koleksi literatur dan bahan memenuhi lemari kaca. Salah satu produk perencanaan adalah persoalan *tata ruang*.

### 2.9.1. Kondisi Historis

Sejalan dengan keadaan di atas, Rencana Tata Ruang Kota Jambi yang telah disusun dan “dioperasionalisasikan” selama ini, tidak terlepas dari kondisi yang disebutkan di atas, sehingga pemaknaan dan pengaktualisasian hasil perencanaan dalam tatanan pembangunan kota sering berdimensi lain dan konsekuensinya adalah penyimpangan terhadap rencana yang telah diperdakan.

Perkembangan dan seluruh aktivitas penduduk akan membutuhkan dan menuntun ketersediaan ruang, namun disisi lain Rencana Tata Ruang yang telah disusun tidak dioptimalkan penggunaannya. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Bangunan. Dari seluruh kondisi yang disampaikan di atas, akan dicoba membedah Rencana Tata Ruang Kota Jambi yang dapat dipergunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi (2005-2025).

1. Luas Kota Jambi sekitar 20.536 Ha, dengan lahan yang potensial dikembangkan sebagai daerah terbangun 13.071 Ha atau 63,64%, yang kurang potensial dikembangkan 5.732,36 Ha atau 27,91%, dan danau serta rawa seluas 1.734,64 Ha atau 8,45% (*Hasil Analisis Tim evaluasi Rencana tata Ruang Kota Jambi, Tahun 2000*).
2. Dalam operasionalisasi pemanfaatan ruang, Kota Jambi dibagi menjadi 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota (BWK) yaitu:
  - a. Bagian Wilayah Kota A (BWK-A), dominasi pemanfaatan lahan adalah permukiman, pendidikan, kebudayaan, ruang terbuka hijau, konservasi, dengan luas keseluruhan 3.234 Ha.
  - b. Bagian Wilayah Kota B (BWK-B), dominasi pemanfaatan lahan adalah permukiman, perkantoran/pemerintahan kota, perdagangan, pompa minyak, cadangan pengembangan kota, TPA dan pergudangan dengan luas areal 3.307 Ha.
  - c. Bagian Wilayah Kota C1 (BWK-C1), dominasi pemanfaatan lahan adalah perkantoran/pemerintahan (Provinsi), permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa, rumah sakit, ruang terbuka hijau, hutan kota dengan luas areal 2.883 Ha.

- d. Bagian Wilayah Kota C2 (BWK-C2), dominasi pemanfaatan lahan adalah permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan pompa minyak, konservasi, cadangan pengembangankota, dengan luas keseluruhan 5.401 Ha.
  - e. Bagian Wilayah Kota D1 (BWK-D1), dominasi pemanfaatan lahan sebagai ruang terbuka hijau, konservasi, industri, pergudangan, rawa dengan luas areal 1.669 Ha.
  - f. Bagian Wilayah Kota D2 (BWK-D2), dominasi pemanfaatan lahan sebagai industri, pergudangan, bandara, Taman Rimbo Aneka Ria, ruang terbuka hijau, cadangan pengembangan kota dengan luas areal 2.207 Ha.
  - g. Bagian Wilayah Kota E (BWK-E), dominasi pemanfaatan lahan sebagai perdagangan, jasa, permukiman, dengan luas areal 1.837 Ha.
3. Dalam Skala Regional Kota Jambi mengemban fungsi sebagai (a). Pusat Pelayanan Wilayah, (b). Pusat Komunikasi dan Transportasi antarwilayah, (c). Pusat Kegiatan Industri/Perekonomian, (d). Pusat Permukiman dan (e). Pelabuhan Sungai/Laut.
  4. Sejalan dengan pelayanan skala regional di atas dan dikaitkan dengan skala pelayanan lokal (internal), Kota Jambi dipersiapkan untuk dapat mengemban fungsi yaitu: (a). Pusat perdagangan dan Jasa, (b). Pusat Pemerintahan, (c). Pusat Industri, (d). Pusat Pelayanan Sosial, (e). Pusat Budaya, (f). Simpul Jasa Transportasi Wilayah dan Antar wilayah, dan (g). Pusat permukiman.
  5. Rencana Sistem Pelayanan Transportasi akan dikembangkan adalah jaringan jalan raya (dengan fungsi dan peranannya sebagai jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan, jalan utama dalam kota), sistem terminal (dalam kota, AKDP, AKAP, barang/truk), sistem angkutan umum, transportasi sungai/laut dan transportasi udara.
  6. Prinsip dasar pengembangan tata ruang Kota Jambi, yang dituangkan dalam RUTR sebagai berikut:
    - a. Pada kawasan tepian Sungai Batanghari (sempadan atau bantaran sungai) dilakukan pembatasan terhadap pengembangan fisik terbangun, dan dengan demikian juga pada kawasan-kawasan sekitar danau dan rawa (*retarder*).
    - b. Pengembangan fisik atar banguan (*built up areas*) diarahkan pada lahan-lahan yang masih kosong dan layak (kesesuaian dan kemampuan lahan), terutama ke bagian selatan Kota Jambi (Kotabaru dan Jambi Selatan).
    - c. Intensifikasi pemanfaatan lahan diarahkan pada Kawasan Pusat Kota dengan fungsi utama sebagai kegiatan bisnis untuk mencirikan *Central Business Distric* (CBD).
    - d. Untuk mendukung dan mengarahkan ekspansi dan ekstensifikasi fisik terbangun, direncanakan pengembangan prasarana dan sarana pada kawasan yang menjadi areal penajajaran perkembangan.

Permasalahan pembangunan dalam hal tata ruang banyak berhubungan dengan pemanfaatan ruang yang ada. Atau tata guna lahan. Kota Jambi yang termasuk dalam kategori kota kecil (jumlah penduduk lebih kecil dari 500.000 jiwa), menunjukkan perkembangan yang relatif tinggi yang lebih dominan didorong oleh kegiatan *Hinterland* dan sangat sedikit didorong oleh kegiatan *foward* ke kota-kota besar lainnya. Dengan demikian fungsi-fungsi yang menjadi perhatian besar adalah fungsi pelayanan ke daerah belakangnya. Situasi perkembangan terakhir, dalam pelaksanaan pembangunan selama ini, fungsi pelayanan *hinterland* ini seolah-olah terabaikan, sehingga pemerintah lebih menfokuskan kepada pelayanan jasa skala besar seperti kepariwisataan, perdagangan skala besar (plaza-mall) dengan mengabaikan pasar induk dan pusat perdagangan hasil-hasil pertanian.

Dalam kaitannya dengan fungsi internal "sendiri" Kota Jambi, sangat tidak memiliki komitmen yang kuat untuk penyediaan infrastruktur dan utilitas umum, sehingga

dalam kondisi sekarang saja banyak keluhan kemacetan ditempat tertentu dan banjir (air tergenang). Pertanyaan yang timbul bagaimana untuk kondisi mendatang (20 tahun).

Dalam operasionalisasi pembangunan Kota Jambi, tampak jelas bagi kita, bahwa dengan kategori kecil saja kita sudah mendapat cercaan dari berbagai pihak dan para LSM tentang pembangunan fisik kota, seperti WTC, Hotel Abadi, Pembangunan Pasar Angso Duo, dan lain-lain. Dari kondisi di atas, walaupun rencana tata ruang kota Jambi sudah disusun, tampak jelas bagi kita bahwa dalam seluruh rangkaian pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini dengan segala permasalahannya, memperlihatkan kepada kita bahwa” Pembangunan Kota Jambi Miskin Inovasi”.

Pola pelayanan Kota Jambi lebih cenderung dikatakan mengikuti pola pelayanan konstntrik, dalam pengertian lain adalah pelayanan sangat terpusat disatu *focal point* atau pada pusat kota, belum mengikuti hasil rekomendasi RUTRK, yaitu dalam menunjang fungsi dan peranan kota Jambi masa akan datang perlu didukung oleh banyakpusat (*multiple nuclei*).

Sebagaimana dalam RUTRK, Kota Jambi akan dilayani oleh 7 (tujuh) Bagian Wilayah Kota lengkap dengan pusat-pusat pelayanannya, hal ini masih akan mengalami kesulitan untuk diterapkan, karena pusat-pusat pelayanan masih diorientasikan terus di pusat CBD. Hal ini akan berlanjut terus bila tidak diterapkan tata aturan disaat penggunaan lahan memohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perlu intervensi aktif dari Pemerintah Kota.

Pusat-pusat pelayanan kota dengan skala kecil, sudah mulai tumbuh yang tidak sesuai rencana kota, sehingga pusat-pusat tersebut mengakibatkan dan melimpahkan dampak terhadap pembebanan jalan, sementara disisi lain pusat-pusat lingkungan yang direncanakan tidak atau belum dapat tumbuh sebagaimana yang diharapkan.

Pola Sirkulasi (jaringan transportasi, drainase, telepon, listrik, air minum, air limbah dan utilitas umum lainnya) belum tertata secara optimal termasuk bila dilihat dari tata jenjang pelayanannya (*hierarchy*). Demikian juga terminal pembantu untuk setiap penggal/route/jalur transportasi dalam kota, belum tersedia.

Dalam skala teknis konstruksi, bangunan-bangunan baru telah membuat atau membentuk ketinggian lahan (timbunan) melebihi kemampuan pengaliran air secara alami, sehingga aliran (*flow*) air akan tergantung untuk daerah yang paling rendah akan terjadi penggenangan. Danau dan sebagian daerah yang selama ini menjadi areal penampungan air pada saat musim penghujan (*retarder*) telah ditimbun menjadi bangunan yang *massive* tidak lulus air.

Dalam skala kota, belum tampak struktur daerah terbuka hijau yang berjenjang, sehingga dalam keterbatasan yang ada areal terbuka hijau dipersiapkan adalah pulau-pulau jalan, persimpangan jalan, tepi sungai, tepi danau. Konsekuensi dari kondisi ini adalah tempat dan taman bermain untuk anak-anak menjadi terbatas, dan demikian juga untuk paru-paru kota.

### **2.9.2. Analisis Prediksi**

Memperhatikan pesatnya perkembangan Kota Jambi dapat diperkirakan pembangunan sering melanggar aturan dari pemanfaatan tata ruang yang sudah disepakati melalui peraturan daerah. Pola pelayanan jaringan jalan yang ada tidak akan mampu lagi menampung volume lalu lintas pada masa-masa mendatang. Hal ini terlihat dari pembangunan jalan yang ada sekarang tidak didasarkan pada rencana yang telah disusun. Ditelaah dari sisi *Urban Design*, problem pembangunan Kota Jambi dapat dilihat dari persoalan orientasi kota, ketinggian bangunan (*sky line*), muka bangunan, orientasi bangunan, *land mark* kota Jambi, dan lain-lain

Khusus mengenai Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Bangunan, banyak klasual yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Walikota, belum dapat diwujudkan seperti perpakiran, pembangunan sampah, penanggulangan kebakaran, sempadan sungai, danau dan rawa, pembuatan jalan masuk, dsb. Sehingga keadaan ini membawa nuasa ketetapan yang menggantung

“banci” dan membuka interpretasi yang berbeda antara fasilitator masyarakat pengguna ruang. Kelemahan dalam operasionalisasi ketentuan dan peraturan bangunan, sangat dominan menentukan ketidakberhasilan perwujudan Rencana Tata Ruang Kota.

Kendala lain dalam pengembangan kota untuk mengejar bentuk struktur kota yang diinginkan adalah pola kepemilikan lahan yang luas oleh para “tuan tanah”, yang nota bene tidak kena PBB, mengakibatkan perkembangan kota akan mengikuti lompat katak.

Dalam mengukur perkembangan kota (berhasil atau tidak) atau barometer suatu pembangunan kota terutama dalam lingkup pemerintahan adalah realisasi APBD. Hal ini sulit untuk dipertanggung jawabkan dan sulit disatu padukan dalam mendukung perwujudan pembangunan kota yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam RUTRK.

Kota Jambi memiliki prospek perkembangan yang tinggi, selain fungsi-fungsi dominan yang menjadi tulang punggung utama yang akan ada dan dipersiapkan, kota ini sangat didukung oleh kekuatan daerah belakang berupa daerah pertanian, perkebunan, hasil hutan, pertambangan dan potensi kepariwisataan.

Disisi lain Kota Jambi memiliki daya tarik yang kuat dalam memperoleh limpahan perkembangan dari kota Jakarta, Batam, Singapura dan Malaysia. Demikian juga dari daerah perbatasan provinsi dapat diperoleh dari sebagian kecil Provinsi Riau (Rengat-Pekanbaru atau Rengat-Jambi), dan Provinsi Sumatera Selatan (Bayung Lincir-Palembang atau Bayung Lincir-Jambi).

Kota Jambi sebagai kota utama di Provinsi Jambi, akan menjadi pusat informasi dan komunikasi skala regional. Perkembangan ini akan melahirkan berbagai kegiatan ikutan yang perlu diantisipasi terutama dalam pemanfaatan tata ruang. Perkembangan pembangunan permukiman yang dilakukan oleh developer, perusahaan tertentu dan individu, memperlihatkan perkembangan yang cukup baik, demikian juga perkembangan pusat-pusat perkantoran swasta.

## **2.10. Prasarana Jalan dan Transportasi**

Pembangunan jalan mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan dengan mobilitas barang dan manusia. Berdasarkan UU SPPN perencanaan pembangunan jangka panjang daerah ditentukan untuk kurun waktu 20 tahun. Selama kurun waktu tersebut, pembangunan jangka panjang daerah diarahkan untuk mewujudkan Kota Jambi yang maju, dengan mampu membangun prasarana jalan yang dapat mewujudkan pelayanan transportasi prima sebagai bagian dari tahap pembangunan pada masa mendatang yang merupakan bagian integral dari pembangunan provinsi Jambi dan nasional menuju masyarakat adil dan makmur dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kendala yang dihadapi sektor transportasi jalan pada umumnya meliputi aspek kapasitas, kondisi jalan, jumlah/kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana fisik; kelembagaan dan peraturan; sumberdaya manusia, teknologi, pendanaan, serta manajemen, operasi dan pemeliharaan jalan sendiri.

### **2.10.1. Kondisi Historis**

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini terutama periode 1995-2005 telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, sosial budaya dan kehidupan beragama, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, ketentraman dan ketertiban hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

Salah satu yang terpenting adalah menurunnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk Kota Jambi

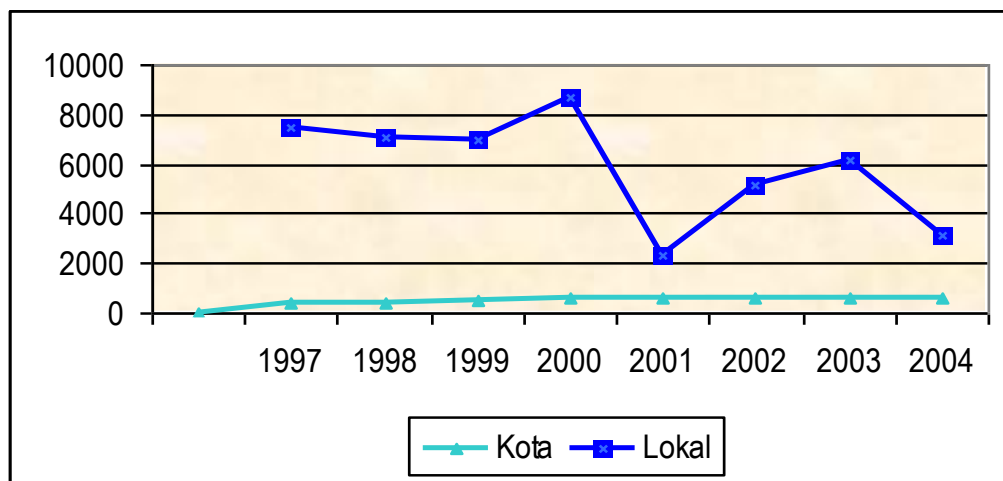


sampai tahun 2004 cukup tingginya prosentase jalan yang rusak dan rusak berat ini tidak terlepas dari akibat pembebanan muatan lebih (*excessive over loading*) terutama yang disebabkan oleh masih banyak pergudangan yang berlokasi di dalam kota, sehingga truk dengan tonase tinggi beralasan masuk ke kota yang tentunya berakibat hancurnya jalan sebelum umur teknis jalan tersebut tercapai.

Dengan cukup tingginya persentase jalan yang rusak dan rusak berat tersebut, maka ke depan Pemerintah Kota Jambi harus tetap memprioritaskan perbaikan dan peningkatan prasarana jalan seluruh wilayah Kota Jambi. Disamping itu untuk mendorong pengembangan wilayah, pembangunan prasarana transportasi jalan yang merupakan urat nadi perekonomian ini harus terus ditingkatkan. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus meningkat membutuhkan prasarana jalan yang terus meningkat pula. Dan jumlah kendaraan yang juga meningkat dengan pesat.

Pembangunan prasarana transportasi mengalami kendala sejak pelaksanaan desentralisasi yang berpengaruh pada pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi. Hal ini karena terbatasnya dana pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Kota Jambi memiliki tiga Terminal dimana 1 terminal Tipe A dan 2 Terminal Tipe B. Perkembangan angkutan umum juga terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk. Dari tahun 1997 – 2005 tercatat 46,94 Km dan Jalan Provinsi sepanjang 41,29 Km. Sedangkan untuk jalan Kota dan lokal perkembangannya dari tahun 1997-2005 sebagaimana pada terlihat pada gambar.



Gambar 2.11. Panjang Jalan di Kota Jambi berdasarkan Status jalan Tahun 1997-2005

Sementara itu dimasa datang untuk mendukung pergerakan barang dan jasa sangat perlu dibangun dan dikembangkan jalur angkutan sungai serta dermaga dan pos pengawas untuk memperlancar angkutan sungai, sehingga dapat mengurangi kepadatan angkutan jalan darat

Pesatnya aktivitas pembangunan di perkotaan telah membawa dampak yang negatif baik secara fisik (penurunan kualitas lingkungan, konversi lahan pertanian) maupun permasalahan sosial ekonomi. Untuk ke depan Kota Jambi harus mengantisipasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan di perkotaan tersebut. Dampak tersebut antara lain adalah: (1) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan telah dilakukan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alamnya sehingga menurunnya kualitas lingkungan fisiknya dan timbulnya polusi; (2) meningkatnya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri; (3) terjadinya penurunan kualitas hidup

masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial- ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan.

Peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan (*trickling down effects*), justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan (*backwash effects*), sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa di Kota Jambi untuk tata ruang transportasi ini memerlukan pemikiran serius.

### **2.10.2. Analisis Prediksi**

Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian daerah 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang lebih maju.

Kemajuan teknologi di abad informasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan kelancaran transportasi penduduk Kota Jambi, tantangan yang dihadapi adalah menyediakan infrastruktur transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri, serta pergerakan penumpang dan barang dan jasa yang sesuai dengan perkembangan/pertambahan jumlah kendaraan

## **2.11. Hukum dan Pemerintahan**

Perbaikan hukum menjadi sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, karena dengan hukum akan tegak keadilan, tidak ada lagi kekuasaan yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Demikian juga dengan aspek pemerintahan, yang harus dideregulasikan sehingga peraturan-peraturan akan mendorong efisiensi dan produktivitas kerja yang pada gilirannya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.

### **2.11.1. Kondisi Historis**

Dalam periode 1995-2004 terlihat indikasi belum tegaknya hukum dalam pembangunan, karena diperkirakan masih banyak pelanggar-pelanggar hukum dapat bebas bergerak. Dan dari aspek pemerintahan dapat dikatakan belum bekerja secara efisien dan efektif. Hal ini terlihat dari kurangnya kinerja beberapa dinas terkait dalam mengimplementasikan perencanaan yang sudah disepakati. Demikian juga dengan belum tegaknya demokrasi.

Sejak bergulirnya reformasi pada akhir tahun 1997, perkembangan pembangunan politik dan hukum di Indonesia dan juga kota jambi cenderung semakin demokratis. Kondisi ini telah diperkuat pula dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan di tingkat pusat yang meliputi UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Di Kota Jambi, gerakan reformasi telah menghasilkan berbagai kemajuan dibidang politik ditandai dengan antara lain : meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, baik dalam Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada Gubernur Jambi. Beberapa hal perkembangan yang perlu dicatat adalah : (a) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai aktifitas penentuan kebijakan publik; (b) meningkatnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan; (c) berkembangnya kesadaran akan prinsip-prinsip profesionalisme dan keterwakilan dalam penentuan pejabat politik dan pejabat publik; (d) meningkatnya jumlah media massa maupun akses masyarakat terhadap media massa, baik media elektronik maupun media

massa cetak; (e) Organisasi kemasyarakatan dan LSM semakin meningkat, baik jumlah maupun fungsinya. Di samping kelembagaan politik yang semakin kuat eksistensinya di dalam masyarakat.

Berbagai permasalahan bidang politik yang masih dirasakan. Rendahnya pengetahuan dan wawasan politik masyarakat, yang berdampak pada rendahnya budaya politik demokratis, budaya beda pendapat. Disamping itu masih kuatnya pengaruh budaya politik pragmatis dan kurang berkembang budaya politik yang idealis. pemahaman otonomi daerah yang belum utuh membawa berbagai implikasi politik yang bersifat lokal sehingga sikap nasionalisme dan wawasan kebangsaan kurang berkembang secara baik;

Tantangan dalam pembangunan politik ke depan adalah: (a), peningkatan pembangunan proses politik yang berkualitas; (b), peningkatan budaya politik yang demokratis; (c), pengembangan wawasan kebangsaan; (d), pengembangan informasi dan komunikasi yang mampu meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam kehidupan politik.; (e), kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam mengantisipasi proses demokratisasi ini perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan kualitas yang prima dari kinerja kelembagaan pemerintah daerah.

Revolusi teknologi dan informasi akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-government*, dan *cyber law* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

Bidang Hukum dan Tata Tertib beberapa PHI yang perlu di catat seperti adanya Upaya menjadikan hukum sebagai panglima dalam pembangunan di segala bidang sampai saat ini ternyata masih banyak menemui kendala, baik berenaan dengan substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum. Disamping itu masih tingginya angka pelanggaran hukum dan tramtib, mencerminkan begitu sulitnya melakukan pembangunan dibidang ini.

Seiring dengan penguatan otonomi daerah, peraturan perundang-undangan daerah mempunyai posisi strategis, karena banyak kepentingan serta aktifitas kemasyarakatan dan pemerintahan ditata melalui peraturan perundang-undangan daerah. Kendati demikian, banyak persoalan yang ditemui berkenaan dengan antara lain : *Kelemahan proses*, yang meliputi : (a), belum terbentuknya Program legislasi daerah; (b), belum melalui naskah akademik; (c), kurang melibatkan masyarakat. *Kelemahan substansi*, berupa: (a) Kurang memperhatikan sinkronisasi, baik vertikal maupun horizontal; (b) kurang berpihak kepada kebutuhan hukum masyarakat; (c) Berorientasi pada pendapatan daerah dengan mengandalkan sumberdaya alam, Pajak dan retribusi. *Kelemahan legal drafter*, seperti: (a) ketidakmampuan membangun konsesus dan sinergi di antara kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat; (b) kurangnya jumlah dan kemampuan *legal drafting*

### **2.11.2. Analisis Prediksi**

Pembangunan politik pada masa yang akan datang tentunya akan mengarah pada lebih demokratis, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi hukum dan HAM, dilakukan melalui penataan proses politik, pengembangan budaya politik, penguatan kapasitas kelembagaan politik masyarakat serta peningkatan peran komunikasi dan informasi. Hal ini ditunjang dengan peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka aspiratif dan adil dengan memperhatikan prinsip kapabilitas dan keterwakilan dalam penentuan pejabat politik dan pejabat publik; . dan juga adanya pengembangan budaya politik dititikberatkan pada peningkatan wawasan politik masyarakat, dan proses penanaman secara dini nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang dilakukan melalui pendidikan politik kepada masyarakat, baik melalui pendidikan formal dan nonformal.

Disamping itu akan makin meningkatnya *kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas politik masyarakat* melalui jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul, menyuarakan pendapat sesuai dengan aspirasi politiknya masing-masing. *Peningkatan peranan komunikasi dan informasi* ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik. Hal ini ditandai dengan peranan pers yang semakin besar meningkatkan akses masyarakat terhadap pers.

Dalam aspek Pemerintahan daerah akan makin berkembangnya tuntutan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *baik pada tatanan kualitas: kelembagaan dan aparat* daerah maupun kearah peningkatan fungsi pelayanan birokrasi dan akuntabilitasnya secara transparan, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan melalui.

Berbagai hal di atas tentunya harus diupayakan peningkatan pembiayaan pembangunan daerah melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah. Pengutan dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Daerah diarahkan pada upaya pembentukan sistem hukum daerah yang mampu berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban, keadilan, kesejahteraan, dan sarana untuk melakukan pembangunan, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, dan budaya budaya hukum.

Pembentukan materi hukum dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, agama dan kepentingan masyarakat luas, hirarki peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum universal, yang dilakukan secara terencana melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk mendukung terlaksananya perlindungan, pelayanan serta tegaknya hukum secara konsekuen dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan aparat yang berkualitas. Pengembangan budaya hukum diarahkan pada terciptanya ketaatan dan penghormatan terhadap hukum HAM, dilakukan melalui: peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan sejak usia dini; Pembangunan Trantib diarahkan pada terwujudnya kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta tegaknya hukum, sehingga tercipta situasi yang kondusif bagi pembangunan, diupayakan melalui penataan sistem keamanan, peningkatan kualitas aparat serta sarana prasarana keamanan, dan dengan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan efektif. Penataan keamanan masyarakat dilakukan melalui pengembangan sistem kemitraan antara institusi keamanan, pemerintah daerah dan masyarakat. Peningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan trantib dicapai dengan cara: Peningkatan kualitas aparat serta sarana dan prasarana Trantib.

## **2.12. Pengembangan Teknologi Informasi**

Pemberlakuan sistem perdagangan bebas dalam bentuk blok perdagangan regional maupun global (*global trade*), kemajuan teknologi (*technology progress*), dan perubahan dalam sistem kemasyarakatan (*society system*) merupakan tiga fenomena utama di abad ke-21 yang diprediksi akan berperan penting dalam peningkatan intensitas persaingan antarwilayah (*interregional competition*). Dalam era tersebut, eksistensi suatu wilayah ditentukan oleh kemampuannya dalam membangun basis keunggulan yang mampu mengantarkan wilayah tersebut memenangkan persaingan antarwilayah sebagai langkah awal untuk memenangkan persaingan pada tataran global (*global competition*). Dalam konteks perencanaan pembangunan Kota Jambi, persoalan yang dihadapi adalah bagaimana mencari konsep pembangunan yang paling mampu mengantarkan Kota Jambi memenangkan persaingan tersebut. Konsep pembangunan yang direncanakan harus dapat memberikan gambaran arah dan tahapan proses pembangunan yang bermuara pada penciptaan "keunggulan dayasaing wilayah yang berkelanjutan" (*sustainable regional competitive advantage*).

Penciptaan keunggulan dayasaing wilayah yang berkelanjutan merupakan paradigma baru dalam konsep pembangunan wilayah. Paradigma ini menuntut peningkatan

aksesibilitas wilayah terhadap perubahan teknologi, sehingga paradigma ini lebih dikenal sebagai konsep pembangunan wilayah berbasis teknologi (*technology-based regional development*). Konsep ini didasarkan pada pendekatan kontribusi teknologi dalam pembangunan suatu wilayah (Hadi dan Noviandi, 1999).

Terdapat empat bidang teknologi yang diprediksi akan menjadi pendorong utama perubahan di abad ke-21, yaitu: teknologi informasi, material, genetika, dan energi (Coates, et al., 1996). Untuk Kota Jambi yang memiliki visi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan, teknologi yang dibutuhkan untuk membangun basis keunggulan wilayah adalah teknologi yang mampu menopang pertumbuhan industri jasa dan perdagangan di Kota Jambi, sekaligus menjadikannya sebagai lapisan inti (*core layers*) dari kompetensi inti (*core competence*) Kota Jambi. Dalam hal ini, teknologi yang paling memungkinkan untuk mendorong pertumbuhan industri jasa dan perdagangan di Kota Jambi pada abad ke-21 adalah teknologi informasi.

Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan teknologi telekomunikasi sebagai penyalur informasi dan teknologi komputer sebagai pemroses/pengemas informasi. Teknologi informasi juga dikenal dengan istilah telematika sebagai sinergi antara telekomunikasi, informatika, dan multimedia.

Makalah ini berupaya memaparkan posisi dan peran teknologi informasi dalam pembangunan jangka panjang Kota Jambi, serta gambaran arah dan program pembangunan jangka panjang bidang teknologi informasi di Kota Jambi. Paparan ini didasarkan pada visi untuk menjadikan Kota Jambi sebagai Kota Multimedia.

Peran teknologi informasi (TI) dalam pembangunan jangka panjang dapat dikaji dari kontribusi TI dalam penciptaan keunggulan daya saing Kota Jambi. Kontribusi tersebut dapat ditelusuri dari peran TI dalam pembentukan kompetensi inti Kota Jambi. Kompetensi inti merupakan proses pembelajaran kolektif yang terkait dengan upaya untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan teknologi ke dalam sektor-sektor unggulan (*core layers*) yang berkembang dalam suatu wilayah. Semakin baik koordinasi dan integrasi tersebut, semakin tinggi pula tingkat kedewasaan atau kematangan wilayah, sehingga sulit bagi daerah lain untuk menyainginya (Widiati, et al, 1999).

### **2.12.1. Kondisi Historis**

Pembentukan kompetensi inti Kota Jambi memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari pembangunan pelabuhan Boom Batu pada tahun 1926. Pembangunan pelabuhan tersebut membuka akses yang sangat tinggi bagi perdagangan lokal, regional, maupun internasional di Kota Jambi (Budihardjo, 2001), sehingga menjadikan Kota Jambi sebagai pelabuhan koleksi dan distribusi bagi komoditas perkebunan yang dihasilkan oleh masyarakat Jambi.

Peningkatan aktivitas pelabuhan koleksi dan distribusi menuntut adanya sistem administrasi dan manajemen keuangan yang menciptakan kompetensi jasa keuangan dan perdagangan di Kota Jambi. Gabungan kompetensi pelabuhan dengan jasa keuangan dan perdagangan menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan (*core product*) yang melahirkan produk akhir (*final product*) berupa jasa kargo yang melayani perusahaan ekspor-impor, serta jasa perdagangan retail yang melayani pembeli akhir.

Sebagai pusat perdagangan, Kota Jambi dituntut untuk dapat memberikan layanan yang cepat dengan volume perdagangan yang semakin meningkat. Tuntutan ini melahirkan jasa pelabuhan udara dan terminal. Gabungan kompetensi jasa pelabuhan udara dan terminal dengan kompetensi jasa keuangan dan perdagangan menjadikan Kota Jambi sebagai kota transit yang melahirkan produk akhir berupa jasa hotel dan jasa hiburan/wisata, serta memperkuat keberadaan jasa retail untuk melayani pembeli transit dan wisatawan.

Tuntutan lebih lanjut akan layanan dengan tingkat respon yang semakin tinggi dan semakin cepat melahirkan kompetensi jasa telekomunikasi. Gabungan kompetensi jasa telekomunikasi dengan pelabuhan udara dan terminal, serta jasa keuangan dan perdagangan menjadikan Kota Jambi sebagai pusat konferensi yang melahirkan produk

berupa jasa ruang pertemuan/sidang untuk melayani aktivitas seminar, lokakarya, ataupun konferensi bagi para pengambil keputusan dan masyarakat umum.

Di samping itu, sebagai ibukota provinsi, Kota Jambi memiliki kompetensi inti dalam jasa pendidikan dan pelatihan. Kompetensi ini menjadikan Kota Jambi sebagai kota pendidikan yang melayani pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan untuk penjenjangan jabatan, termasuk pendidikan non-formal, seperti kursus dan pelatihan keterampilan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun masyarakat.

Di masa depan Kota Jambi harus mampu mengembangkan kompetensi yang telah dimiliki menjadi basis keunggulan untuk memenangkan persaingan pada tataran global. Untuk itu harus dilakukan penyesuaian strategis agar kompetensi inti yang sudah dimiliki dapat bersinergi secara harmonis dengan kapabilitas Kota Jambi. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan kapabilitas wilayah agar dapat berkompetisi di masa depan (Widiati, et al, 1999), yaitu:

- Integrasi Sistem: Kemampuan membangun sistem yang kompleks melalui penerapan teknologi.
- Pengelolaan Sistem: Kemampuan mengelola sistem yang besar dan kompleks.
- Pengelolaan Jaringan: Kemampuan mengoperasikan sistem jaringan yang besar dan kompleks secara efektif dan efisien.
- Pembangunan Infrastruktur: Kemampuan menyesuaikan infrastruktur dengan perkembangan teknologi secara cepat.

Penulis mengajukan pembangunan TI sebagai strategi untuk mensinergikan kompetensi inti yang dimiliki Kota Jambi dengan kapabilitas yang harus dibangun agar Kota Jambi dapat menciptakan basis keunggulan sebagai modal berkompetisi di masa depan. Pemilihan TI sebagai basis teknologi dalam rencana pembangunan jangka panjang Kota Jambi didasarkan pada argumen, bahwa dari empat bidang teknologi yang diprediksi akan menjadi pendorong utama perubahan di abad ke-21, TI merupakan teknologi yang paling sesuai dengan visi pembangunan dan kompetensi inti yang dimiliki Kota Jambi.

Dengan menjadikan TI sebagai basis teknologi untuk penciptaan keunggulan daya saing yang berkelanjutan diharapkan dalam jangka waktu 20 tahun yang akan datang Kota Jambi menjadi Kota Multimedia dengan Industri TI sebagai produk inti. Gambar 2 memperlihatkan proses pembentukan produk inti TI di Kota Jambi. Dimulai dari pemberdayaan kompetensi inti Jasa Telekomunikasi untuk menciptakan produk inti berupa Pusat Multimedia dengan produk akhir berupa Jasa Multimedia yang terintegrasi dengan rantai nilai dari seluruh produk inti Kota Jambi. Selanjutnya, gabungan kompetensi jasa telekomunikasi dengan jasa pendidikan menghasilkan produk inti berupa Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) TI yang bersama dengan Industri TI dipacu untuk menciptakan Produk TI yang dapat melayani kebutuhan Pasar Global.

Keberadaan Pusat Multimedia, Pusat Litbang TI, dan Industri TI sebagai produk inti menjadikan Kota Jambi sebagai Kota Multimedia yang tidak hanya mampu melayani kebutuhan pertumbuhan regional, tetapi juga mampu bersaing pada tataran global. Inilah Visi Kota Jambi yang dapat ditawarkan untuk jangka waktu 20 tahun yang akan datang: Kota Multimedia yang menjadi pusat pertumbuhan regional yang dibangun dengan basis teknologi abad ke-21.

### **2.12.2. Analisis Prediksi**

Dalam memprediksi pembangunan teknologi informasi sampai tahun 2025, diperlukan analisis lingkungan strategis yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang bersifat mendukung atau menghambat pembangunan TI di Kota Jambi. Analisis lingkungan internal diperlukan untuk mengkaji kekuatan dan

kelemahan internal, sedangkan analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk mengkaji peluang dan ancaman eksternal terhadap pembangunan TI di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dapat dirumuskan kekuatan dan kelemahan internal dalam pembangunan TI di Kota Jambi. Kekuatan yang dimiliki oleh Kota Jambi dalam pembangunan TI di bidang prasarana adalah: sudah tersedianya sistem transmisi berupa jaringan tetap kabel tembaga, gelombang mikro, VSAT yang terhubung dengan sistem regional dan global, dan jaringan serat optik, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas, serta sudah berkembangnya jasa layanan akses internet. Adapun kelemahan di bidang prasarana adalah: terbatasnya jangkauan dan kapasitas jaringan, serta belum terintegrasinya sistem transmisi yang ada, di samping belum tersedianya pusat akses masyarakat.

Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Kota Jambi dalam pembangunan TI di bidang aplikasi adalah: sudah memiliki aplikasi pemerintahan, kemasyarakatan, bisnis, dan sistem aplikasi dasar; akan tetapi sebagian besar, kecuali aplikasi bisnis, belum terintegrasi (masih parsial, *stand-alone*) dengan muatan (*contents*) yang terbatas dan data yang belum baku.

Di bidang SDM, kekuatan yang dimiliki oleh Kota Jambi dalam pembangunan TI adalah: sudah dimilikinya SDM bidang TI, baik di lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan di dunia usaha; serta sudah berkembangnya lembaga pendidikan di bidang TI, baik berupa pendidikan tinggi formal ataupun pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Adapun kelemahan di bidang SDM adalah: masih rendahnya pemanfaatan dan penguasaan TI, masih rendahnya kesadaran informasi, serta masih adanya hambatan kultural dan struktural dalam pengembangan sistem informasi yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal dapat diidentifikasi peluang dan ancaman eksternal terhadap pembangunan TI di Kota Jambi. Perkembangan dan konvergensi sistem transmisi dan perangkat keras dengan kapasitas dan kecepatan yang semakin tinggi, siklus teknologi yang semakin singkat, serta harga yang semakin murah merupakan peluang sekaligus ancaman bagi pembangunan TI di Kota Jambi. Di samping itu, ekspansi sistem transmisi satelit dan belum sempurnanya sistem regulasi TI dapat menjadi ancaman bagi pembangunan TI di Kota Jambi.

Peningkatan dimensi, skala, dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan layanan birokrasi yang terbuka dan efisien; peningkatan kebutuhan masyarakat akan informasi; kebutuhan peningkatan daya saing bisnis; serta berkembangnya sistem *open sources* merupakan faktor eksternal yang memberi peluang bagi pembangunan aplikasi pemerintahan, kemasyarakatan, dan bisnis. Sedangkan ancaman eksternal terhadap pembangunan TI di Kota Jambi berasal dari terbukanya kemungkinan ekspansi jasa muatan multimedia dari luar Kota Jambi.

Peningkatan jumlah SDM berpendidikan tinggi bidang TI, adanya jabatan fungsional pranata komputer, serta berkembangnya pendidikan tinggi bidang TI merupakan faktor-faktor eksternal yang memberi peluang bagi pengembangan SDM bidang TI. Adapun ancaman bagi pembangunan TI di Kota Jambi dalam bidang SDM adalah terbukanya kemungkinan migrasi SDM (*brain drain*) bidang TI.

## BAB III

### VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

#### 3.1. Visi

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan atau arah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam hubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi (20 tahun) yaitu tahun 2025. Visi kota Jambi terintegrasi secara utuh dengan visi pembangunan nasional dan provinsi yang tertuang dalam RPJP nasional dan RPJP Provinsi Jambi tahun 2005-2025. Kemudian juga tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu ingin mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pembuatan visi harus memenuhi karakteristik ringkas, padat dan jelas.

Berdasarkan situasi dan kondisi historis kota Jambi pada masa lalu, potensi sumber daya alam dan manusia, permasalahan serta analisis prediksi situasi dan kondisi, dan tantangan yang dihadapi dua puluh tahun kedepan, serta arah pembangunan Jangka panjang nasional dan provinsi Jambi, maka dapat dirumuskan visi pembangunan daerah kota Jambi tahun 2005-2025 adalah :

***Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya.***

Visi tersebut mengarah pada pencapaian tujuan daerah yang diharapkan 20 tahun ke depan adalah terwujudnya Kota Jambi sebagai Pusat perdagangan barang dan jasa yang penduduknya religius dan berbudaya luhur.

Religius mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kota Jambi adalah masyarakat yang beragama. Terlaksananya kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemuliaan Moral, etika dan menjamin keharmonisan hubungan antar dan intern umat beragama.

Pembangunan kota diarahkan kepada upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi kota Jambi dalam bidang perdagangan baik untuk produk industri kecil, menengah dan besar, sehingga Jambi akan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa.

Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi Jambi merupakan pusat berbagai kegiatan baik administrasi pemerintahan maupun perekonomian daerah. Dengan demikian adalah suatu kewajaran bila pada masa yang akan datang peran kota Jambi menjadi kian strategis dalam memajukan perekonomian daerah. Untuk itu persiapan sarana prasarana pendukung terwujudnya kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa perlu mendapat perhatian.



### 3.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Untuk itu, ada beberapa misi yang ingin diembankan dalam pembangunan jangka panjang kota Jambi sebagai berikut :

- 1 Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
- 2 Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
- 3 Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi
- 4 Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
- 5 Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
- 6 Peningkatan kualitas aparaturnya pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
- 7 Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
- 8 Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah
- 9 Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
- 10 Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
- 11 Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- 12 Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
- 13 Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
- 14 Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetis melalui pendekatan kota hutan tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

## **BAB IV**

### **ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA JAMBI 2005-2025**

#### **4.1. Pendahuluan**

Arah pembangunan daerah menggambarkan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah, maka tujuan jangka panjang pembangunan daerah Kota Jambi (2005-2025) adalah untuk mewujudkan masyarakat yang *bermoral, sejahtera dan demokratis* yang terintegrasi dengan pembangunan provinsi dan nasional. Pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang tersebut, dilakukan dengan melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan yang diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

- 1 Terwujudnya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudaya.
- 2 Terwujudnya ekonomi kota Jambi yang mempunyai keunggulan kompetitif.
- 3 Terwujudnya kota Jambi menjadi kota perdagangan barang dan jasa.
- 4 Tercapainya keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan lingkungan hidup.
- 5 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang harmonis, produktif, estetis, dan berdaya dukung lingkungan.
- 6 Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang.
- 7 Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang cukup dan nyaman.
- 8 Terwujudnya daerah permukiman dan prasarana kota yang bersih dan nyaman.
- 9 Terwujudnya masyarakat dan pemerintahan yang taat hukum, dan demokratis.
- 10 Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban.
- 11 Terwujudnya Kota Jambi menjadi pusat pendidikan
- 12 Terwujudnya masyarakat kota Jambi yang sehat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi, politik dan pemerintahan harus didasarkan kepada masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Arah pembangunan adalah mewujudkan sasaran-sasaran berikut :

1. Tersediannya tempat ibadah yang memadai baik jumlah maupun kualitas.
2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berkunjung mengerjakan ibadah kepada Tuhan Yang maha Esa.,
3. Tidak terdapat konflik yang berarti antar umat seagama dan beragama.
4. Tidak ada lagi tempat lokalisasi Wanita Tuna Susila yang formal dan juga tempat-tempat terselubung lainnya.

Perencanaan pembangunan jangka panjang harus diarahkan kepada pengembangan budaya lokal, sehingga program pembangunan sejalan dengan pengembangan budaya kota Jambi yang dinamis, yang tercermin dari meningkatnya kearifan lokal dan penghargaan terhadap keragaman budaya, termasuk kesenian daerah. Hal ini ditandai dengan indikator berikut :

1. Terbangunnya pusat budaya Jambi yang lengkap dan representatif.
2. Terpilahkannya nilai-nilai budaya sejalan dengan pembangunan ekonomi dan sosial.

Dalam upaya mencapai ekonomi Jambi yang kompetitif, diimplementasikan dengan pencapaian indikator-indikator berikut :

1. Terwujudnya perubahan struktur ekonomi, kontribusi sektor sekunder dan tersier semakin besar dalam PDRB kota Jambi.
2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, sehingga pada tahun 2025 diharapkan pendapatan riil meningkat secara signifikan.
3. Tercapainya pendapatan perkapita masyarakat kota Jambi pada tahun 2025 sebesar Rp.24.000.000.
4. Terwujudnya inflasi secara terus menerus lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi.
5. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang relatif besar, sehingga tidak terdapat pengangguran.
6. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin menjadi lebih kecil dari 4 persen jumlah penduduk.
7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menempati posisi teratas di Provinsi Jambi.

Sejalan dengan terciptanya keuntungan kompetitif, sektor yang paling berperan adalah sektor perdagangan. Kota Jambi akan diwujudkan bukan saja menjadi simpul perdagangan sehingga menjadi kota perdagangan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB kota sekitar 40 persen;
2. Tersedianya pusat-pusat perdagangan baik kecil, menengah dan besar;
3. Tersedianya berbagai kebutuhan masyarakat dalam perdagangan di Kota Jambi.

Keberhasilan dalam mewujudkan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan lingkungan hidup ditandai dengan beberapa indikator :

1. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, kota Jambi terhindar dari banjir.
2. Pembangunan industri karet (crumb rubber) dan kayu yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Tertatanya pembangunan industri sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan hidup.
4. Tidak ada lagi asap/gas buangan industri yang dapat mencemari dan mengotori udara daerah kota Jambi.

Pembangunan harus mewujudkan pemanfaatan ruang yang harmonis, produktif, estetis, dan berdaya dukung lingkungan, yang terlihat dari beberapa indikator berikut :

1. Tertata pembangunan yang sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (perumahan, perkantoran, perdagangan dan penghijauan).

2. Terbangunnya sungai batanghari sebagai sumber pendapatan, rekreasi dan berdaya dukung lingkungan.
3. Terbangunnya tempat-tempat rekreasi, perdagangan yang berfungsi ekonomi tetapi harmonis dan estetis.

Pembangunan kota Jambi harus diarahkan kepada pembangunan terutama pembangunan infrastruktur yang berbasis pemanfaatan tata ruang kota, yang terlihat dari : (a), pemanfaatan lahan yang berdasarkan peruntukan pembagian wilayah kota, terutama wilayah pembangunan perumahan, pertokoan, perdagangan, dan lahan yang digunakan untuk penghijauan; dan (b), pembangunan gedung yang berdasarkan kepada Surat Izin Usaha Bangunan (SIUP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang cukup dan nyaman terlihat dari beberapa indikator berikut :

1. Terbangunnya jalan yang representatif dalam lingkungan kota Jambi, sehingga dapat dilalui angkutan umum.
2. Tersedianya berbagai jenis angkutan umum yang memadai, dan nyaman.
3. Terbangunnya terminal angkutan kota yang representatif dan nyaman bagi masyarakat kota.

Pada tahun 2025, pembangunan ekonomi yang pesat akan terwujudnya daerah permukiman dan prasarana kota yang bersih dan nyaman. Keberhasilannya ditandai dengan tercapainya sasaran-sasaran berikut ;

1. Terbangunnya sarana dan prasarana pemukiman penduduk yang cukup dan representatif seperti pembuangan sampah dan sarana jalan dalam perumahan penduduk.
2. Tercukupinya kebutuhan listrik dan air untuk daerah pemukiman penduduk kota.
3. Terbangunnya penghijauan pada daerah perumahan penduduk.

Perencanaan pembangunan jangka panjang diarahkan kepada terwujudnya pemerintahan dan masyarakat yang taat hukum dan demokratis, dengan sasaran sebagai berikut : (a), terbentuknya peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan program-program pembangunan; (b), hilangnya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pembangunan; (c), penempatan birokrat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan jenjang kepangkatan; (d), tidak ada konflik yang berarti dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah; dan (d), terlibatnya masyarakat dalam proses dokumen perencanaan daerah.

Sejalan dengan pembangunan ekonomi, politik, agama dan budaya maka pada tahun 2025 terwujudnya pembangunan di bidang kesehatan dengan pencapaian *masyarakat yang sehat*, dengan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya umur harapan hidup menjadi 70 tahun;
2. Menurunnya Angka Kematian Balita (AKB) menjadi 20 perseribu kelahiran hidup;
3. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 100 per seribu kelahiran hidup;
4. Menurunnya Angka Kematian Kasar (AKK) menjadi 3 per 1000 penduduk.

## **4.2. Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025**

### **4.2.1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Berilmu, Bertaqwa dan Berbudaya**

Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berakhlak harus berbasis kepada masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terciptanya masyarakat kota yang agamis, bermoral, dan beretika mempunyai peranan

yang sangat penting untuk terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Jambi.

Dalam kaitan ini, pembangunan agama diarahkan untuk mewujudkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Diperlukan membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan baik pribadi maupun masyarakat. Kemudian pembangunan agama juga diarahkan untuk meningkatkan harmonisasi kehidupan internal dan eksternal misalnya antar umat seagama dan beragama. Sangat perlu ditumbuhkan budaya rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat beragama, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang soleh, toleran, tenggang rasa dan harmonis pada masyarakat kota Jambi.

Pembangunan budaya diarahkan kepada *pengembangan budaya inovatif yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi* dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar masyarakat menguasai iptek serta mampu bersaing pada era global. Pengembangan budaya dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis serta kreatif dan inovatif. Kemudian merubah budaya konsumtif menjadi budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan produktivitas antara lain melalui kesenian, olah raga. Serta mendorong terwujudnya budaya untuk memperoleh keseimbangan antara materil dan spiritual.

#### **4.2.2. Mewujudkan Keunggulan Kompetitif**

Dalam persaingan yang semakin kuat sebagai akibat ekonomi yang makin terbuka, keberhasilan suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) mempunyai peranan penting dalam perkembangan ekonomi kota Jambi, terutama dalam pengembangan perdagangan baik untuk dalam negeri maupun perdagangan internasional.

Salah satu indikator adalah harga produk yang bersaing dengan produk sejenis dari daerah atau negara lain. Dalam upaya mengupayakan agar harga produk dapat bersaing dengan produk sejenis dari daerah atau negara lain. Untuk itu strategi pembangunan kota diarahkan kepada : produk yang diproduksi dan dikembangkan adalah produk yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*), mengembangkan struktur ekonomi kerahar semakin berperan sektor sekunder dan tersier, mengurangi biaya produksi, membangun dan mengefektifkan kelembagaan, mengembangkan teknologi, dan membangun birokrasi pemerintahan yang efisien dan demokratis.

##### **4.2.2.1. Keunggulan Komparatif**

Keunggulan komparatif sudah lama menjadi basis dalam menentukan keunggulan suatu negara dalam perdagangan dunia. Dalam konteks daerah menjadi dasar dalam perdagangan antar daerah dan internasional. Keunggulan komparatif biasa diukur dari biaya tenaga kerja yang relatif lebih murah untuk memproduksi suatu produk atau produk yang terbesar di produksi per pemakaian satu tenaga kerja.

Dalam perkembangannya, selain tenaga kerja, keunggulan komparatif sangat erat kaitannya dengan penggunaan faktor produksi modal. Proporsi penggunaan faktor produksi termurah yang akan menghasilkan keunggulan komparatif. Dalam hal ini keunggulan komparatif menjadi dasar dan syarat perlu (*necessary condition*) untuk mempunyai keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Kebijakan pemerintah daerah kota Jambi adalah memproduksi dan mengembangkan suatu produk yang mempunyai keunggulan komparatif. Produk tersebut merupakan produk-produk yang berbasis kepada penggunaan tenaga kerja dan

sumber daya manusia serta sumber daya alam yang relatif banyak/melimpah. Produk-produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif seharusnya tidak diproduksi, karena tidak kompetitif di pasar, akan dikalahkan oleh produk sejenis dari daerah/negara lain. Selain kebijakan tersebut juga kebijakan yang menjaga kontinuitas keunggulan komparatif melalui meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menjaga kontinuitas input.

#### **4.2.2.2. Perubahan Struktur Ekonomi**

Keberhasilan kota Jambi dalam meningkatkan daya saing, harus searah dengan perubahan struktur ekonomi kota, yang semakin besar kontribusi sektor non pertanian, sementara kontribusi sektor pertanian makin menurun dalam PDRB kota Jambi. Secara lebih rinci dapat digambarkan alurnya bahwa semakin tinggi pendapatan per kapita kota Jambi, maka kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap PDRB kota Jambi akan semakin besar. Namun secara absolut, ketiga sektor tersebut tetap mengalami peningkatan. Hal yang sama juga sejalan dengan pengembangan produk, seharusnya diarahkan kepada produk-produk yang mempunyai elastisitas permintaan dan penawaran yang elastis. Produk-produk tersebut adalah produk-produk industri manufaktur.

Sebagai derivasi perubahan struktur ekonomi di atas, kebijakan pembangunan harus pula diarahkan kepada perubahan pada struktur ekspor, dimana kontribusi ekspor produk manufaktur semakin besar sejalan dengan perkembangan PDRB perkapita, sementara perkembangan kontribusi ekspor produk pertanian akan semakin kecil. Hal ini sangat erat kaitannya dengan elastisitas permintaan ekspor produk manufaktur lebih elastis, sementara ekspor produk pertanian adalah inelastis, dimana semakin besar pendapatan akan semakin kecil permintaan terhadap produk pertanian tersebut.

Kebijakan pemerintah kota dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun kedepan adalah : (a), melakukan pengembangan produk-produk olahan yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi dan keterkaitan dengan produk primer; (b), mengembangkan industri-industri olahan yang lebih banyak berperan dalam pengembangan sektor pertanian sebagai industri hilir dan produk yang banyak menyerap tenaga kerja; dan (c), mengembangkan produk-produk industri kecil yang berbasis kepada sumber daya yang dimiliki kota Jambi.

#### **4.2.2.3. Mengurangi Biaya Produksi**

Biaya produksi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan daya saing produk, karena biaya produksi menentukan harga produk. Hal ini dapat dilakukan dengan kebijakan yang ditujukan menurunkan biaya penggunaan faktor produksi (tenaga kerja, modal, teknologi dan tenaga skill). Selain biaya tersebut, terdapat biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Penurunan biaya produksi, yang selanjutnya akan menurunkan harga produk, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing produk.

Dalam hubungan ini, kebijakan pemerintah kota Jambi memfokuskan kepada pengembangan produk yang memiliki keuntungan komparatif yaitu produk-produk yang relatif banyak menggunakan tenaga kerja (labor intensive). dan sumber daya alam, karena kedua faktor produksi ini mudah diperoleh dan jumlahnya relatif banyak dan berdampak kepada penurunan biaya produksi. Selain kebijakan tersebut, program pemerintah lebih banyak diarahkan kepada pengembangan usaha kecil termasuk industri kecil.

#### **4.2.2.4. Meningkatkan Peranan Kelembagaan**

Salah satu kelemahan, kurang berperannya kelembagaan yang mendorong meningkatkan daya saing suatu produk seperti lembaga yang ikut memasarkan suatu produk atau input ke suatu industri di kota jambi. Informasi pasar tentang harga, kualifikasi jenis produk yang diinginkan. Sayogianya dapat bersumber dari lembaga swasta atau pemerintah.

Kebijakan pemerintah kota dalam meningkatkan daya saing adalah : (a), mengefektifkan peranan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai institusi yang mendorong mempercepat berkembangannya produk-produk primer maupun olahan, seperti melakukan pelatihan, pemasaran, dan menjaga standar kualitas; (b), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membantu permodalan dan pemasaran produk; dan (C), mengembangkan lembaga koperasi yang membantu pemasaran baik input maupun input; dan (d), mengembangkan lembaga swasta yang ikut menginvestasikan modalnya dalam pengembangan produk-produk industri atau pertanian di Jambi.

#### **4.2.2.5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan daya saing suatu produk sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia, karena SDM mempunyai peran ganda, satu sisi sebagai produsen disisi lain sebagai ksmen. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan meningkatkan produktivitas dan mutu produk yang dihasilkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk di pasar baik pasar domestik maupun pasar luar negeri..

Kebijakan pembangunan sektor riil harus sejalan dengan pengembangan sumber daya manusia. Hal ini tercermin dari : (a), memperbesar alokasi anggaran yang pada Rencana Perencanaan Belanja Daerah (RPBD) yang semakin besar pada setiap Dinas dan Instansi. (b), kemudian SDM dapat ditingkat melalui pendidikan formal dan non-formal seperti kursus-kursus, workshop dan pelatihan-pelatihan baik di daerah Jamb maupun luar daerah kota Jamb; (c), mengembangkan pendidikan yang berbasis kepada agama seperti pesantren , sehingga siswa mempunyai beberapa alternatif untuk melanjutkan studinya.

Selain meningkatkan pendidikan dan ketrampilan birokrat, kebijakan lain adalah mengimplementasikan dalam pengangkatan jabatan struktural dan fungsional yang berbasis kepada latarbelakang pendidikan yang dimiliki dan pengalaman kerja yang tercermi dari masa kerja dan golongan.

#### **4.2.2.6. Pemanfaatan Teknologi**

Peningkatan daya saing produk-produk yang dihasilkan sangat erat kaitannya dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi, karena teknologi dapat menghemat tenaga kerja (labor saving) dan juga menghemat modal (capital saving), yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas produk dan pemasaran. Pengembangan teknologi tidak selalu identik dengan teknologi canggih, tetapi menerapkan dan mengembangkan teknologi yang cocok dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk tersebut di pasar dalam dalam negeri maupun luar negeri. Pengembangan teknologi tersebut

Kebijakan pengembangan teknologi diarahkan kepada : (a), produk-poduk usaha kecil, seperti perabot rumah tangga dari kayu dan furniture lainnya, kripik, batik dan produk makanan lainnya; (b), mengadakan pelatihan-pelatihan dan workshop untuk pengembangan teknologi; dan (b), dari pendidikan formal, dikembangkan pendidikan yang khusus mempunyai kurikulum pengembangan teknologi untuk usaha kecil dan menengah.

#### **4.2.2.7. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar negeri**

Salah satu peningkatan daya saing yang berperan penting adalah daya saing di bidang perdagangan baik ekspor maupun perdagangan dalam negeri. Pada era perdagangan bebas, keberhasilan ekspor tergantung kepada daya saing produk ekspor di pasar luar negeri terhadap produk-produk sejenis dari negara lainnya. Arah pengembangan ekspor dalam pembangunan jangka panjang adalah *daya saing* dengan meningkatkan teknologi, sehingga peningkatan produksi diikuti dengan peningkatan kualitas produk.

Selain meningkatkan daya saing, juga diarahkan kepada pengembangan jenis produk. Dalam dua puluh tahun kedepan akan semakin banyak jenis produk yang diperdagangkan (product differentiation) dan semakin banyak negara tujuan ekspor. Pengembangan jenis produk tetap berbasis kepada produk yang mempunyai keunggulan komparatif kota Jambi. Sementara pengembangan pasar diarahkan kepada negara-negara yang mempunyai potensi permintaan relatif tinggi.

Dalam hubungan dengan perdagangan antar daerah diarahkan kepada memperkuat sistem distribusi yang efisien, efektif dan menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan : (a), kota Jambi sebagai simpul perdagangan; (b), terintegrasinya perdagangan antar daerah yang lebih mencintai produksi daerah sendiri dan menjadikan kota Jambi sebagai pusat perdagangan antar daerah; dan (c), terjaminnya ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

#### **4.2.2.8. Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi**

Pengembangan UKM dan koperasi diarahkan untuk menjadikan pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis yang berdaya saing dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap perekonomian kota Jambi. Hal ini dapat dilakukan melalui : (a), peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas; (b), peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar; dan (c), pemanfaatan dan penerapan teknologi tepat guna dalam iklim usaha yang sehat. Khusus dalam kaitan dengan koperasi diarahkan kepada merubah orientasi koperasi kepada mencari keuntungan untuk kepentingan anggota koperasi.

#### **4.2.3. Mewujudkan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa**

Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi Jambi merupakan barometer keberhasilan pembangunan ekonomi, pemerintahan, sosial dan politik karena selain kota mempunyai jumlah penduduk yang relatif banyak dan berkualitas, secara konseptual kota mempunyai fasilitas sarana prasarana yang terlengkap dan tingkat perkembangan PDRB yang relatif tinggi dibandingkan dengan kota kabupaten lainnya. Hal ini merupakan basis untuk berkembangnya perdagangan, sehingga kota diarahkan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa pada tahun 2025.

Sebagai simpul perdagangan bukan saja antar kabupaten, tetapi juga antar provinsi. Dalam kaitan ini, strategi untuk mewujudkannya adalah ; (a), membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan; (b), menglokalisasi pusat perdagangan besar, menengah dan kecil atau lokalisasi berdasarkan jenis produk yang diperdagangkan; (c), mengembangkan industri kecil dan dagang kecil berbasis kepada sumber daya.

Dalam hubungan dengan mengembangkan perdagangan, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya eksportir dan importir dan melakukan difersifikasi pasar dan produk yang diperdagangkan serta melakukan promosi-promosi daerah kepada investor atau swasta baik lokal maupun internasional untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan sarana dan prasarana perdagangan. Kebijakan pemerintah juga difokuskan kepada mendorong dan mengembangkan perkembangan perdagangan kecil, dan sektor informal lainnya.

#### **4.2.4. Mewujudkan Keselarasan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dengan Lingkungan Hidup**

Sumber daya alam merupakan potensi yang dapat memacu percepatan pembangunan, sebab merupakan sumber daya yang sudah tersedia secara alami. Namun demikian, kuantitas sumber daya alam yang tersedia sangat berbeda satu dengan lainnya, di satu sisi ada yang berlimpah sedang yang lainnya relatif terbatas. Pada sumber daya alam yang relatif terbatas, seperti kayu, karet dan pasir yang dimiliki kota Jambi perlu kajian yang lebih mendalam untuk pemanfaatannya, agar dalam pengembangan potensinya masih tetap dalam ambang batas terciptanya daya dukung lingkungan yang handal.



Potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah ternyata belum dimanfaatkan secara optimal, contoh sumber daya air, yang karena lemahnya pengelolaan sumber daya tersebut, belum memberikan nilai tambah pada masyarakat seperti untuk kebutuhan air bersih, tetapi justru menjadi masalah yang sangat merepotkan, yaitu dengan adanya bencana banjir. Terlepas dari keterbatasan dana dan kemampuan pengelolaan, sudah sepantasnya masalah sumber daya air yang berlimpah tersebut diubah sebagai potensi yang menjanjikan bagi perkembangan kota. Konsep pemanfaatan sumber daya air sebagai primadona pembangunan kota, mulai patut untuk dikedepankan pada era pembangunan kali ini.

Kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah menciptakan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, yang dapat dilakukan melalui beberapa program yaitu :

- 1 Mengoptimalkan penanganan permasalahan banjir di kota Jambi, sehingga kota Jambi tidak lagi terkena banjir.
- 2 Mewujudkan secara optimal pengelolaan dan estetika ruang publik.
- 3 Menata area hijau kota dan menata secara optimal pengendalian Air Bawah Tanah
- 4 Mengoptimalkan pengelolaan irigasi dan daerah aliran sungai (DAS).
- 5 Mengendalikan penambangan bahan Galian Golongan C dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- 6 Menegakan hukum secara konsisten dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan.

Konsentrasi pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada pengelolaan sumber daya air dan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Pijakan dasarnya adalah tetap mempertimbangan aspek ketahanan daya dukung lingkungan dalam rangka mengemban terjaminnya pembangunan yang berkesinambungan. Disamping itu, pengelolaan sumber daya air dan lahan di beberapa bagian diarahkan untuk menjaga fungsi kelestarian lahan dan ketersediaan air.

Tujuan program ini adalah pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan. Sedang sasarannya adalah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, konservasi dan rehabilitasi lahan, pencegahan dan pengurangan dampak polusi guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah kota untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dilakukan melalui : (a), penataan dan normalisasi sungai, drainase dan sumber air; operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; (b), pengendalian eksploitasi air bawah tanah; (c), penanganan dan pengendalian dampak lingkungan; (d), pengembangan sumber daya air; dan (e), pengendalian banjir dan pengendalian pertambangan rakyat

Penataan dan normalisasi sungai diutamakan untuk memperlancar arus air sungai melalui pemeliharaan badan-badan penataan sungai dan pemanfaatan, pelestarian DAS baik bagian hulu maupun hilir, memelihara drainase kota dan pengelolaan sumber-sumber air. Representasi program ini melalui kegiatan normalisasi sungai dan drainasi, penataan bantaran, pembangunan saluran drainase kota serta meningkatkan kerjasama baik dengan dunia usaha maupun dengan daerah lain.

Pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai kegiatan usaha menjadi sangat penting, sebab pemenuhan kebutuhan Air Bersih dari pengelolaan air permukaan belum mencukupi. Untuk mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah, sehingga sesuai dengan sumber daya air dan daya dukung lingkungan yang tersedia. Representasi program ini meliputi pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ABT, utamanya oleh dunia usaha dan industri serta peningkatan kerjasama regional.

Penanganan dan pengendalian dampak lingkungan dimaksudkan untuk menangani dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh suatu kegiatan industri/ usaha, perkotaan, melalui kegiatan Program Kali Bersih (prokasih), langit biru, pelaksanaan Amdal dan UKL /UPL serta pengembangan dan penegakan Hukum Lingkungan.

Sumber daya air yang tersedia, belum dimanfaatkan secara optimal, untuk itu masih perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi yang tersedia. Untuk memaksimalkan sumber daya air secara lestari dan berkesinambungan. Kegiatan program ini meliputi pengkajian system drainasi, penyusunan *detail plan drainage*, serta penerapan konsep *Jambi water front city*.

Banjir dan rob merupakan permasalahan laten bagi kota Jambi. Berbagai bentuk penanganan telah dilakukan namun belum dapat teratasi secara tuntas. Untuk itu, diperlukan terobosan penanganan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait. Esensi penanganan ke depan dilakukan dengan pendekatan lingkungan menyeluruh (*holistic*). Implementasi program ini melalui pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan drainasi, pompanisasi, pembangunan polder dan kolam penampungan yang melibatkan peran aktif masyarakat.

Eksplorasi Bahan Galian Golongan C memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan infrastruktur perkotaan. Bahkan menjadi peluang kegiatan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Namun kecenderungan yang ada, nampaknya kegiatan ini belum dilakukan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bermuara pada rusaknya lingkungan dan membahayakan masyarakat. Untuk itu perlu diberlakukan aturan yang ketat, tindakan tegas bagi pelanggarnya sesuai dengan kewenangan yang ada. Kegiatan program ini melalui pendataan lokasi tambang, peningkatan kesadaran penambang & pengendalian atas aktifitas penambangan rakyat diberbagai lokasi.

#### **4.2.5. Mewujudkan Pemanfaatan Ruang yang Harmonis, Produktif, Estetis, dan Berdaya Dukung Lingkungan**

Pemanfaatan ruang kota diarahkan untuk mewujudkan ruang kota yang dapat menampung segala aktifitas perkotaan namun tetap memperhatikan daya dukung lahan. Optimalisasi pemanfaatan ruang kota sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan kota mengalami perubahan paradigma, yaitu dari skala keseragaman menuju keberagaman, dari lahan sebagai sekedar wadah aktifitas menjadi bagian dari investasi dan pemberdayaan kandungan lokal. Perubahan paradigma ini memberikan konsekuensi logis bagi kota untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dikandungnya. Lebih dari itu, diperlukan pengembangan antar kawasan yang bertumpu pada keselarasan antar sinergisitas dengan wilayah sekitar. Dengan demikian diharapkan kebijakan tata ruang akan terhindar dari segala benturan kepentingan ego regional masing-masing wilayah pengembangan.

Kebijakan penataan ruang kota merupakan basis dari segala kebijakan pengembangan fisik kota, sebab hampir semua aspek pemanfaatan ruang kota harus berpijak pada tata ruang kota yang telah ditetapkan. Mengingat strategisnya aspek kebijakan ini bagi perkembangan fisik kota, maka diharapkan kebijakan ini seyogyanya mampu mengakomodasi semua potensi kota baik secara internal maupun eksternal, sehingga arah pembangunan kota tidak meninggalkan elemen potensi dalam setiap tahap pembangunan. Berlandaskan kajian tata ruang kota Jambi maka pemanfaatan ruang kota dalam kebijakan tata ruang ini diarahkan :

1. Keselarasan pemanfaatan ruang yang mampu mengembangkan fungsi setiap kawasan.
2. Terciptanya hubungan sinergis antara wilayah Kota Jambi dengan wilayah / daerah sekitar.
3. Pengembangan sumber daya lokal dan berdaya dukung lingkungan yang berkesinambungan.

4. Terdapatnya konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Pembangunan yang telah berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW).
6. Optimalnya penanganan perkampungan kumuh, bangunan dan hunian liar.
7. Telah meratanya penyebaran fasilitas perumahan dan lingkungan permukiman.

Kebijakan yang mewujudkan pembangunan yang memanfaatkan tata ruang kota dapat dilakukan melalui : penataan ruang dan kawasan, pengembangan sistem tata ruang, penataan pertanahan, penataan bangunan dan konservasi lahan.

Bias antara rencana dan pemanfaatan tata ruang bukan hal yang harus dihindari. Sebab rencana tata ruang merupakan pola pendekatan dalam pemanfaatan tata ruang. Yang perlu digaris bawahi dari program ini adalah benang merah keterkaitan antara rencana dan pemanfaatan ruang kota, sehingga mampu mewujudkan konsistensi setiap aplikasi kebijakan pemanfaatan ruang dalam melaksanakan pengendalian tata ruang, yang obyektif, produktif dan berwawasan lingkungan. Guna mewujudkan program ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan evaluasi rencana tata ruang kota.

Dasar dari program ini adalah belum tersedianya data dan teknologi informasi tata ruang yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. Sementara dalam era pelayanan pembangunan saat ini diperlukan sistem pengelolaan tata ruang yang transparan dan mampu mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan kota. Perwujudan program ini dilakukan melalui penyediaan informasi tataruang dalam berbagai media.

Untuk mengatur perpeetakan tanah yang belum terpola secara efisien dan efektif, baik secara teknis maupun administratif. Hal ini akan sangat mendukung terwujudnya efisiensi pemanfaatan ruang dan meningkatkan produktifitas lahan perkotaan, serta menjamin kepastian hak kepemilikan tanah. Implementasi program ini dilaksanakan melalui kegiatan konsolidasi tanah, pelaksanaan catur tertib pertanahan dan pengembangan GIS (*Geografics Information System*).

Dasar dari program ini guna menjembatani kesenjangan antara rencana tata ruang dengan implementasi pemanfaatan ruang. Hal ini disebabkan oleh karena perencanaan tata ruang kota belum mampu sebagai arahan detail dalam pemanfaatan ruang. Untuk itu, setiap kawasan strategis kota sudah selayaknya dilengkapi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Perwujudan program ini melalui kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Kota, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTRK, RTBL), pengendalian dan evaluasi bangunan.

Pemenuhan kawasan hijau diupayakan sebagai media penyelarasan akan kecenderungan degradasi ketersediaan udara bersih dan sehat. Dengan tersedianya ruang terbuka hijau yang cukup diharapkan mampu menurunkan tingkat polusi udara kota, sekaligus sebagai media resapan air hujan yang pada akhirnya berfungsi sebagai media pencegah bahaya banjir. Implementasi program ini dilakukan melalui penyusunan rencana kawasan konservasi dan pengendalian atas implementasi peruntukan lahan serta konservasi lahan kritis.

#### **4.2.6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Sesuai dengan Tata Ruang.**

Kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pemanfaatan ruang. Berpijak pada Perda Nomor 1 Tahun 1999, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi, konsep dasar pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan berorientasi pada pemenuhan pelayanan infrastruktur perkotaan yang mampu mendukung terwujudnya pola perkembangan kota pantai metropolitan yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat. Implementasi konsep tersebut di atas memiliki banyak tantangan, hal ini disebabkan karena kondisi infrastruktur perkotaan yang terbangun telah mengalami penurunan kualitas dan fungsi yang cukup tajam, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang

cukup besar. Disisi lain, kelengkapan infrastruktur yang tersedia masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan.

Konsekuensi dari potret infrastruktur kota Jambi tersebut, mengandung dua dimensi kegiatan pembangunan. Dimensi pertama, adalah pelaksanaan pembangunan baru guna mengejar pemenuhan kebutuhan selaras dengan perkembangan masyarakat, sedang dimensi kedua adalah pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Pelaksanaan pembangunan kedua dimensi tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk menjawab tantangan yang demikian maka diperlukan prioritas program yang proporsional sehingga dapat menciptakan infrastruktur yang berdaya dukung pada segala aktifitas perkotaan secara efektif dan efisien.

Kebijakan pengembangan infrastruktur, diarahkan kepada tersedia secara optimalnya pelayanan infrastruktur dasar kelompok miskin, optimalnya pelayanan infrastruktur lainnya serta berjalannya sistem transportasi internal dan eksternal perkotaan. Pada tahun 2025, sudah pindahnya terminal Rawasari ke terminal baru yang lebih nyaman dan representatif.

#### **4.2.7. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Cukup dan Nyaman.**

Sebagai ibu kota provinsi yang memiliki visi dalam bidang perdagangan dan pendidikan, sektor transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung fungsi kota. Untuk itu, transportasi sebagai media pergerakan barang dan jasa, harus mampu mencerminkan tingkat efisiensi dan efektifitas kota dalam hal mobilitas dan aksesibilitas kota, baik secara internal maupun eksternal.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah perkotaan. Muara dari arah kebijakan ini adalah terwujudnya perimbangan akan pertumbuhan yang harmonis antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan permukiman, dengan tujuan terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi perkotaan secara kualitas dan kuantitas. Sedang sasaran program adalah meningkatnya mobilitas barang dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan. Hal ini dapat terwujud melalui : Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan; peningkatan jalan dan jembatan; pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dan simpul transportasi; pengembangan fasilitas transportasi darat, laut dan udara; pengembangan manajemen transportasi dan moda angkutan umum; dan peningkatan pelayanan fasilitas pedestrian.

Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksudkan guna mengembalikan kualitas jalan yang mengalami penurunan fungsi sebagai akibat terjadinya kerusakan, sehingga jaringan jalan yang ada mampu tetap berperan menjadi media mobilitas perkotaan secara optimal. Wujud dari program ini dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik secara rutin maupun periodik

Perkembangan penduduk dan aktifitas kota menuntut pengembangan mobilitas antar wilayah, untuk itu diperlukan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan jalur-jalur strategis sebagai media perkembangan mobilitas perkotaan. Kegiatan dari program ini berupa pembangunan jalan dan jembatan baru maupun yang bersifat peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

Kepadatan lalu lintas jalan dalam wilayah perkotaan memerlukan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan jalan. Sebagai optimalisasi fungsi jalan diperlukan fasilitas lalu lintas, simpul-simpul transportasi secara memadai agar ketertiban, kelancaran dan keamanan para pengguna jalan dapat tercapai. Implementasi program ini dilakukan antara lain melalui pemeliharaan dan penyediaan rambu-rambu lalu lintas, pembangunan dan rehabilitasi terminal angkutan umum.

Dalam rangka mewujudkan visi kota, perlu didukung pengembangan fasilitas yang memadai baik darat (kereta api), Laut dan Udara. Mengingat bahwa kewenangan penanganan masalah tersebut sampai saat ini masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat, maka program ini dimaksudkan untuk mendorong, memfasilitasi, serta

melaksanakan kemitraan dalam pengembangan fasilitas transportasi. Perwujudan program ini melalui peningkatan prasarana transportasi kota, pembangunan prasarana transportasi darat, laut dan udara.

Perkembangan kota menuntut adanya inovasi dan kreasi sistem transportasi sehingga pelayanan transportasi mampu menjangkau setiap aspek kebutuhan mobilitas perkotaan, baik secara internal maupun eksternal kota., yang diarahkan kepada penanganan angkutan umum yang sesuai perkembangan kota. Untuk itu harus dilakukan dengan kegiatan penyusunan pola umum transportasi kota, penertiban angkutan umum, penetapan moda transportasi.

Berkembangnya aktifitas kota yang cukup pesat berpengaruh pada meningkatnya arus lalu lintas yang pada akhirnya akan mengurangi keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki baik yang melintasi maupun yang berada di tepi jalan raya. Untuk menyediakan fasilitas pedestrian agar tercapai rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki khususnya disekitar jalan raya. Salah satu implementasinya dilakukan melalui kegiatan revitalisasi pedestrian area, peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jalan operasi penertiban pedestrian.

#### **4.2.8. Mewujudkan Daerah Permukiman dan Prasarana Kota yang Bersih dan Nyaman.**

Pemukiman bagi pemerintah kota Jambi menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, karena daerah permukiman yang bersih, nyaman dan mempunyai prasarana permukiman yang lengkap merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kota. Kemudian daerah permukiman harus dilengkapi dengan ketersediaan prasarana kota, seperti penerangan, air bersih, tempat olah raga dan angkutan serta kenyamanan tempat tinggal.

Kebijakan pembangunan permukiman dan prasarana kota diarahkan untuk mendukung kota agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan beban yang diemban sebagai ibu kota provinsi. Lebih dari itu, esensi dari pembangunan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kota yang pada muaranya diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sebagai warga kota pantai metropolitan.

Pembangunan permukiman dan prasarana kota adalah terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, estetis, nyaman dan layak huni. Sasarannya adalah mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta terpenuhi kebutuhan fasilitas sosial yang memadai, seperti taman, jalan, sanitasi lingkungan, sarana ibadah dan lain-lain. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilakukan melalui : penyediaan dan perbaikan perumahan dan permukiman; penyehatan Lingkungan Permukiman; Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih; Kebersihan Kota; Penataan pusat niaga dan pedagang kaki lima; Revitalisasi kawasan warisan budaya; Revitalisasi kawasan warisan budaya; dan Penghijauan, Pertamanan dan Perabot Jalan.

Pada dasarnya penyediaan perumahan dan permukiman lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, prioritas program yang dilakukan oleh Pemkot diarahkan pada pemenuhan kebutuhan papan masyarakat kurang mampu, baik berupa lahan maupun perumahan yang layak huni dan terjangkau. Sedangkan maksud program perbaikan perumahan dan permukiman ini meliputi dua pendekatan kualitas perumahan serta sarana dan prasarannya. Representasi dari program ini berupa peremajaan perumahan dan permukiman kumuh maupun peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat miskin, penertiban rumah liar.

Infrastruktur perumahan dan permukiman yang ada di masyarakat dalam skala lingkungan, belum bisa dikelola secara penuh oleh masyarakat, oleh karena itu peran pemerintah masih dibutuhkan dalam memberikan stimulan penyediaan dan pemeliharannya, utamanya pada saluran pematusan, instalasi pengolah air limbah, septiktank komunal dan penyediaan fasilitas MCK umum. Kegiatan program ini meliputi penyehatan lingkungan permukiman dalam arti luas.

Pelayanan air bersih pada prinsipnya dilakukan oleh PDAM, namun dalam realisasinya belum menjangkau seluruh wilayah kota. Hal ini mengakibatkan kebutuhan air bersih sebagian wilayah masih memerlukan perhatian dari unsur teknis pemerintah kota guna melengkapi keterbatasan jangkauan pelayanan oleh PDAM Kota Jambi. Untuk itu program ini dimaksudkan membantu penyediaan infrastruktur air bersih, bagi masyarakat. Wujud kegiatan program ini adalah penyediaan air bersih dengan menggali potensi sumber-sumber air yang ada disekitar kawasan pelayanan.

Aspek kebersihan sebagai salah satu indikator kesehatan lingkungan kota, diperlukan pengelolaan yang terpadu dan simultan. Keterbatasan perangkat kebersihan masih menjadi kendala pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan terobosan pengelolaan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Salah satu obsesi pemerintah kota dalam hal kebersihan adalah mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat. Perwujudan program ini melalui kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan, peningkatan peran dunia usaha & partisipasi masyarakat dalam kebersihan, penyediaan TPS & TPA yang efektif dan efisien.

Fenomena kehadiran PKL sering kali dihadapkan pada benturan berbagai aspek kepentingan. Untuk itu diperlukan keberpihakan secara proporsional terhadap PKL tanpa mengorbankan aspek lain termasuk didalamnya unsur ketertiban dan estetika kota. Patut dikedepankan dari eksistensi PKL adalah bagaimana mewadahi PKL dalam ruang yang memenuhi aspek tata ruang, produktivitas, estetis dan manusiawi. Disamping itu, pusat – pusat niaga yang tersebar diberbagai kawasan masih perlu untuk dibenahi dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Representasi program ini melalui kegiatan penataan PKL, revitalisasi pusat-pusat niaga tradisional.

Banyak peninggalan sejarah yang ada di Kota Jambi baik berupa warisan budaya bangunan maupun prasarana lainnya yang saat ini masih belum optimal dalam pelestarian, pengelolaan maupun pemanfaatannya. Oleh karena itu program ini dimaksudkan untuk melestarikan, mempertahankan serta mengoptimalkan pemanfaatannya agar memberikan nilai tambah yang lebih baik. Kegiatan program ini dilakukan melalui penataan kawasan budaya dan religi, penataan kawasan pariwisata.

Dalam mewujudkan visi kota pantai metropolitan, daya dukung lahan kota perlu dipertahankan agar dapat memberikan kenyamanan dan mampu menampung segala aktifitas masyarakat kota. Untuk mempertahankan daya dukung lahan kota, maka penghijauan ruang terbuka perlu dikembangkan dan optimalkan untuk meningkatkan resapan air kawasan kota dan pendukung penurunan tingkat polusi udara.

Ketersediaan ruang publik telah berkurang akibat dari alih fungsi sebagian ruang publik yang ada. Untuk itu, program ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara ruang publik yang ada serta memperbanyak ruang publik pada kawasan-kawasan berkembang. Disisi lain, elemen dekorasi kota sebagai kosmetik wajah kota masih diperlukan inovasi dan kreasi, sehingga mampu mewujudkan estetika kota yang dinamis, produktif dan mampu berfungsi sebagai paru-paru kota. Kegiatan program ini meliputi penghijauan kota, pemeliharaan taman kota, penataan dekorasi kota dan pengembangan ruang publik.

#### **4.2.9. Mewujudkan Masyarakat dan Pemerintahan yang Taat Hukum, dan Demokratis**

Persoalan utama yang dihadapi dalam pembangunan di bidang hukum adalah penegakan dan supremasi hukum. Munculnya fenomena pengadilan jalanan dan kecenderungan terjadinya main hakim sendiri serta rendahnya penghargaan terhadap HAM merupakan refleksi dari lemahnya supremasi hukum. Hal ini muncul sebagai akibat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat disamping adanya praktek-praktek diskriminasi, inkonsistensi dan tidak adanya transparansi hukum. Keadaan ini lebih diperburuk dengan adanya produk-produk hukum yang belum mampu memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta rasa keadilan kepada masyarakat.

Kondisi dan kehidupan politik di Kota Jambi, tidak dapat dilepaskan dari kondisi umum yang terjadi secara nasional. Semangat kehidupan demokrasi menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, terbukanya iklim demokrasi sebagaimana tuntutan reformasi, belum diimbangi dengan kesiapan masyarakat untuk meresponnya, sehingga dalam praktek terjadi distorsi nilai demokrasi.

Pembangunan politik kedepan yang bernuansa pada proses demokratisasi dan peningkatan keterlibatan publik, diharapkan mampu membangun dan mengembangkan sikap, perilaku, etika dan moral berpolitik yang lebih beradab dan berbudaya. Oleh karena itu untuk meluruskan dan menegakkan demokrasi masih diperlukan pendidikan politik secara memadai dan terciptanya iklim yang kondusif serta budaya politik yang santun.

Kepatuhan akan hukum dan penegakan demokrasi membawa konsekuensi kepada membaiknya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan suhu politik akan berpengaruh terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kekurangmampuan pemerintah dalam mensikapi tuntutan masyarakat mengakibatkan instabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

Kondisi Kota Jambi saat ini masih termasuk dalam kategori kota yang aman, namun bukan berarti tanpa adanya gangguan kriminalitas dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Gangguan ketertiban berupa pelanggaran peraturan daerah, lalu lintas, curanmor, curas, curat, dan berbagai tindak kriminalitas lain sering terjadi. Mensikapi kondisi tersebut diatas, maka berbagai potensi konflik dan kerawanan sosial harus tetap diwaspadai, disinilah pentingnya kesadaran dan penegakan hukum, serta pembinaan arti pentingnya persatuan dan kesatuan.

Tujuan pembangunan hukum adalah mewujudkan supremasi hukum, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum serta rasa keadilan. Sasaran untuk pembangunan hukum adalah penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah, peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kebijakan pembangunan hukum diarahkan untuk menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan kepastian, rasa keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat dalam rangka membentuk budaya hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pencapaian kebijakan tersebut dilakukan melalui : (a), Penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah; (b), Peningkatan kemampuan dan kedisiplinan aparat hukum; (c), Pengembangan budaya tertib hukum dan HAM; (d), Penerapan dan penegakan hukum; (e), Pelayanan dan bantuan hukum; dan (f), Pengembangan sarana dan prasarana hukum

Arah kebijakan pembangunan hukum seharusnya menyusun produk hukum baru, memperbaharui dan menyempurnakan produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan kondisi obyektif sehingga mampu memberikan jaminan kepastian dan rasa keadilan hukum. bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini melalui kegiatan review produk-produk hukum yang ada, melakukan penyempurnaan produk hukum yang tidak sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, serta menyusun produk-produk hukum baru yang dibutuhkan.

Peningkatan kemampuan aparat hukum dimaksudkan untuk mewujudkan sosok aparat hukum yang profesional, memiliki integritas dan kredibilitas sehingga mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Dalam pelaksanaan program ini melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional baik secara formal maupun non formal dan pemberian reward and punishment.

Kemudian kebijakan dalam peningkatan pengetahuan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparat pemerintah terhadap hukum dan

hak asasi manusia sehingga tumbuh budaya hukum. Dalam pelaksanaan program melalui sosialisasi produk hukum dan simulasi hukum, serta keluarga sadar hukum.

Untuk mewujudkan supremasi hukum, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian dan perlindungan serta rasa keadilan. Oleh karena itu hukum harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan satu dengan lainnya. Peranan aparat penegak hukum khususnya Satpol PP sebagai institusi penegak Peraturan Daerah harus mampu menjalankan fungsinya. Dalam pelaksanaan program melalui operasi yustisi, penertiban dan penataan pelanggaran peraturan serta pemberian sanksi pada pelanggaran hukum.

Untuk memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang mudah dan terjangkau. Dalam pelaksanaan program ini melalui sosialisasi tentang Hak mendapatkan Bantuan Hukum bagi yang membutuhkan, pengembangan organisasi profesi bantuan hukum.

Pengembangan sarana dan prasarana hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana hukum sehingga mampu memberikan pelayanan secara optimal. Dalam pelaksanaan program ini melalui peningkatan kualitas Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum, peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana hukum.

Arah kebijakan politik saat ini secara umum dalam kondisi tidak menentu dan sulit diprediksi, hal ini disebabkan oleh tahapan yang kita lalui baru tahap menuju kehidupan demokrasi secara nyata. Kondisi yang demikian sangat rentan terhadap gejala sosial dalam masyarakat, oleh karenanya pembangunan bidang politik harus dikaji secara cermat dan komprehensif. Untuk itu kebijakan politik diarahkan pada penciptaan iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

Pembangunan politik bertujuan untuk membangun kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan sasarannya adalah: (a) mewujudkan budaya politik masyarakat yang kondusif terhadap demokratisasi; (b) peningkatan peran dan fungsi infra dan suprastruktur politik. Strategi untuk dapat terwujudnya tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui : (a), pembangunan ideologi; (b), Pengembangan pendidikan politik ormas, kelompok profesi/LSM dan masyarakat; (c), Pengembangan wacana politik bagi partai-partai politik; dan (d), Peningkatan peran dan fungsi legislatif.

Pembangunan ideologi dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan memahami nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, melalui kegiatan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan non formal, kajian ilmiah dalam perguruan tinggi dan pengembangan percontohan lewat tingkah laku para pemimpin formal dan non formal.

Eforia Reformasi sebagai akses dari proses menuju demokratisasi harus disikapi dengan adanya persamaan persepsi semua pihak terhadap rambu-rambu demokrasi. Berdasarkan hal tersebut maka pemahaman yang benar mengenai makna dan arti politik dalam konteks membangun sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kenegaraan serta menumbuhkan kesadaran partisipasi konstruktif harus dikembangkan dalam wacana setiap kegiatan ormas, kelompok profesi, LSM dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dan fungsinya secara benar dan utuh. Dalam pelaksanaan program ini melalui dialog interaktif antara Ormas, Kelompok profesi, LSM dan masyarakat, pelaksanaan Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Berkembangnya sistem kepartaian yang multi partai telah memberikan ruang bagi terbukanya wacana debat politik maupun *meningkatnya* fungsi kontrol yang lebih besar. Mengingat beragam variasi perilaku dan budaya politik partai dalam menjalankan peran dan fungsinya, diperlukan kesamaan persepsi maupun kesejajaran pemikiran dan pengetahuan dalam berdemokrasi. Oleh karena itu diperlukan adanya forum dialog antar



partai untuk membuka cakrawala dan wawasan yang berkesinambungan sehingga terwujud budaya politik yang santun.

Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi legislatif diupayakan untuk mampu mendorong DPRD sebagai institusi politik dalam mengakomodasikan aspirasi rakyat dan melakukan mekanisme kontrol yang efektif serta mendorong proses demokratisasi sehingga DPRD mampu menjalankan tugas, fungsi dan wewewangnya secara optimal.

#### **4.2.10. Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban.**

Kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif merupakan salah satu modal dasar bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah. Kesalahan dalam mengantisipasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakibatkan terjadinya gangguan dalam pencapaian kinerja pembangunan. Oleh karena itu arah pembangunan keamanan dan ketertiban dititik beratkan pada penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik dan ekonomi, serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat.

Tujuan utama dari pembangunan keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah : mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasarannya adalah : (a) menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bermasyarakat; (b) pengembangan kelembagaan perlindungan masyarakat melalui pembinaan rakyat terlatih dan peningkatan peran serta masyarakat; (c) terjalinnya hubungan kemitraan antara masyarakat dengan aparat dalam kerangka perlindungan masyarakat.

Salah satu strategi yang harus dilakukan adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan kamtibmas dan terjadinya bencana. Perkembangan kehidupan dinamika kota yang makin kompleks berpotensi terhadap berbagai tindak kriminal, kekerasan maupun penyakit-penyakit sosial yang meresahkan masyarakat. Masalah lain yang muncul di perkotaan berupa bencana baik bencana alam maupun bencana akibat kelalaian manusia.

Kemudian strategi yang harus dijalankan adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas dan bencana melalui penumbuhan kesadaran dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat agar masyarakat secara dini mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak kriminal, kekerasan maupun penyakit sosial.

#### **4.2.11. Mewujudkan Kota Jambi Menjadi Pusat Pendidikan**

Kesejahteraan masyarakat kota Jambi sangat tergantung kepada ketersediaan fasilitas pendidikan yang bermutu, sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai jenis pendidikan yang diinginkannya. Kota Jambi merupakan ibu kota provinsi Jambi yang mempunyai letak geografis yang strategis, jumlah penduduk yang banyak, tingkat pendapatan yang relatif tinggi dan relatif banyak tersedianya sumber daya manusia dan jumlah sarana pendidikan yang lebih banyak, sehingga cukup rasional untuk menempatkan kota Jambi pada tahun 2025 diharapkan Kota Jambi dapat menjadi *kota pendidikan*.

Namun kondisi sekarang masih terdapat banyak kelemahan antara lain : (a), kurangnya sarana untuk mendukung Proses Belajar Mengajar (PBM) seperti peralatan praktek laboratorium dan alat peraga lain; (b), kurangnya motivasi dari orang tua murid untuk membantu Pemerintah dalam mengatasi masalah dana pendidikan yang sangat terbatas; (c), anggaran untuk pendidikan sebagian besar diserap untuk kegiatan rutin pendidikan; dan (d), kurikulum pendidikan luar sekolah dan pendidikan formal tidak selaras dengan kondisi dan potensi Kota Jambi.

Dalam kaitan dengan permasalahan-permasalahan dan mewujudkan kota pendidikan, maka beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah : (a), melakukan pembinaan terhadap Pendidikan Dasar, Menengah, Kejuruan baik Fisik Maupun Non Fisik; (b), melakukan pembinaan Serta Pengembangan Seni dan

Kebudayaan Daerah; (c), mengefektifkan pemuda dan olah raga; (d), melengkapi dan menyempurnakan Perpustakaan Umum Kota Jambi; dan (e), meningkatkan Fasilitas Kantor Dinas P dan K Kota Jambi

Selain upaya di atas, kebijakan lain adalah : (a), memenuhi kebutuhan akan sarana penunjang terutama alat praktikum laboratorium dan alat peraga lainnya; (b), memberdayakan orang tua murid/BP3 sekolah atau komite sekolah untuk membantu pihak sekolah dalam mengatasi masalah dana dari Pemerintah yang sangat terbatas; (c), menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan daerah terutama sekolah kejuruan, jurusan-jurusan yang ada di sekolah tersebut diselaraskan dengan potensi Kota Jambi serta Visi dan Misi Kota Jambi; dan (d), khusus terhadap pendidikan luar sekolah lebih diarahkan untuk menyiapkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik untuk dapat memenuhi pasar kerja.

Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dirumuskan melalui sebagai berikut : (a), Peningkatan Klasifikasi tenaga kependidikan setiap jenjang dalam rangka pengembangan profesionalisme ketenagaan; (b), Peningkatan pembinaan, efisiensi, lembaga pendidikan; (c), Peningkatan sarana dan prasarana serta kesejahteraan guru Negeri maupun Swasta disemua jenjang dalam rangka mengentaskan wajib belajar 9 tahun; (d), Pengembangan sistim manajemen, peningkatan mutu berbasis sekolah pada setiap jenjang pendidikan dan mendorong peran serta masyarakat; (e), Pengembangan dan pembinaan pendidikan prasekolah, SLTP Terbuka dan mendorong berdirinya SMU terbuka; (f), Peningkatan pengelolaan pendidikan luar sekolah dan masyarakat; (g), Peningkatan kualitas tenaga tehnis kebudayaan dalam mengembangkan kebudayaan, khususnya kebudayaan Daerah Jambi di lingkungan pendidikan formal dan non formal; (h), Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang bermutu bagi seluruh warga kota melalui penyelenggaraan pendidikan 9 tahun secara sistematis dan komprehensif; (i), Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kependidikan untuk semua tingkatan dari sisi profesionalisme dan akademik; dan (j), mendorong pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi jenis-jenis pendidikan kejuruan dan pemanfaatan secara maksimal muatan lokal yang sesuai dengan kepentingan daerah dan tuntutan pasar kerja yang sedang dan akan berkembang; dan (k), memberdayakan lembaga pendidikan sebagai penyiapan tenaga-tenaga terampil yang memiliki budaya dan berbudi pekerti yang luhur.

#### **4.2.12. Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Berprilaku Positif**

Dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera, keberhasilan dalam pembangunan ekonomi harus pula sejalan dengan pembangunan di bidang kesehatan, dimana pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang relatif tinggi diikuti dengan peningkatan derajat kesehatan. Arah kebijakan pembangunan kesehatan kota Jambi sampai tahun 2025 adalah *mencapai masyarakat sehat*, yang ditandai dengan : (a), penduduk yang hidup dalam lingkungan dan dengan prilaku hidup bersih dan sehat; (b), pemerintah kota memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata; (c), semakin besarnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan; dan (d), masyarakat mempunyai derajat kesehatan yang tinggi.

Pemantauan terhadap pola penyakit menghasilkan informasi bahwa, dari sepuluh jenis penyakit terbesar yang diderita oleh masyarakat di Kota Jambi, infeksi akut saluran pernafasan bagian atas merupakan penyakit terbesar jumlah penderitanya (27,63 %). Untuk menekan penyakit tersebut, diperlukan kemandirian masyarakat dalam perawatan kesehatan, terutama terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu memenuhi kebutuhan kesehatannya dengan bantuan tenaga medis

Selain itu, pemberantasan penyakit menular yang mengganggu masyarakat Kota juga terus dilakukan. Penyakit menular yang masih menjadi masalah di Kota Jambi saat ini diantaranya adalah penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), diare, malaria, demam berdarah, rabies, TBC paru, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta HIV/AIDS. Penyakit demam berdarah masih endemis disebagian besar

kelurahan di Kota Jambi, namun angka kesakitan dan angka kematian akibat demam berdarah cenderung menurun dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini terjadi karena cepatnya penanganan yang dilakukan setiap kali terjadi kasus demam berdarah.

Masa depan masyarakat kota Jambi tergantung pada generasi mudanya. Kondisi kesehatan mereka akan merupakan penentu kualitas masyarakat saat itu. Balita sebagai cikal bakal generasi penerus harus mempunyai kulaitas prima. Maksud tersebut dapat terlaksana jika kondisi gizinya cukup baik. Perlu dilakukan upaya seperti: mengetahui secara dini keadaan gizi balita, dan bila terjadi ancaman terhadap keadaan gizi masyarakat (Balita) segera dilakukan tindakan penanggulangan secara cepat dan tepat, serta mencari tahu dan menentukan tindakan yang diperlukan. Status gizi Balita dapat diketahui dengan cara mengukur sampel balita di semua Kelurahan (80 %) dan penimbangan bulanan Balita di Posyandu.

Masyarakat yang sehat akan terwujud dengan meningkatkan Gizi yang dimulai dari anak yang masih dalam kandungan Ibu sampai kepada masa pertumbuhan anak. Kebijakan pemerintah diarahkan melalui peningkatan anggaran untuk mensubsidi pengobatan ibu hamil. Dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya peningkatan gizi alam keluarga.

Dengan demikian, dapat tercipta : (a), suasana kondusif yang dapat mendorong tumbuh kembangnya program kota sehat, (b), memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan lembaga kesehatan melalui pemberdayaan SDM, sarana dan prasarana serta tersedianya obat-obatan yang berkualitas dan dapat terjangkau oleh masyarakat; dan (c), menciptakan pengembangan kualitas kesehatan keluarga dan masyarakat.

Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah kota Jambi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dapat dielaskan berikut ini.

#### **4.2.12.1. Peningkatan Prilaku Hidup Sehat**

Prilaku hidup sehat harus ditumbuhkan sejak dini dalam masyarakat kota melalui penyuluhan dan pendidikan kesehatan. Dalam kaitan ini diperlukan peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama melalui konsep pembangunan kesehatan masyarakat. Kemudian juga perlu peningkatan peran organisasi profesi sebagai organisasi masyarakat terutama yang menyangkut penyusunan dan pemanfaatan standar dan kode etik profesi dalam pelayanan kesehatan serta berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

#### **4.2.12.2. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**

Sumber daya kesehatan yang penting adalah tersedianya *sarana Rumah Sakit dan Puskesmas* yang bermutu dan merata. Puskesmas lebih berperan dalam penyelenggaraan kesehatan dasar masyarakat, Sementara Rumah Sakit Umum Daerah kota lebih berperan dalam menerima pasien yang merupakan rujukan dari Puskesmas tersebut. Untuk itu diperlukan penyediaan dokter dan tenaga pelayanan kesehatan lainnya yang merata dan berkualitas.

Dalam hubungan dengan *sumber daya obat*, dengan beragamnya pola penyakit yang ada di Kota Jambi, menuntut pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kemampuan pelayanan kesehatan melalui pengadaan obat dan penjaminan mutu obat, makanan dan kosmetika dan bahan berbahaya lainnya. Selain persediaan obat, diperlukan keikutsertaan masyarakat dan tenaga medis dalam hal : (a), peningkatan pemahaman masyarakat dalam penggunaan obat termasuk obat tradisional sehingga turut mendukung pelayanan kesehatan moderen; (b), peningkatan penyuluhan masalah Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat; dan (c), perlu tersedianya Unit Rehabilitasi Ketergantungan Obat.

Sumber daya lain yang menjadi perhatian adalah *sumber daya kesehatan*. Arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan kota Jambi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dengan meningkatkan pelayanan kesehatan, yang dilakukan melalui : (a),

meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui pendidikan formal dan non-formal seperti pelatihan dan work shop; (b), meningkatkan alat-alat kesehatan; dan (c), meningkatkan kesejahteraan tenaga medis.

Dengan demikian pelayanan kesehatan yang baik terlihat dari : (a), tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata; (b), masyarakat mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu; dan (c), pelayanan kesehatan tidak saja dilakukan pemerintah, tetapi mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat dan swasta.

Pelayanan kesehatan akan baik bila didukung dengan *pembiayaan yang mencukupi*. Sumber biaya untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan selain berasal dari pemerintah, juga lebih dikembangkan peran aktif masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan. Disamping pengelolaan dana masyarakat yang diupayakan melalui program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), penyelenggaraan program Jaring Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan masih diperlukan.

#### **4.2.13. Mewujudkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, perlindungan anak serta kota ramah anak**

Peran perempuan dalam pembangunan tidak diragukan lagi. Tokoh perempuan Indonesia yang terkenal Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika sebagai pioner perjuangan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa sekarang peran perempuan lebih ditujukan pada upaya membina kesejahteraan keluarga. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan juga berperan dalam ikut memberikan kontribusi terhadap keuangan keluarga. Namun demikian ditinjau dari sisi kuantitas perkembangannya, perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Untuk itu pentingnya Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan yang ditekankan pada kemandirian supaya mereka paham dan menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi pelayan bagi kaum lelaki saja. Dalam hal pendidikan perempuan setidaknya dirahkan pada pendidikan yang wajib bagi setiap orang demi menjaga kehidupannya sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Disamping itu juga pendidikan yang bermanfaat bagi keluarganya dan lingkungan masyarakat sekelilingnya.

Untuk itu dalam perencanaan pembangunan perlu memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan adalah:

1. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan
3. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
4. Memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.
5. Mengembangkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat nasional dan daerah;

#### **4.2.14. Mewujudkan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat**

Kemiskinan yang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif dimana masing-masing kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Kemiskinan relatif hanya melihat individu yang dibandingkan dengan individu

lain dalam kelompok tersebut yang mana sangat tergantung pada kondisi kelompoknya. Dikatakan miskin secara absolut apabila penghasilan sehari-hari mereka dibawah kebutuhan fisik minimum. Untuk melihat kemiskinan absolut biasanya digunakan indicator pembangunan yang telah memiliki berbagai variable dalam menilai objek yang diteliti.

Kemiskinan juga dipandang sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan hidup.

Teori dan Model pembangunan yang juga ditujukan untuk penyelesaian kemiskinan telah banyak dikenal seperti Teori pembangunan berimbang, Teori pembangunan yang mengupayakan terpenuhinya *basic need*, Teori pembangunan menekankan pada pemerataan, Teori pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas hidup termasuk kualitas permukiman dan Teori pembangunan berkelanjutan. Secara konsepsional kesemua teori tersebut benar adanya namun dalam aplikasinya perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Berbagai cara pandang terhadap kemiskinan ini telah digunakan untuk menganalisis kondisi kemiskinan misalnya miskin ekonomi, pendidikan, akses, moral, penegakan hukum dan keadilan, harga diri. Namun penyelesaian nampak sektoral dan belum terintegrasi.

Penyelesaian masalah kemiskinan kota Jambi penekanannya lebih kepada target masyarakat miskin baik dari aspek status pekerjaan maupun daerah kantong-kantong kemiskinan yang ada. Dari aspek pekerjaan kemiskinan banyak terdapat pada mereka yang bekerja pada sector informal dan kaum buruh, sedangkan kantong-kantong kemiskinan banyak ditemukan pada daerah permukiman kumuh.

Arah kebijakan umum yang dapat dilakukan adalah upaya kemandirian masyarakat melalui (1) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara aktif untuk membangun diri dan lingkungannya hanya dapat dilakukan dengan membangun komunitas. (2) Menumbuhkan dan Membangun Kelembagaan Lokal. (3) Memfasilitasi Transformasi Wewenang Kepada Masyarakat.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui memberikan kesempatan memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal untuk warga miskin. Kelembagaan local dapat dijadikan modal social dalam pemberdayaan masyarakat ditingkat komunitas dengan demikian secara bersama-sama kelompok masyarakat miskin dapat diberdayakan dengan lebih terstruktur. Transformasi kewenangan lebih diarahkan pada bagaimana menggali potensi kelompok dan berkembang sesuai dengan harapan mereka dengan tetap memberikan pendampingan.

### **4.3. Tahapan dan Skala Prioritas**

Berdasarkan pada visi yang telah ditetapkan dan misi yang disusun untuk mewujudkan visi tersebut maka disusun arah pembangunan daerah dengan berbagai sasaran yang ingin dicapai. Dalam mencapai sasaran tersebut, pembangunan jangka panjang daerah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Masing-masing tahapan pembangunan mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya. Tahapan pertama menunjukkan dasar penetapan landasan pokok pembangunan selama lima tahun pertama. Tahapan kedua dan selanjutnya menunjukkan arah pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada capaian pembangunan pada tahapan sebelumnya.

Pada masing-masing tahapan ditetapkan skala prioritas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan visi kepala daerah pada periode tersebut. Dalam hal ini secara administrasi pemerintahan pada masing-masing tahapan pembangunan tentunya berhubungan dengan pergantian kepala daerah yang merupakan hasil dari

pemilihan kepala daerah melalui Pemilu. Kepala daerah terpilih dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membuat skala prioritas pembangunan sesuai Visi dan Misi yang ditawarkan pada masyarakat pada saat pemilu. Untuk itu visi dan misi tersebut hendaknya mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJP.

Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

#### **4.3.1. RPJM ke-1 (2005 – 2009)**

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan dan berbagai permasalahan yang dihadapi tahap sebelumnya, RPJM ke-1 diarahkan pada pemetaan berbagai permasalahan yang berkembang dan pengaruhnya terhadap perkembangan kota Jambi pada masa yang akan datang. Pemetaan permasalahan ini meliputi tata ruang, ketersediaan sarana prasarana (infrastruktur) perkotaan, manajemen prasarana, kependudukan, kesejahteraan masyarakat, fungsi pelayanan pemerintah dan lingkungan hidup. Dengan telah teridentifikasinya berbagai permasalahan tersebut disusun kembali strategi pembangunan kota Jambi yang memadukan antara sumberdaya manusia, ketersediaan sarana, dan pelaksanaan berbagai aktivitas pembangunan dalam mencapai visi pembangunan daerah.

Perencanaan Kota Jambi pada tahap pembangunan pertama lebih diarahkan pada penyusunan rencana tata ruang yang meliputi rencana penggunaan lahan perkotaan, rencana pengembangan jaringan jalan dan system transportasi, dan infrastruktur pendukung perkotaan.

Penduduk dan ketenagakerajaan menjadi perhatian penting mengingat tingkat perkembangan penduduk yang cukup pesat bukan hanya dari pertumbuhan penduduk alami akan tetapi juga berasal dari migran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi perlu dilihat beberapa aspek menyangkut ketersediaan sarana pendidikan, kesehatan, pemukiman dan kebutuhan fasilitas lainnya. Disamping itu dampak social ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya migrasi terutama yang berasal dari proses urbanisasi.

Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dapat dilihat dari penurunan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup diperkotaan menjadi perhatian bagi perencanaan perkotaan. Keindahan kota sangat ditentukan oleh bagaimana penataan taman-taman kota yang menjadikan kota tampak asri. Disamping penataan kota juga berkaitan dengan bagaimana menangani permasalahan limbah baik limbah rumahtangga maupun industri. Pencemaran udara, kebisingan, dan kemacetan juga merupakan masalah pokok pembangunan perkotaan.

Sejalan dengan langkah diatas tentunya pembenahan dan penguatan peran institusi pemerintah terus selalu dilakukan. Hal ini mengigat peran pemerintah kota adalah menentukan arah dan kebijaksanaan pengembangan kota yang disusun dalam rencana pembangunan kota yang serasi, aplikasi dan komprehensif. Penataan institusi pemerintah harus diawali dengan penguatan institusi yang efisien dan efektif dengan tenaga pelaksana pemerintah pada berbagai tingkat eselonisasi yang berbasis kompetensi dan profesionalisme serta meningkatkan keterampilan dan pendidikan tenaga birokrat. Konsep perencanaan pembangunan secara terpadu disusun guna sinkronisasi kegiatan pembangunan baik antar sector maupun antar instansi pelaksana.

#### **4.3.2. RPJM ke-2 (2010 – 2014)**

Pada RPJMD ke-1 lebih diarahkan pada pemetaan dan pemahaman akan permasalahan perkotaan dalam berbagai aspek secara komprehensif dengan tingkat keparahan masing-masing. Pada RPJMD ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas pembangunan yang didasarkan atas permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka mewujudkan kota Jambi menjadi pusat perdagangan barang dan jasa, perencanaan pembangunan harus diarahkan pada pembangunan berbagai sarana prasarana perkotaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan rencana pengembangan kota pada masa yang akan datang.

Ketersediaan infrastruktur tentunya tidak dapat dicapai dengan satu periode atau tahapan pembangunan akan tetapi memerlukan beberapa tahun (*multi year*) bahkan mungkin dalam beberapa tahapan pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kota Jambi dalam bidang perdagangan baik untuk produk industri kecil, menengah dan besar, sehingga Jambi akan menjadi pusat perdagangan barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur tentu saja dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Dibidang sosial diharapkan peningkatan sumberdaya manusia melalui penyediaan inprastruktur pendidikan dan kesehatan yang representatif dan mengacu pada peningkatan daya saing. Dalam bidang pendidikan, semakin dimantapkan kepada peningkatan kualitas pendidikan berstandar internasional.

#### **4.3.3. RPJM ke-3 (2015 – 2019)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahapan pembangunan pada RPJMD ke-1 dan RPJMD ke-2 maka pada tahapan pembangunan ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kemandirian kota, maka perkembangan demokratisasi diarahkan pada semua aktivitas meliputi ekonomi, politik dan aktivitas lainnya telah berbasis kepada mekanisme pasar yang berorientasi kepada persaingan daya saing yang jujur berbasis kepada kualitas dan latar belakang pendidikan baik formal maupun informal. Pelaksanaan pembangunan didasarkan kehendak masyarakat yang dituangkan kedalam undang-undang atau peraturan daerah yang sudah disepakati.

Peningkatan kesejahteraan sosial tentunya memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas keagamaan yang mengedepankan kerukunan antar umat beragama dan akhlak yang mulia. Disamping itu juga berkembangnya dan mengakarnya kebudayaan dan adat istiadat daerah. Dalam hal ini pembagunan diarahkan mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pencapaian keserasian umat beragama dan perkembangan kebudayaan daerah.

#### **4.3.4. RPJM ke-4 (2020 – 2024)**

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan masing-masing tahapan pembangunan yang diawali dengan pemetaan permasalahan pembangunan kota Jambi, penyediaan sarana prasarana perkotaan dan pemantapan berbagai program dan kegiatan yang telah ditujukan untuk mewujudkan visi Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa yang religius dan berbudaya pada tahun 2025. Pembangunan di berbagai bidang ditujukan untuk menjadikan kota Jambi sebagai

kota yang mandiri dengan struktur perekonomian yang mantap melalui sector jasa sebagai pendorong perekonomian utama yang didukung dengan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai actor pembangunan bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh di tahun 2025 merupakan harapan yang mungkin tercapai melalui berbagai program yang berkelanjutan dan komprehensif. Keberhasilan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan dan kesehatan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan dan kesehatan. Disamping itu juga terwujudnya kesetaraan gender.

Disisi lain berkembangnya demokrasi diberbagai bidang melahirkan keyakinan public terhadap pemerintahan dan hal ini akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Kepercayaan public merupakan modal dasar bagi pencapaian visi daerah.

Pada periode keempat yang merupakan periode akhir pembangunan diarahkan pada pemantapan capaian hasil pembangunan pada periode sebelumnya bukan saja perkembangan perdagangan barang dan jasa yang telah mampu menjadinya tulang punggung perekonomian kota, tetapi juga ditopang profesionalisme aktor pembangunan, demokratisasi, dan berbasis kepada masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Kemudian RPJP 2005-2025 akan menjadi dasar penyusunan RPJP periode berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005-2025 yang berisi Visi, Misi dan Arah Pembangunan merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Jambi, masyarakat, dan dunia usaha didalam menyelenggarakan pembangunan selama 20 tahun kedepan. Disamping itu juga menjadi arah dan pedoman bagi calon Walikota dan Wakil Walikota dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa yang Religius dan Berbudaya** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah; (3) keberpihakan kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.



# WALIKOTA JAMBI

## PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 13 TAHUN 2009

### TENTANG

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menyusun arah dan rumusan pembangunan daerah selama dua puluh tahun sesuai dengan potensi, kondisi, keunggulan, peluang dan tantangan yang ada di daerah serta mewujudkan landasan bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025;
  - bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propivinsi Jambi Tahun 2005-2025
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 05 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 06 Seri E Nomor 04)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2005-2025

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Permerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

## **BAB II**

### **ARAH PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Arah Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari arah pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Sistematika Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005–2025, adalah sebagai berikut:  
BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Kondisi Umum Daerah  
BAB III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah  
BAB IV : Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi Tahun 2005 – 2025  
BAB V : Penutup
- (2) Sistematika dan isi serta uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kota Jambi melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Jambi
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan serta kondisi daerah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

RPJPD Kota Jambi menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Kepala Daerah

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 14 Desember 2009

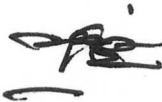
WALIKOTA JAMBI



**R. BAMBANG PRIYANTO**

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 14 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI



**KAILANI**